

**PENGARUH LATAR BELAKANG PRIBADI DAN POLITIK, KOMITMEN  
ORGANISASI DAN PENGETAHUAN ANGGARAN ANGGOTA DEWAN  
TERHADAP PENGAWASAN REALISASI APBD SU TAHUN 2019**

**SKRIPSI**

Oleh:

**CITRA HIDAYAH**

NIM. 0502161039

Program Studi  
AKUNTANSI SYARIAH



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020 M/1442 H

**PENGARUH LATAR BELAKANG PRIBADI DAN POLITIK, KOMITMEN  
ORGANISASI DAN PENGETAHUAN ANGGARAN ANGGOTA DEWAN  
TERHADAP PENGAWASAN REALISASI APBD SU TAHUN 2019**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Pada Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh:

**CITRA HIDAYAH**

NIM. 0502161039

Program Studi

AKUNTANSI SYARIAH



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2020 M/1442 H

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Citra Hidayah  
NIM : 502161039  
Tempat/Tgl. Lahir : Medan, 14 Mei 1998  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Pertiwi no. 88 Medan, Sumatera Utara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“PENGARUH LATAR BELAKANG PRIBADI DAN POLITIK, KOMITMEN ORGANISASI DAN PENGETAHUAN ANGGARAN ANGGOTA DEWAN TERHADAP PENGAWASAN REALISASI APBD SU TAHUN 2019”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 12 Oktober 2020

Yang membuat pernyataan



Citra Hidayah  
NIM. 5021.61039

## **PERSETUJUAN**

Skripsi Berjudul:

### **PENGARUH LATAR BELAKANG PRIBADI DAN POLITIK, KOMITMEN ORGANISASI DAN PENGETAHUAN ANGGARAN ANGGOTA DEWAN TERHADAP PENGAWASAN REALISASI APBD SU TAHUN 2019**


Oleh:

**CITRA HIDAYAH**  
NIM. 0502161039

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun)  
Pada Program Studi Akuntansi Syariah

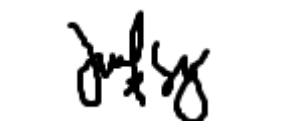
Medan, 15 Oktober 2020

Pembimbing I



Yusrizal, S.E., M.Si  
NIDN. 2022057501

Pembimbing II



Laylan Syafina, M.Si  
NIDN. 2027089103

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi Syariah



Hendra Harmain, S.E., M.Pd  
NIDN. 2010057302

## PENGESAHAN

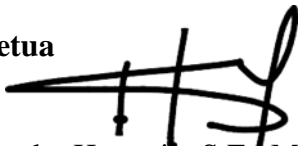
Skripsi berjudul “**PENGARUH LATAR BELAKANG PRIBADI DAN POLITIK, KOMITMEN ORGANISASI DAN PENGETAHUAN ANGGARAN ANGGOTA DEWAN TERHADAP PENGAWASAN REALISASI APBD SU TAHUN 2019**” an. Citra Hidayah, NIM. 0502161039 Program Studi Akuntansi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tanggal 27 Oktober 2020. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun) pada Program Studi Akuntansi Syariah.

Medan, 27 Oktober 2020

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Program Studi, Akuntansi Syariah UIN-SU

**Ketua**



Hendra Harmain, S.E., M.Pd  
NIDN. 2010057302

**Sekretaris**



Kusniawaty, S.E., Ak, M.Ak  
NIDN. 2014068001

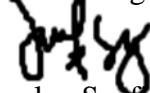
Anggota

**Pembimbing I**



Yusrizal, S.E., M.Si  
NIDN. 2022057501

**Pembimbing II**



Laylan Syafina, M.Si  
NIDN. 2027089103

**Penguji I**



Dr. Nurlaila, S.E., M.A  
NIDN. 2021057503

**Penguji II**



Rahmat Daim Harahap, S.E.I., M.Ak  
NIDN. 0126099001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Sumatera Utara Medan



Dr. Andri Soemitra, M.A  
NIDN. 2007057602

## **ABSTRAK**

**Citra Hidayah (2020) “Pengaruh Latar Belakang Pribadi dan Politik, Komitmen Organisasi dan Pengetahuan Anggaran Anggota Dewan Terhadap Pengawasan Realisasi APBD SU Tahun 2019” di bawah bimbingan Yusrizal, S.E., M.Si sebagai Pembimbing Skripsi I dan Laylan Syafina, M.Si sebagai Pembimbing Skripsi II.**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh fakta bahwa latar belakang individu akan berpengaruh terhadap perilaku individu dalam aktivitas politik. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah latar belakang pribadi, latar belakang politik, komitmen organisasi dan pengetahuan anggaran baik secara parsial maupun simultan berpengaruh dan signifikan terhadap pengawasan realisasi APBD. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengawasan realisasi APBD. Variabel independennya adalah latar belakang pribadi, latar belakang politik, komitmen organisasi dan pengetahuan anggaran. Data dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari responden dan disebarkan secara langsung. Data yang berhasil dikumpulkan berasal dari 70 responden yang merupakan anggota dewan di Badan Anggaran, Komisi B, C, dan D DPRD Provinsi Sumatera Utara Periode 2019-2024. Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan regresi linear berganda dengan menggunakan program *SPSS versi 26.0*. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pertama, latar belakang pribadi tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pengawasan realisasi APBD. Kedua, latar belakang politik tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pengawasan realisasi APBD. Ketiga, komitmen organisasi berpengaruh dan signifikan terhadap pengawasan realisasi APBD. Keempat, pengetahuan anggaran berpengaruh dan signifikan terhadap pengawasan realisasi APBD. Kelima, latar belakang pribadi, latar belakang politik, komitmen organisasi dan pengetahuan anggaran secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap pengawasan realisasi APBD.

**Kata kunci : Latar Belakang Pribadi, Latar Belakang Politik, Komitmen Organisasi, Pengetahuan Anggaran, Pengawasan Realisasi APBD, dan Peran DPRD.**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, segala puji atas kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala nikmat berupa kesehatan, nikmat rezeki, nikmat umur yang panjang dan nikmat kelapangan waktu yang telah Allah berikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENGARUH LATAR BELAKANG PRIBADI DAN POLITIK, KOMITMEN ORGANISASI DAN PENGETAHUAN ANGGARAN ANGGOTA DEWAN TERHADAP PENGAWASAN REALISASI APBD SU TAHUN 2019”**. Tidak lupa shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada Suri Tauladan Umat Islam yaitu Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita masuk ke dalam jajaran umat-nya yang mendapatkan naungan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Aamiin Ya Rabbal Aalamiin.

Skripsi ini merupakan salah satu tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Terselesaikannya skripsi ini tentunya berkat bantuan dari banyak pihak yang telah ikut membantu secara materil maupun nonmateril. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang terkait di dalam terselesaikannya skripsi ini. Terima kasih yang teristimewa penulis ucapkan kepada orang tua penulis, Almarhum Bapak Legianto, Ayahanda Suyono dan Ibunda Rusnilawati tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan dan doa yang tak pernah putus kepada penulis. Salam cinta dan takjub penulis haturkan untuk kalian semua.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman Harahap, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Andri Soemitra, M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

3. Bapak Hendra Harmain, S.E., M.Pd selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah, dan Ibu Kusmilawaty, S.E, Ak, M.Ak selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Nurlaila, S.E., M.A selaku Penasehat Akademik sekaligus sebagai Penguji I yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, nasehat, dan pemahaman kepada penulis dalam menyelesaikan akademik di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Bapak Yusrizal, S.E., M.Si selaku Pembimbing Skripsi I, dan Ibu Laylan Syafina, M.Si selaku Pembimbing Skripsi II yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Rahmat Daim Harahap, S.E.I., M.Ak selaku Penguji II yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis.
7. Seluruh Dosen dan Pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu yang luar biasa serta membantu penulis dalam kegiatan perkuliahan.
8. Seluruh Bapak/Ibu Anggota Dewan DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2019-2024 yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi responden dalam penelitian ini.
9. Ibu Hj. Tini selaku Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara, Ibu Nuraini, S.E., M.S.P selaku Kabag Informasi dan Protokol, Bapak Syafii, Bapak Eko, Bu Juli dan seluruh pegawai di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara yang telah banyak membantu penulis dalam mengumpulkan data-data terkait penelitian ini.
10. Bapak Suprayitno selaku pembimbing penulis selama magang di Fraksi Gerindra Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara yang sudah penulis anggap seperti Ayah sendiri.
11. Ibu Mel selaku pegawai di Fraksi Golkar, Kak Oriza selaku pegawai di Fraksi PDIP, Bang Faisal selaku pegawai di Fraksi Nasdem, Ibu Aida selaku pegawai di Fraksi Hanura dan seluruh pegawai di setiap Fraksi dan



Komisi di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara yang sudah bersedia penulis repotkan dalam penyelesaian penelitian ini.

12. Kedua Saudara tercinta yang sangat penulis sayangi yaitu, Kakanda Pingky Inayah, A.Md.A.K dan Adinda Ridho Suriya Darma. Serta Abangda Rahmat Pandi Hasibuan selaku abang ipar penulis yang selalu memberikan doa, semangat dan dukungannya kepada penulis untuk menyelesaikan akademik ini.
13. Sahabat-Sahabat terbaik yang sangat penulis sayangi selama kuliah yaitu, Ridha Amalia, Fitri Lestari, Nurhidayah Nasution, Marhamah Isnaini dan Rosdiana Dalimunthe. Serta Sahabat terbaik penulis dari SMA yaitu, Chairunnisa Daulay, Nur Asyiah Lubis, Liza Aulia, Monica Aprilia, Sri Wahyuni, Yuni Efrida Yanti dan Sonya Faradilla. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan keluh kesah penulis, memberi semangat dan motivasi serta dukungan dan doanya kepada penulis.
14. Rekan-rekan seperjuangan AKS B'16, rekan-rekan seangkatan, rekan-rekan seperbimbingan skripsi, rekan-rekan satu organisasi baik di kampus ataupun di luar kampus, rekan-rekan KKN kelompok 14 dan seluruh rekan-rekan yang sudah banyak membantu penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih atas dukungan dan kebersamaanya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Akhirnya, kepada Allah jualah penulis memohon ampun dan berserah diri, semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Aamiin Ya Rabbal Aalamiin.

***Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Medan, 12 Oktober 2020

Penulis

**Citra Hidayah**  
NIM. 0502161039

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	8
C. Batasan Masalah .....	8
D. Rumusan Masalah .....	9
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS.....</b>	<b>11</b>
A. Kajian Teoritis .....	11
1. Konsep Dasar Pengawasan.....	11
a. Pengertian Pengawasan.....	11
b. Tipe-Tipe Pengawasan.....	12
c. Macam-Macam Pengawasan.....	12
d. Maksud dan Tujuan Pengawasan.....	14
e. Unsur-Unsur Pengawasan .....	15
f. Tahap-Tahap dalam Proses Pengawasan.....	15
g. Karakteristik Pengawasan yang Efektif .....	15
2. Pengawasan Keuangan Sektor Publik Dan Sektor Swasta.....	16
a. Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Sektor Swasta .....	16
b. Pengawasan Sektor Publik dan Pengawasan Sektor Swasta .....	17

c. Konsep Pengawasan dalam Islam .....	21
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengawasan .....	23
a. Latar Belakang Pribadi.....	25
b. Latar Belakang Politik .....	27
c. Komitmen Organisasi .....	28
d. Pengetahuan Anggaran Anggota Dewan .....	29
B. Penelitian Terdahulu .....	31
C. Kerangka Konseptual .....	38
D. Hipotesis Penelitian .....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Pendekatan Penelitian.....	40
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	40
C. Populasi dan Sampel.....	40
D. Jenis dan Sumber Data Penelitian .....	41
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	42
F. Definisi Operasional .....	44
G. Analisis Data .....	46
1. Statistik Deskriptif.....	46
2. Uji Kualitas Data .....	47
3. Uji Asumsi Klasik .....	48
4. Uji Regresi Linier Berganda.....	50
5. Uji Hipotesis .....	51
<b>BAB IV TEMUAN PENELITIAN .....</b>	<b>54</b>
A. Gambaran Umum DPRD Provinsi Sumatera Utara .....	54
1. Sejarah Singkat Berdirinya DPRD Provinsi Sumatera Utara.....	54
2. Visi dan Misi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara .....	55
3. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas di DPRD Provinsi Sumatera Utara .....	56
B. Deskripsi Data Penelitian .....	62
1. Deskripsi Karakteristik Responden .....	63
2. Distribusi Persentase Jawaban Responden .....	66
C. Uji Persyaratan Analisis .....	79
1. Statistik Deskriptif.....	79
2. Uji Kualitas Data .....	80
a. Uji Validitas .....	80

b. Uji Reliabilitas .....	83
3. Uji Asumsi Klasik .....	84
a. Uji Normalitas .....	84
b. Uji Multikolinearitas .....	87
c. Uji Heteroskedastisitas .....	88
4. Uji Regresi Linier Berganda .....	89
D. Uji Hipotesis .....	91
1. Uji t .....	91
2. Uji F .....	93
3. Uji Model $R^2$ .....	94
E. Interpretasi Hasil Penelitian .....	94
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>100</b>
A. Kesimpulan .....	100
B. Saran-Saran .....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>102</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>106</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>115</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019.....	3
Tabel 1.2 Kriteria Kinerja Keuangan dalam Pengelolaan APBD .....	4
Tabel 1.3 Tingkat Kinerja Keuangan Pemprov Sumut Tahun 2019.....	4
Tabel 2.1 Perbedaan Akuntansi Sektor Publik dan Sektor Swasta.....	16
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu .....	31
Tabel 3.1 Skor/Bobot Penilaian Menggunakan Skala Likert.....	43
Tabel 3.2 Definisi Operasional .....	44
Tabel 4.1 Ikhtisar Distribusi dan Pengembalian Kuesioner.....	62
Tabel 4.2 Data Demografi Responden .....	65
Tabel 4.3 Persentase Jawaban Responden Berdasarkan Latar Belakang Pribadi	67
Tabel 4.4 Persentase Jawaban Responden Berdasarkan Latar Belakang Politik .	69
Tabel 4.5 Persentase Jawaban Responden Berdasarkan Komitmen Organisasi ..	71
Tabel 4.6 Persentase Jawaban Responden Berdasarkan Pengetahuan Anggaran	74
Tabel 4.7 Persentase Jawaban Responden Berdasarkan Pengawasan Realisasi APBD .....	77
Tabel 4.8 <i>Descriptive Statistics</i> .....	79
Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Latar Belakang Pribadi.....	81
Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas Latar Belakang Politik .....	81
Tabel 4.11 Hasil Uji Validitas Komitmen Organisasi .....	82
Tabel 4.12 Hasil Uji Validitas Pengetahuan Anggaran .....	82
Tabel 4.13 Hasil Uji Validitas Pengawasan Realisasi APBD.....	83
Tabel 4.14 Hasil Uji Reliabilitas .....	84
Tabel 4.15 Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test.....	85
Tabel 4.16 Hasil Uji Multikolinearitas.....	87
Tabel 4.17 Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan <i>Glejser</i> .....	89
Tabel 4.18 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda .....	90
Tabel 4.19 Hasil Uji t (Parsial) .....	92
Tabel 4.20 Hasil Uji F (Simultan).....	93
Tabel 4.21 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	94

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	38
Gambar 4.1 Struktur Organisasi DPRD Provinsi Sumatera Utara.....	57
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas Pendekatan Histogram .....	86
Gambar 4.3 Hasil Uji Normalitas Pendekatan Grafik <i>p-plot</i> .....	86
Gambar 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan <i>Scatterplot</i> .....	88

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Surat Izin Riset .....	106
Lampiran 2. Kuesioner Penelitian.....	107

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Otonomi daerah yang dicanangkan di Indonesia sejak tahun 2002 sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah<sup>1</sup> memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada daerah otonom untuk membangun daerah dalam rangka akselerasi pembangunan, mewujudkan cita-cita kesejahteraan rakyat sesuai amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>2</sup>

Sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, kebijakan pembangunan daerah mensyaratkan adanya keselarasan laju pertumbuhan antardaerah, pemerataan antardaerah, dan pemberian bobot otonomi daerah yang seluas-luasnya.<sup>3</sup> Dengan prinsip otonomi berdasarkan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab tersebut harus dimaknai sebagai suatu amanah dalam berkarya dan bekerja untuk rakyat karena pemerintah dipilih oleh rakyat dan harus bekerja untuk rakyat.

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. UU Nomor 33 tahun 2004 memberikan kekuasaan dan tanggung jawab yang dibebankan kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya sendiri secara maksimal menjadi lebih besar. Tujuannya agar distribusi dan pemanfaatan sumber daya alam nasional dapat

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>2</sup> Hendra Kariangan, *Carut-Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah: Perspektif Hukum dan Politik*, (Depok: Kencana, 2017), h. 9.

<sup>3</sup> Zainie Abdullah, *Dilema Pelaksanaan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*, (AIPI: Lipi Press, 2005), h. 266.



merata dan tercipta keseimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.<sup>4</sup>

Selain itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah<sup>5</sup> yang mendasari pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Pengertian pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan daerah sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Mardiasmo mengemukakan acuan dalam suatu sistem pengelolaan daerah, meliputi pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik.<sup>6</sup>

Menurut Lincolin<sup>7</sup>, prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan keuangan daerah, yaitu: transparansi, masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran, karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat terutama pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, akuntabilitas, prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, *Value of Money*, prinsip ini sesungguhnya merupakan penerapan tiga aspek yaitu ekonomi, efisiensi dan efektifitas. Ekonomi, berkaitan dengan pemilikan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu ada harga yang paling murah. Efisiensi, penggunaan dana masyarakat (*public money*) harus dapat menghasilkan output

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>6</sup> Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Cet. 1, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2002), h. 9-10.

<sup>7</sup> Arsyad, Lincolin, *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, (Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, 1999), h. 105.

maksimal (berdayaguna). Efektif, penggunaan anggaran harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.

Hal yang perlu diingat bahwa salah satu aspek penting dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah masalah keuangan dan anggaran daerah (APBD). Oleh karena itu, diperlukan peranan anggota DPRD yang sangat besar untuk mengontrol kebijakan mengenai pengawasan realisasi APBD agar ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Dan peranan tersebut salah satunya adalah DPRD melaksanakan fungsi pengawasan untuk mengontrol realisasi APBD. Menurut Sastroatmodjo ada dua tingkat orientasi politik yang mempengaruhi perilaku politik, yaitu sistem dan individu. Kelemahan yang terjadi atas peranan legislatif dalam pengawasan keuangan daerah dapat mungkin terjadi karena kelemahan sistem politiknya ataupun individu sebagai pelaku politik.<sup>8</sup>

Dalam pendekatan *behaviorisme*, individu adalah yang dipandang secara aktual melakukan kegiatan politik, sedangkan perilaku lembaga politik pada dasarnya merupakan perilaku individu dengan pola tertentu. Oleh karena itu untuk menjelaskan perilaku suatu lembaga yang perlu ditelaah bukan lembaganya, melainkan latar belakang individu yang secara aktual mengendalikan lembaga.

Adapun di Provinsi Sumatera Utara ditemukannya ketidakefisienan pengelolaan APBD oleh Pemprov Sumut pada tahun 2019 sebesar 103,41%. Berikut ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2019 :

**Tabel 1.1**  
**Realisasi APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019**

Tahun	Anggaran		Realisasi		Persentase	
	Pendapatan	Belanja	Pendapatan	Belanja	Pendapatan	Belanja
2019	Rp. 14,034 Triliun	Rp. 14,726 Triliun	Rp. 13,081 Triliun	Rp. 13,527 Triliun	93,21 %	91,86 %

Sumber: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

<sup>8</sup> Sudijono Sastroatmodjo, *Perilaku Politik*. (Semarang : IKIP Semarang Press, 1995).

Data APBD yang diperoleh dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara seperti yang terlihat dalam tabel 1.1 diolah dengan 3 formula sebagai berikut.

$$Ekonomis = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

$$Efisiensi = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

$$Efektivitas = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Hasil persentase pengukuran masing-masing dikategorikan berdasarkan 5 kriteria penilaian yang ditabelkan pada Tabel 1.2 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan.

**Tabel 1.2**

**Kriteria Kinerja Keuangan dalam Pengelolaan APBD**

<b>Rasio (%)</b>	<b>Kriteria Ekonomis</b>	<b>Kriteria Efisiensi</b>	<b>Kriteria Efektivitas</b>
>100	Sangat Ekonomis	Tidak Efisien	Sangat Efektif
>90-100	Ekonomis	Kurang Efisien	Efektif
>80-90	Cukup Ekonomis	Cukup Efisien	Cukup Efektif
>60-80	Kurang Ekonomis	Efisien	Kurang Efektif
≤ 60	Tidak Ekonomis	Sangat Efisien	Tidak Efektif

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1996

**Tabel 1.3**

**Tingkat Kinerja Keuangan Pemprov Sumut Tahun 2019**

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Tingkat Ekonomis</b>	<b>Tingkat Efisiensi</b>	<b>Tingkat Efektivitas</b>
2019	91,86% (Ekonomis)	103,41% (Tidak Efisien)	93,21% (Efektif)

Sumber: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, 2019 (data diolah)

Hasil pengukuran *value of money* APBD Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 sebagaimana terlihat pada Tabel 1.3. Tingkat

ekonomis APBD Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara sebesar 91,86%. Ini menunjukkan, kinerja Pemprov Sumut dilihat dari besarnya belanja yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan dikategorikan ekonomis. Artinya, Pemprov Sumut dinilai cukup cermat menggunakan dana masyarakat sesuai dengan kebutuhan.

Tingkat efisiensi APBD Pemprov Sumut tahun 2019 yang ditabelkan pada Tabel 1.3 berada pada tingkat efisiensi sebesar 103,41%. Ini menunjukkan kinerja Pemprov Sumut dilihat dari metode operasi dalam menggunakan sumber daya dan dana dikategorikan tidak efisien. Artinya, Pemprov Sumut dinilai kurang berdaya guna dalam menggunakan dana masyarakat agar dapat menghasilkan keluaran maksimal jika dilihat dari perbandingan antara hasil yang dicapai dan usaha yang dilakukan untuk mencapai hasil tersebut.

Tingkat efektivitas APBD Pemprov Sumut tahun 2019 yang ditabelkan pada Tabel 1.3 berada pada tingkat efektivitas sebesar 93,21%. Ini menunjukkan selama tahun berjalan, ukuran keberhasilan Pemprov Sumut dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan dikategorikan efektif walaupun tidak selalu memenuhi target yang telah ditetapkan.

Asas *Value of Money* ini belum diterapkan secara murni, karena dalam mekanisme pengelolaan APBD banyak faktor yang mempengaruhi yaitu antara lain kepentingan politik dan kesiapan dari SKPD. Ketika suatu RAPBD disusun dan dibahas dalam rapat komisi dan fraksi, sering terjadi perubahan karena adanya kebijakan daerah dan kesiapan anggaran. Selain itu terjadi perubahan-perubahan karena kepentingan politik dan tidak terakomodirnya usulan-usulan dari SKPD. Dalam penyusunan APBD kepentingan riil masyarakat tidak di kedepankan karena dalam penetapan pos anggaran seringkali bukan berbasis kebutuhan riil tetapi berbasis kepentingan politik dan kekuasaan. Terjadi pemborosan, masih banyak anggaran yang dapat ditekan. Keadaan tersebut merupakan kesulitan dalam penerapan asas *Value of Money* dalam proses pengelolaan APBD. Aspek lain yang menjadi penghambat kurang di tempatkannya masyarakat dalam berpartisipasi dalam penyusunan dan pengawasan proses penetapan APBD, sehingga kebutuhan masyarakat sering di kesampingkan.

Berdasarkan uraian permasalahan ini, maka untuk dapat meningkatkan peran DPRD dalam pengawasan realisasi APBD mendesak dilakukan analisis lebih lanjut terhadap faktor-faktor yang diduga dapat mempengaruhinya. Beberapa faktor yang diduga dapat mempengaruhi peran DPRD dalam pengawasan realisasi APBD diantaranya adalah latar belakang pribadi, dan latar belakang politik. Studi yang dilakukan oleh Fenny Silfia Putri, Hasan Basri, dan Muhammad Arfan pada tahun 2016 dengan judul penelitian yaitu Pengaruh Latar Belakang Pribadi, Latar Belakang Politik, dan Pemahaman Anggota DPRA tentang Pengelolaan Keuangan Aceh terhadap Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Legislatif di Pemerintah Aceh menunjukkan bahwa latar belakang pribadi, latar belakang politik dan pemahaman anggota DPRA tentang pengelolaan keuangan Aceh baik secara bersama-sama maupun parsial berpengaruh terhadap fungsi pengawasan pelaksanaan anggaran legislatif di Pemerintah Aceh.

Namun faktanya Jumlah anggota dewan di DPRD SU periode 2019-2024 yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibanding dengan perempuan. Anggota dewan perempuan hanya berjumlah 13 orang dari 100 anggota dewan yang terpilih. Padahal seharusnya keterwakilan anggota perempuan sekurang-kurangnya 30% dari keseluruhan anggota dewan yang terpilih sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Selain itu Tingkat pendidikan anggota dewan sangat penting diperhatikan karena tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi pola pikir, sikap dan tingkah laku mereka dalam melakukan suatu aktivitas. Berdasarkan observasi yang telah Penulis lakukan sebanyak 20 orang anggota dewan hanya merupakan lulusan SMA. Meskipun mayoritas lebih banyak lulusan sarjana, akan lebih baik jika sebagai anggota dewan memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Karena dari data yang Penulis temukan hanya 21 anggota dewan yang merupakan petahana sisanya sebanyak 79 anggota dewan DPRD SU merupakan wajah baru artinya, pengalaman mereka soal DPRD SU masih sangat sedikit dan tentunya pendidikan dan pengalaman mereka dalam kegiatan pemerintahan yang

terbatas akan membuat kemampuan untuk menjalankan peran DPRD sebagai pengawas APBD tidak optimal.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi peran DPRD dalam pengawasan realisasi APBD adalah komitmen organisasi dan pengetahuan anggaran anggota dewan. Studi yang dilakukan oleh H. Andi Basru Wawo dan Fitriah Sarufa pada tahun 2016 dengan judul penelitian yaitu Pengaruh Komitmen Organisasi dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Pada Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara) menunjukkan bahwa komitmen organisasi dan pengetahuan dewan tentang anggaran baik secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

Suatu komitmen organisasi menunjukkan daya dari seseorang dalam mengidentifikasi keterlibatan dalam organisasi. Oleh karena itu, komitmen organisasi menimbulkan rasa memiliki (*sense of belonging*) bagi pekerja terhadap organisasi tempatnya bekerja. Dengan kata lain, para anggota dewan diharapkan menjadi lebih kreatif mencari cara baru untuk memperbaiki efektivitas dan efisiensi kerjanya.<sup>9</sup> Namun, pada kenyataannya tuntutan tersebut juga harus dihadapkan pada realita bahwa sebagian besar anggota DPRD terkesan pragmatis dan cenderung lebih mengikuti kepentingan partai atau individu daripada berorientasi kepada rakyat. Hal ini dapat dilihat dari kasus suap 14 anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan / atau 2014-2019 yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Berdasarkan observasi yang telah Penulis lakukan pengetahuan anggaran anggota dewan DPRD SU masih sangat terbatas, dari 30 kuesioner awal yang Penulis sebar sebanyak 15% memilih menjawab netral (tidak tahu) terkait pemahaman mereka mengenai pengetahuan anggaran APBD SU. Hal ini kemungkinan karena lebih dominan wajah baru yang ada di DPRD SU.

---

<sup>9</sup> Mia Lasmi Wardiah, *Teori Perilaku dan Budaya Organisasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), h. 5.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Latar Belakang Pribadi dan Politik, Komitmen Organisasi dan Pengetahuan Anggaran Anggota Dewan Terhadap Pengawasan Realisasi APBD SU Tahun 2019”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Adapun masalah-masalah yang ditemui peneliti adalah sebagai berikut :

1. Latar belakang pribadi anggota dewan yang tidak kompeten di bidangnya sehingga menyebabkan kinerja DPRD sebagai wakil rakyat tidak maksimal dalam melaksanakan perannya mengawas realisasi APBD.
2. Adanya unsur kepentingan-kepentingan politik akibat latar belakang politik anggota DPRD menyebabkan peran DPRD dalam pengawasan realisasi APBD tidak maksimal.
3. Kurangnya komitmen organisasi oleh anggota DPRD dan pemerintah daerah untuk mewujudkan *good governance* mengakibatkan pengelolaan APBD tidak mencerminkan kepentingan rakyat.
4. Kurangnya pengetahuan dewan mengenai anggaran (APBD) menyebabkan peran DPRD dalam pengawasan realisasi APBD tidak maksimal.
5. Lemahnya peran DPRD dalam pengawasan realisasi APBD akan menyebabkan penyelewengan pengelolaan APBD oleh pemerintah daerah.

## **C. Batasan Masalah**

Untuk memfokuskan penelitian dalam menganalisis maka peneliti melakukan pembatasan masalah di mana studi hanya dilakukan di kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara dan responden yang dipilih peneliti hanya diambil dari badan anggaran dan tiga komisi dari lima komisi yang terdapat di DPRD Provinsi Sumatera Utara. Ketiga komisi itu antara lain: komisi B bidang perekonomian, komisi C bidang keuangan dan komisi D bidang pembangunan. Badan Anggaran dan ketiga komisi DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2019-2024 itu menjadi fokus penelitian oleh peneliti karena dianggap paling tepat untuk menjadi responden penelitian dalam penelitian yang sedang dikaji peneliti.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang akan diteliti oleh peneliti adalah :

1. Apakah latar belakang pribadi berpengaruh dan signifikan terhadap pengawasan realisasi APBD?
2. Apakah latar belakang politik berpengaruh dan signifikan terhadap pengawasan realisasi APBD?
3. Apakah komitmen organisasi berpengaruh dan signifikan terhadap pengawasan realisasi APBD?
4. Apakah pengetahuan anggaran berpengaruh dan signifikan terhadap pengawasan realisasi APBD?
5. Apakah latar belakang pribadi, latar belakang politik, komitmen organisasi dan pengetahuan anggaran secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap pengawasan realisasi APBD?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh dan signifikansi latar belakang pribadi terhadap pengawasan realisasi APBD.
2. Untuk mengetahui pengaruh dan signifikansi latar belakang politik terhadap pengawasan realisasi APBD.
3. Untuk mengetahui pengaruh dan signifikansi komitmen organisasi terhadap pengawasan realisasi APBD.
4. Untuk mengetahui pengaruh dan signifikansi pengetahuan anggaran terhadap pengawasan realisasi APBD.
5. Untuk mengetahui pengaruh dan signifikansi latar belakang pribadi, latar belakang politik, komitmen organisasi dan pengetahuan anggaran secara simultan terhadap pengawasan realisasi APBD.



## **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Bagi DPRD Provinsi Sumatera Utara, sebagai masukan untuk melakukan terobosan yang lebih baik lagi kedepannya untuk meningkatkan kinerjanya sebagai anggota dewan khususnya dalam pengawasan pengelolaan APBD Provinsi Sumatera Utara. Lebih amanah dan meningkatkan komitmen organisasi dalam mengemban tugas yang diamanahkan oleh rakyat sehingga dapat mewujudkan *good governance*.
2. Bagi Partai Politik, sebagai masukan dalam merekrut anggota partai yang akan dicalonkan sebagai anggota DPRD untuk lebih ketat dalam menyeleksi anggotanya dengan memperhatikan latar belakang pribadi agar anggota yang direkrut sebagai calon DPRD benar-benar memiliki kualitas yang baik.
3. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, sebagai masukan untuk melaksanakan pengelolaan APBD dengan transparan, efisien, dan efektif agar dapat mewujudkan pemerintahan yang baik demi terciptanya masyarakat yang makmur dan sejahtera.
4. Bagi Fakultas, sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya dalam melakukan riset penelitian berkaitan dengan peran DPRD dalam pengawasan realisasi APBD.
5. Bagi Penulis, sebagai sarana belajar dan masukan bagi penulis dalam mengaplikasikan berbagai teori yang telah dipelajari terhadap kasus nyata baik di pemerintahan, perusahaan, maupun di instansi terkait.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS**

#### **A. Kajian Teoritis**

##### **1. Konsep Dasar Pengawasan**

###### **a. Pengertian Pengawasan**

Istilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah “awas”, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *controlling* yang diterjemahkan dengan istilah pengawasan dan pengendalian, sehingga istilah *controlling* lebih luas artinya dari pada pengawasan. Akan tetapi dikalangan ahli atau sarjana telah disamakan pengertian “*controlling*” ini dengan pengawasan. Jadi pengawasan adalah termasuk pengendalian. Pengendalian berasal dari kata “kendali”, sehingga pengendalian mengandung arti mengarahkan, memperbaiki, kegiatan, yang salah arah dan meluruskannya menuju arah yang benar.

Menurut Robert J. Mockler Pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan/organisasi dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan/organisasi.<sup>10</sup>

Pengawasan (*controlling*) adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat positif maupun negatif. Pengawasan positif mencoba untuk mengetahui apakah tujuan organisasi dicapai dengan efisien dan

---

<sup>10</sup> Robert J. Mockler, *The Management Control Process*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1972, h.2 dalam T. Hani Handoko, *Manajemen*. Ed. 2 (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2015), h. 360-361.

efektif. Pengawasan negatif mencoba untuk menjamin bahwa kegiatan yang tidak diinginkan atau dibutuhkan tidak terjadi atau terjadi kembali.<sup>11</sup>

### **b. Tipe-Tipe Pengawasan**

Ada 3 tipe dasar pengawasan, yaitu:

#### *1) Pengawasan Pendahuluan (Feedforward Control)*

Pengawasan pendahuluan, atau sering disebut *steering controls*, dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan. Jadi, pendekatan pengawasan ini lebih aktif dan agresif, dengan mendeteksi masalah-masalah dan mengambil tindakan yang diperlukan sebelum suatu masalah terjadi.

#### *2) Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan (Concurrent Control)*

Pengawasan ini, sering disebut pengawasan “Ya-Tidak”, *screening control* atau “Berhenti-Terus”, dilakukan selama kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses di mana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dahulu, atau syarat tertentu harus dipenuhi dahulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan, atau menjadi semacam peralatan “*double-check*” yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan.

#### *3) Pengawasan Umpan Balik (Feedback Control)*

Pengawasan umpan balik, juga dikenal sebagai *past-action control*, mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau standar telah ditentukan, dan penemuan-penemuan diterapkan untuk kegiatan-kegiatan serupa di masa yang akan datang. Pengawasan ini bersifat historis, pengukuran dilakukan setelah kegiatan terjadi.

### **c. Macam-Macam Pengawasan**

Dalam hal pengawasan dapat diklasifikasikan macam-macam pengawasan berdasarkan berbagai hal, yaitu:

#### *1). Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung*

---

<sup>11</sup> T. Hani Handoko, *Manajemen*. Ed.2. (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2015), h.25.

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara “*on the spot*” di tempat pekerjaan dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana. Sedangkan pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana, baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan tanpa pengawasan.

## 2). Pengawasan Preventif dan Represif

Walaupun prinsip pengawasan adalah preventif, namun bila dihubungkan dengan waktu pelaksanaan pekerjaan, dapat dibedakan antara Pengawasan Preventif dan Pengawasan Represif. Pengawasan Preventif berkaitan dengan pengesahan Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah tertentu. Karena tidak semua Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah memerlukan pengesahan. Selama pengesahan belum diperoleh, Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah yang bersangkutan belum berlaku dan pengawasan ini dilakukan melalui preaudit sebelum pekerjaan dimulai. Misal dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain.

Sedang Pengawasan Represif dapat berbentuk penangguhan berlaku atau pembatalan. Suatu Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah yang sudah berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat dapat ditangguhkan atau dibatalkan karena bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya dan pengawasan ini dilakukan melalui post audit dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat, meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya.

## 3). Pengawasan Intern dan Pengawasan Ekstern

Pengawasan Intern, adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Pada dasarnya pengawasan harus dilakukan oleh pucuk pimpinan sendiri. Akan tetapi di dalam praktek hal ini tidak selalu mungkin. Oleh karena itu setiap pimpinan dalam organisasi pada dasarnya berkewajiban

membantu pucuk pimpinan untuk mengadakan pengawasan secara fungsional sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Sedangkan Pengawasan Ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi sendiri. Seperti pengawasan dibidang keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sepanjang meliputi seluruh Aparatur Negara dan Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara terhadap Departemen dan Instansi pamarintah lain.

Macam-macam pengawasan ini didasarkan pada pengklasifikasian pengawasan. Disamping itu pula ada beberapa macam pengawasan dilihat dari bidang pengawasannya, yakni:

- 1) Pengawasan anggaran pendapatan (*budgetary control*)
- 2) Pengawasan biaya (*cost control*)
- 3) Pengawasan barang inventaris (*inventory control*)
- 4) Pengawasan produksi (*production control*)
- 5) Pengawasan jumlah hasil kerja (*quality control*)

#### **d. Maksud dan Tujuan Pengawasan**

Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan dan untuk mencapai tujuan dari organisasi yang telah direncanakan maka perlu ada pengawasan, karena dengan pengawasan tersebut, maka tujuan yang akan dicapai dapat dilihat dengan berpedoman rencana yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh organisasi.

Dengan demikian pengawasan itu sangat penting dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas organisasi, sehingga pengawasan diadakan dengan maksud untuk:

- 1) Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak
- 2) Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru
- 3) Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak

Tujuan pengawasan adalah membandingkan antara pelaksanaan dan rencana serta instruksi yang telah dibuat, untuk mengetahui ada tidaknya kesulitan,

kelemahan atau kegagalan serta efisiensi dan efektivitas kerja dan untuk mencari jalan keluar apabila ada kesulitan, kelemahan dan kegagalan atau dengan kata lain disebut tindakan korektif.

#### **e. Unsur-Unsur Pengawasan**

Fungsi pengawasan pada dasarnya mencakup 4 unsur, yaitu:

- 1) Penetapan standar pelaksanaan
- 2) Penentuan ukuran-ukuran pelaksanaan
- 3) Pengukuran pelaksanaan nyata dan membandingkannya dengan standar yang telah ditetapkan, dan
- 4) Pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan bila pelaksanaan menyimpang dari standar.<sup>12</sup>

#### **f. Tahap-Tahap dalam Proses Pengawasan**

Proses-proses pengawasan biasanya terdiri paling sedikit lima tahap, adapun tahap-tahapnya adalah:<sup>13</sup>

- 1) Penetapan standar pelaksanaan (perencanaan)
- 2) Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan
- 3) Pengukuran pelaksanaan kegiatan
- 4) Pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan
- 5) Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan.

#### **g. Karakteristik Pengawasan yang Efektif**

Untuk menjadi efektif, sistem pengawasan harus memenuhi kriteria tertentu. Kriteria-kriteria utama adalah bahwa sistem seharusnya 1) mengawasi kegiatan-kegiatan yang benar, 2) tepat waktu, 3) dengan biaya yang efektif, 4) tepat-akurat, dan 5) dapat diterima oleh yang bersangkutan. Semakin dipenuhinya kriteria-kriteria tersebut semakin efektif sistem pengawasan.

---

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 26

<sup>13</sup> *Ibid*, h.363-365.

## 2. Pengawasan Keuangan Sektor Publik Dan Sektor Swasta

### a. Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Sektor Swasta

Akuntansi sektor publik berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan transaksi yang terjadi di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Terdapat perbedaan dan persamaan antara akuntansi sektor publik dan sektor swasta. Perbedaan antara sektor publik dengan sektor swasta beserta akuntansinya tersaji pada tabel berikut.<sup>14</sup>

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan Akuntansi Sektor Publik dan Sektor Swasta**

No.	Uraian	Sektor Publik	Sektor Swasta
1)	Tujuan	Tidak mencari keuntungan	Mencari keuntungan
2)	Sumber Pembiayaan	Pajak, retribusi, subsidi dan utang	Modal sendiri, laba ditahan, utang dan penerbitan saham
3)	Pertanggungjawaban	Kepada masyarakat dan parlemen (DPR RI/ DPRD)	Kepada pemegang saham dan kreditur
4)	Struktur Organisasi	Birokratis, hierarkis dan kaku	Fleksibel : fungsional, piramid dan datar
5)	Karakteristik Anggaran	Terbuka untuk publik	Tertutup untuk publik
6)	Sistem Akuntansi	Kas/modifikasi kas/akrual	Akrual
7)	Laporan Keuangan	a) Laporan Realisasi Anggaran, b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, c) Neraca, d) Laporan Operasional, e) Laporan Perubahan Ekuitas f) Laporan Arus Kas, dan	a) Neraca, b) Laporan Laba Rugi, c) Laporan Perubahan Ekuitas, d) Laporan Arus Kas, dan e) Catatan atas Laporan Keuangan

<sup>14</sup> Rahmadi Murwanto.,dkk., *Audit Sektor Publik : Suatu Pengantar Bagi Pembangunan Akuntabilitas Intansi Pemerintah* (Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintah Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan RI), h.11-12.

		g) Catatan atas Laporan Keuangan.	
8)	Fokus Laporan Keuangan	Fokus pada masalah finansial dan politik.	Fokus pada aspek finansial.
8)	Standar Akuntansi	Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
9)	Pihak Pemeriksa Laporan Keuangan	Diperiksa oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK)	Diperiksa oleh pihak auditor independen, Kantor Akuntan Publik (KAP)
10)	Standar Audit	Standar Pemeriksaan Akuntan Sektor Publik	Standar Pemeriksaan Akuntan Publik

Persamaan akuntansi sektor publik dan sektor swasta sebagai berikut:

- 1) Merupakan bagian integral dari sistem ekonomi suatu negara
- 2) Mempunyai masalah kelangkaan sumber daya
- 3) Terkait dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang disyaratkan (standar akuntansi dan audit)
- 4) Menghasilkan produk yang sama (informasi keuangan)
- 5) Membutuhkan informasi yang relevan dan andal untuk melaksanakan fungsi manajemen.

#### **b. Pengawasan Sektor Publik dan Pengawasan Sektor Swasta**

Perbedaan yang paling mendasar antara pengawasan sektor publik dan swasta adalah pertimbangan kebijakan politik. Dalam akhir proses audit, khususnya dalam audit keuangan, auditor akan menggunakan objektivitas terbaiknya dan rekomendasi secara menyeluruh. Hal yang penting untuk membedakan pengawasan sektor publik dan sektor swasta adalah perbedaan kepentingan antara kebijakan politik dan rasional ekonomi, kebijakan politik biasanya diprioritaskan dalam sektor publik setidaknya dalam jangka pendek.

Pengawasan pada sektor swasta lebih ditentukan oleh interaksi antara pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan yang banyak ditentukan oleh kontrak-kontrak yang terjadi di antara mereka. Sebaliknya, pada sektor publik interaksi antara pemilik, dalam hal ini masyarakat diwakili oleh legislatif (DPR/DPRD), dengan manajemen sektor publik (pemerintah) diatur dengan jelas pada berbagai peraturan perundang-undangan. Pengawasan sektor publik juga



sangat dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan. Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut terutama mengatur hal-hal yang harus diaudit dan yang harus dilaporkan dalam laporan audit. Oleh karena itu, pengawasan sektor publik sangat menekankan aspek ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu contoh pengawasan sektor publik adalah pengawasan keuangan daerah atau pengawasan realisasi APBD. Pengawasan keuangan daerah, dalam hal ini adalah pengawasan terhadap anggaran keuangan daerah/APBD. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerja sama internasional di daerah. Berdasarkan dari Undang-Undang tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan keuangan daerah dilakukan oleh DPRD yang berfokus kepada pengawasan terhadap pelaksanaan APBD.

Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD wujudnya adalah dengan melihat, mendengar, dan mencermati pelaksanaan APBD yang dilakukan oleh SKPD, baik secara langsung maupun berdasarkan informasi yang diberikan oleh konstituen, tanpa masuk ke ranah pengawasan yang bersifat teknis. Apabila ada dugaan penyimpangan, dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Memberitahukan kepada Kepala Daerah untuk ditindaklanjuti oleh Satuan Pengawas Internal.
- 2) Membentuk pansus untuk mencari informasi yang lebih akurat.
- 3) Menyampaikan adanya dugaan penyimpangan kepada instansi penyidik (Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK).

Untuk lebih jelasnya mengenai peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah / APBD berikut akan dijelaskan mengenai tugas dan fungsi DPRD serta hak dan kewajiban DPRD:

## **1) Tugas dan Fungsi DPRD**

### **a) Tugas DPRD**

Peraturan DPRD SU No.4/K/2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara menyebutkan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- 1) Membentuk Perda bersama Gubernur;
- 2) Membahas dan memberikan persetujuan atau menolak Ranperda mengenai APBD yang diajukan oleh Gubernur;
- 3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan, Perda, APBD, Peraturan Gubernur dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- 4) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan/ atau Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- 5) Meminta Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan lain-lain.

### **b) Fungsi DPRD**

Peraturan DPRD SU No.4/K/2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa DPRD mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Pembentukan Perda Provinsi (legislasi);

Fungsi pembentukan Perda Provinsi dilaksanakan dengan cara:

- a) Membahas bersama gubernur dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda Provinsi;
- b) Mengajukan usul rancangan Perda Provinsi; dan
- c) Menyusun program pembentukan Perda bersama Gubernur.

- 2) Anggaran;

Fungsi anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda Provinsi tentang APBD

provinsi yang diajukan oleh Gubernur. Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara :

- a) Membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh gubernur berdasarkan RKPD;
- b) Membahas rancangan Perda Provinsi tentang APBD provinsi;
- c) Membahas rancangan Perda Provinsi tentang perubahan APBD provinsi; dan
- d) Membahas rancangan Perda Provinsi tentang Pertanggungjawaban APBD provinsi.

### 3) Pengawasan.

Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:

- a) Pelaksanaan Perda provinsi dan peraturan gubernur;
- b) Pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi; dan
- c) Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, DPRD provinsi berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. DPRD melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan. DPRD dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

## **2) Hak dan Kewajiban DPRD**

### **a) Hak DPRD**

Peraturan DPRD SU No.4/K/2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa DPRD mempunyai hak sebagai berikut:

- 1) Interpelasi;
- 2) Angket;

- 3) Menyatakan pendapat.
- 4) Mengajukan rancangan Peraturan Daerah;
- 5) Mengajukan pertanyaan;
- 6) Menyampaikan usul dan pendapat;
- 7) Memilih dan dipilih;
- 8) Membela diri;
- 9) Imunitas;
- 10) Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas ;
- 11) Protokol
- 12) Keuangan dan administratif.

#### **b) Kewajiban DPRD**

Peraturan DPRD SU No.4/K/2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa DPRD mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- 2) Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati Peraturan Perundang-undangan;
- 3) Mempertahankan dan memelihara kerukunan Nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 4) Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- 5) Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat; dan lain-lain.

#### **c. Konsep Pengawasan dalam Islam**

Pengawasan dalam Islam berbeda dengan pengawasan dalam dunia barat. Konsep pengawasan dalam Islam mencakup bidang spritual yang tidak terlepas dari konsep keimanan sebagai seorang muslim kepada Allah SWT. Allah SWT mengawasi manusia selama 24 jam dalam sehari dan tidak ada satu pun yang luput dari pengawasannya, ada 3 cara yang dilakukan Allah SWT dalam mengawasi manusia:

- 1) Allah SWT melakukan pengawasan secara langsung
- 2) Allah SWT melakukan pengawasan melalui malaikat
- 3) Allah SWT melakukan pengawasan melalui diri kita sendiri

Dalam Al Qur'an ayat yang menjelaskan secara langsung mengenai pengawasan dalam setiap hal yang kita lakukan itu pasti ada. Salah satunya terdapat dalam QS al- Mujadilah (58):7

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ ۚ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ۚ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

“Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dialah keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”<sup>15</sup>

Ulasan / Penjelasan Ayat:

Tafsir Al-Wajiz / Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili Tidakkah engkau mengetahui wahai hamba Allah, bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan bumi. Ini adalah penegasan dari Allah dengan cakupan ilmu-Nya atas segala sesuatunya. Kemudian Allah mengabarkan bahwa tidaklah saling berbisik di antara tiga orang kecuali Allah bersama mereka, Allah mengetahui apa yang mereka katakan dan sembunyikan, tidaklah lima orang berbisik kecuali Allah yang ke-enamnya. Ia mengetahui apa yang mereka bisikkan. Tidaklah sedikit maupun banyak dari jumlah yang telah disebutkan ini kecuali Allah Maha

---

<sup>15</sup> Q.S. al- Mujadilah (58):7

Mengetahuinya di mana pun mereka berada; Meskipun mereka menyembunyikannya dan takut menampakkan, karena mereka semua dibawah pengawasan-Nya dan pendengaran-Nya. Kemudian Allah mengabarkan kondisi mereka pada hari kiamat atas apa yang mereka amalkan dari kebaikan maupun keburukan. Kejelekan maupun keburukan atau kemuliaan jika amalannya baik. Dan manusia tidak akan mendapati tempat untuk lari kecuali dia harus menghadap kepada Allah. Kemudian Allah akan balas kebaikan kepada mereka jika mereka beramal kebaikan, dan jika beramal keburukan maka dibalas dengan keburukan. Sungguh Allah atas segala sesuatunya Maha Mengetahui, tidak tersembunyi bagi-Nya segala makhluk pun.<sup>16</sup>

### **3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengawasan**

Menurut Mulyadi, beberapa faktor yang mempengaruhi pengawasan adalah:<sup>17</sup>

- a. Perubahan yang selalu terjadi baik dari luar maupun dari dalam organisasi
- b. Kompleksitas organisasi memerlukan pengawasan formal karena adanya desentralisasi kekuasaan
- c. Kesalahan atas penyimpangan yang dilakukan anggota organisasi sehingga memerlukan pengawasan.

Adapun menurut T. Hani Handoko faktor-faktor yang membuat pengawasan semakin diperlukan oleh setiap organisasi yaitu:<sup>18</sup>

- a. Perubahan lingkungan organisasi
- b. Peningkatan kompleksitas organisasi
- c. Kesalahan-kesalahan
- d. Kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang

---

<sup>16</sup> Tafsir Al-Wajiz / Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili

<sup>17</sup> Mulyadi, *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen: Sistem Pelipatganda Kinerja Perusahaan. Ed.3* (Yogyakarta: Salemba Empat, 2007), h.770

<sup>18</sup> T. Hani Handoko, *Manajemen. Ed.2.* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2015), h.366-367.

Sebagaimana dikemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan oleh para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang dapat mempengaruhi pengawasan berasal dari internal dan eksternal individu/organisasi. Pengawasan di sektor publik pun memiliki faktor-faktor yang mempengaruhinya, terutama pengawasan oleh DPRD. Pengawasan DPRD terhadap berbagai kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu didukung dengan ketersediaan data sebagai informasi bagi DPRD. Data dan informasi akan menjadi bahan rujukan dan dasar argumentasi bagi DPRD untuk melihat apakah penyelenggaraan urusan desentralisasi dan otonomi daerah, urusan tugas pembantuan, serta tugas-tugas umum pemerintahan telah berjalan secara efektif dan efisien, serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh seorang anggota DPRD maupun pengawasan secara sistem di DPRD menurut Dadang Suwanda dan Akmal Malik Piliang, perlu mempertimbangkan beberapa faktor sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Kapasitas anggota DPRD, berupa pengetahuan dan keahlian dalam melakukan analisa dan pemantauan terhadap objek pengawasan DPRD.
- b. Tidak adanya konflik kepentingan, baik secara pribadi, keluarga ataupun kelompok terhadap pihak-pihak atau kegiatan yang menjadi objek pengawasan oleh DPRD.
- c. Keterbukaan terhadap masyarakat, mulai dari rencana awal pengawasan, pelaksanaan pengawasan hingga pertanggungjawaban hasil pengawasan.
- d. Membangun partisipasi, terutama keterlibatan masyarakat sipil dan konstituen dalam melakukan pengawasan.
- e. Mampu merumuskan hasil pengawasan yang akuntabel, serta bisa diakses secara terbuka oleh masyarakat.

---

<sup>19</sup> Dadang Suwanda dan Akmal Malik Piliang. *Penguatan Pengawasan DPRD: Untuk Pemerintahan Daerah yang Efektif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016),h.106.

Efektivitasnya suatu pengawasan realisasi APBD oleh DPRD dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukungnya, adapun faktor-faktor yang diduga mempengaruhi pengawasan oleh DPRD yaitu:

#### **a. Latar Belakang Pribadi**

Latar belakang pribadi adalah keterangan tentang seseorang, sebuah biografi yang bersifat kompleks dari pada sekedar daftar lahir dan data-data pekerjaan seseorang. Selain itu latar belakang pribadi adalah keterangan tentang kehidupan seseorang yang terlibat dalam mengalami kejadian tersebut.<sup>20</sup> Syahrudin dan Taifur menyatakan bahwa kemampuan DPRD dalam menjalankan fungsinya tidak saja ditentukan oleh kualitas anggota DPRD yang ada, tetapi dipengaruhi pula oleh perilaku (Moral) anggota DPRD.<sup>21</sup> Sedangkan Yudhoyono Menyatakan bahwa DPRD akan dapat memainkan perannya dengan baik apabila pemimpin dan anggota-anggotanya berada dalam kualifikasi yang ideal, dalam arti memahami benar hak, tugas, dan wewenangnya dan mampu mengaplikasikannya secara baik, dan didukung dengan tingkat pendidikan dan pengalaman dibidang politik dan pemerintahan yang memadai.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Rosliana, "Pengaruh Personal Background, Political Background, dan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah.", dalam Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol.1, No.2, Juli-Desember 2012.

<sup>21</sup> Syahrudin dan Taifur, Werry Dart. *Peran DPRD Untuk Mencapai Tujuan Desentralisasi dan Perspektif Daerah Tentang Pelaksanaan Desentralisasi (The Role Of The Regional Assembly In Achieving The Objective Of Decentralization and Regional Perspectives In The Implementation Of Decentralization)*. Faculty of Economics Pusat Studi Kependudukan, Universitas Andalas, Regional University Research , On Decentralization in Indonesia, Project 497-0357/204-000, ECG, USAID/Indonesia, Center for Institutional Reform and the Informal Sector (IRIS) Univer-sity of Maryland at College Park. 2002.

<sup>22</sup> Yudoyono, Bambang. *Optimalisasi Peran DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. 2000.



Menurut Sastroatmodjo ada dua tingkat orientasi politik yang mempengaruhi perilaku politik, yaitu sistem dan individu. Kelemahan yang terjadi atas peranan legislatif dalam pengawasan keuangan daerah dapat mungkin terjadi karena kelemahan sistem politiknya ataupun individu sebagai pelaku politik.<sup>23</sup>

Dalam pendekatan *behaviorisme*, individu adalah yang dipandang secara aktual melakukan kegiatan politik, sedangkan perilaku lembaga politik pada dasarnya merupakan perilaku individu dengan pola tertentu. Oleh karena itu untuk menjelaskan perilaku suatu lembaga yang perlu ditelaah bukan lembaganya, melainkan latar belakang individu yang secara aktual mengendalikan lembaga.

Lebih jauh Sastroatmodjo menyatakan bahwa karakteristik sosial seperti status sosial ekonomi, kelompok ras, etnis, usia, jenis kelamin dan agama termasuk faktor-faktor yang akan mempengaruhi perilaku politik seseorang. Status sosial baik disebabkan oleh tingkat pendidikan maupun pekerjaan, memungkinkan perilaku politik yang lebih berkualitas dari pada seseorang yang berada dalam status sosial di bawahnya. Dengan status sosial yang tinggi diperkirakan seseorang akan memiliki tingkat pengetahuan politik, minat dan perhatian pada politik serta sikap dan kepercayaan yang tinggi pada pemerintah.

Selanjutnya, Sastroatmodjo juga menyatakan bahwa perbedaan jenis kelamin memiliki perbedaan dalam karakteristik dan tingkah laku politik. Usia mempengaruhi tingkat kematangan berfikir dan dalam pengambilan keputusan. Kelompok ras atau etnis memiliki watak kolektif yang berbeda, sehingga memberikan warna pada perilaku politiknya.

Latar belakang pribadi merupakan latar belakang diri yang melekat pada setiap individu. Dalam penelitian ini latar belakang pribadi yang dimaksud adalah latar belakang diri dari anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2019-2024 yang meliputi usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, relevansi bidang pendidikan, dan relevansi latar belakang pekerjaan.

---

<sup>23</sup> Sudijono Sastroatmodjo, *Perilaku Politik*. (Semarang : IKIP Semarang Press, 1995).

### **b. Latar Belakang Politik**

Latar belakang politik, yang diartikan sebagai latar belakang dari nilai, pengalaman dan pengetahuan seseorang di ranah politik. Kerja-kerja politik anggota legislatif dalam mengorganisir, mendidik, menyampaikan suara rakyat, merebut kekuasaan, hingga meraih kontrol atas negara untuk kepentingan rakyat diperoleh melalui aktivitasnya di organisasi dan institusi politik, terutama melalui partai politik dan legislatif. Semua kerja-kerja itu telah membentuk nilai, memberikan pengalaman dan pengetahuan tersendiri bagi anggota legislatif di ranah politik.<sup>24</sup>

Latar belakang politik merupakan latar belakang dari pengalaman seseorang dalam berkecimpung di dunia politik. Berbicara mengenai politik, tentu saja tidak lepas dari partai politik. Partai politik dan parlemen (legislatif) merupakan dua faktor utama yang memperoleh mandat dari masyarakat sipil, berperan mengorganisir kekuasaan dan meraih kontrol atas negara untuk kepentingan masyarakat. Ketika Pemilu dan Pilkada, parpol berperan sebagai institusi yang menyeleksi, menganalisa dan menentukan pencalonan para pasangan kepala daerah, capres dan wapres, serta para calon anggota legislatif di pusat dan daerah, sebelum menghadapi pemilu dan pilkada untuk dipilih oleh rakyat.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Fenny Silfia Putri, Hasan Basri, dan Muhammad Arfan, “*Pengaruh Personal Background, Political Background, dan Pemahaman Anggota DPRA tentang Pengelolaan Keuangan Aceh terhadap Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Legislatif di Pemerintah Aceh.*”, dalam Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Vol.5, No.2, Mei 2016, h.24-35.

<sup>25</sup> Ni Made Ana Rosita, Nyoman Trisna Herawati, dan Ni Kadek Sinarwati, “*Pengaruh Latar Belakang Anggota Dewan dan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) dengan Variabel Moderating Transparansi Kebijakan Publik (Studi Kasus Pada Kantor DPRD Kabupaten Tabanan)*” dalam e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, Vol.2, No.1, 2014.

Sementara itu, Yudoyono menyatakan bahwa DPRD akan dapat memainkan peranannya dengan baik apabila pimpinan dan anggota-anggotanya berada dalam kualifikasi ideal, dalam arti memahami benar hak, tugas, dan wewenangnya dan mampu mengaplikasikannya secara baik, dan didukung dengan tingkat pendidikan dan pengalaman di bidang politik dan pemerintahan yang memadai, karena bagaimanapun pengalaman akan sangat menentukan tingkat kematangan anggota DPRD dalam berpolitik.<sup>26</sup>

Latar belakang politik merupakan latar belakang dari pengalaman individu dalam berkecimpung di dunia politik. Latar belakang politik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah latar belakang politik dari anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2019-2024 yang meliputi pengalaman politik, pengalaman di DPRD, asal fraksi, asal komisi, dan jabatan di DPRD.

### **c. Komitmen Organisasi**

Komitmen organisasi merupakan tingkat sejauh mana seorang memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuannya, serta berniat mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi tersebut. Komitmen organisasi sering diartikan secara individu dan berhubungan dengan keterlibatan orang tersebut pada organisasi yang bersangkutan.<sup>27</sup>

Dalam perilaku organisasi, terdapat beragam definisi tentang komitmen. Sebagai suatu sikap, Luthans yang menyatakan bahwa komitmen organisasi merupakan: (1) keinginan yang kuat untuk menjadi anggota dalam suatu kelompok, (2) kemauan usaha yang tinggi untuk organisasi, (3) suatu keyakinan tertentu dan penerimaan terhadap nilai-nilai dan tujuan-tujuan organisasi. Sementara Jewell dan Siegall menyatakan bahwa komitmen organisasi dapat

---

<sup>26</sup> Bambang Yudoyono, *Optimalisasi Peran DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. 2000.

<sup>27</sup> Arfan Ikhsan Lubis, *Akuntansi Keperilakuan: Akuntansi Multiparadigma*, Ed. 3. (Jakarta: Salemba Empat, 2019), h.83.

didefinisikan sebagai derajat hubungan individu memandang dirinya sendiri dengan pekerjaannya dalam organisasi tertentu.<sup>28</sup>

Komitmen organisasi yang ada pada anggota dewan secara psikologis dapat dicerminkan pada kinerja yang mereka lakukan sebagai wakil rakyat, karena merupakan suatu proses yang harus dijalankan untuk mengekspresikan diri terhadap organisasi dan prestasi kinerja yang tinggi untuk dicapai. Komitmen organisasi anggota dewan perlu ditumbuhkan mengingat sebagian besar anggota dewan merupakan bagian dari partai politik.

#### **d. Pengetahuan Anggaran Anggota Dewan**

Pengetahuan dewan tentang anggaran merupakan persepsi anggota dewan tentang anggaran (RAPBD/ APBD) dan deteksi terhadap pemborosan atau kegagalan, dan kebocoran anggaran. Sedangkan Nur dan Bambang dalam penelitian Winarna dan Murni<sup>29</sup> menyebutkan bahwa pengetahuan pada dasarnya merupakan hasil dari proses melihat, mendengar, merasa dan berpikir yang menjadi dasar manusia dalam bersikap dan bertindak. Dengan penjelasan tersebut, maka dapat diketahui bahwa pengetahuan tentang sesuatu menjadi dasar bagi siapapun dalam melakukan tindakan atau bersikap terhadap sesuatu tersebut.

Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran dapat diartikan sebagai pengetahuan dewan terhadap mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban serta pengetahuan dewan

---

<sup>28</sup> Edy Sutrisno, *Budaya Organisasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.292.

<sup>29</sup> Jaka Winarna. dan Sri Murni. *Pengaruh Personal Background, Political Background dan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus di Karesidenan Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006)*. dalam Jurnal Bisnis dan Akuntansi, Vol.9, No.2, Agustus 2007, h.136-152.

terntang peraturan perundangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah/ APBD.<sup>30</sup>

Fungsi-fungsi yang dimiliki oleh DPRD seperti fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan sangat erat hubungannya dengan pengetahuan dewan tentang anggaran/ APBD, dimana APBD sebagai objek untuk melaksanakan fungsi DPRD tersebut. Fungsi penganggaran memberikan kesempatan kepada anggota untuk ikut serta dalam penyusunan anggaran daerah yang disusun bersama pemerintah daerah/ eksekutif. Sedangkan fungsi pengawasan, DPRD memberikan kewenangan dalam pengawasan kinerja dan pelaksanaan APBD oleh pemerintah daerah/ eksekutif. Dalam hal ini, anggota DPRD dituntut supaya anggota DPRD harus memiliki kapabilitas mengenai keseluruhan masalah anggaran dan diharapkan mampu terlibat dalam proses anggaran di daerah, sehingga DPRD dapat melaksanakan fungsi penganggaran dan pengawasan tersebut secara efektif, efisien dan tepat sasaran.

Untuk meningkatkan kapabilitas fungsi DPRD dalam hal pengawasan keuangan daerah, maka DPRD dituntut untuk menguasai keseluruhan struktur dan proses dari anggaran/ APBD tersebut. Oleh karena itu, pengetahuan dasar tentang sektor ekonomi dan keseluruhan tentang anggaran harus dikuasai oleh anggota DPRD.

Yudoyono mengatakan bahwa agar mampu menjalankan tugasnya dengan baik, DPRD seharusnya tidak hanya mempunyai kemampuan di bidang politik, tetapi juga pengetahuan yang cukup mengenai mekanisme kerja DPRD, kebijakan publik, konsep dan teknik pemerintahan, teknik pengawasan, dan sebagainya.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Dewi Kartikasari. *Pengaruh Personal Background, Political Background, Pemahaman Regulasi terhadap Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada DPRD Kabupaten Boyolali)*. dalam *Accounting Analysis Journal* 1, 2012.

<sup>31</sup> Yudoyono, Bambang. *Optimalisasi Peran DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. 2000.

## B. Penelitian Terdahulu

Peneliti melakukan tinjauan terhadap penelitian sebelumnya sebagai acuan terhadap dilakukannya penelitian ini. Peneliti mengambil hasil penelitian yang terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dan menjadi rujukan bagi landasan penelitian ini, antara lain:

**Tabel 2.2**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti / Tahun / Judul penelitian	Variabel dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ni Made Ana Rosita, Nyoman Trisna Herawati, dan Ni Kadek Sinarwati. (2014) <sup>32</sup>  Pengaruh Latar Belakang Anggota Dewan dan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan	Variabel dependen: pengawasan dewan terhadap keuangan daerah.  Variabel independen: latar belakang politik anggota dewan, dan pengetahuan dewan tentang anggaran.  Variable	Latar belakang politik dan pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).  Dan transparansi kebijakan publik sebagai variabel moderating berpengaruh signifikan terhadap	Variabel dependen: pengawasan keuangan daerah (APBD)  Variabel independen: latar belakang politik anggota dewan, dan pengetahuan dewan tentang anggaran.  Metode penelitian:	Variabel moderating: transparansi kebijakan publik  Metode penelitian: MRA

<sup>32</sup> Ni Made Ana Rosita, Nyoman Trisna Herawati, dan Ni Kadek Sinarwati, “Pengaruh Latar Belakang Anggota Dewan dan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) dengan Variabel Moderating Transparansi Kebijakan Publik (Studi Kasus Pada Kantor DPRD Kabupaten Tabanan)” dalam *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol.2, No.1, 2014.

	Daerah (APBD) dengan Variabel Moderating Transparansi Kebijakan Publik (Studi Kasus Pada Kantor DPRD Kabupaten Tabanan).	moderating: transparansi kebijakan publik.  Metode Penelitian: analisis regresi linier berganda dan <i>Moderated Regression Analysis</i> (MRA)	hubungan antara latar belakang politik dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). Begitu juga transparansi kebijakan publik sebagai variabel moderating berpengaruh positif terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD)	analisis regresi linier berganda	
2.	Dewi Kartikasari. (2012) <sup>33</sup>  Pengaruh <i>personal background, political background,</i>	Variabel dependen: peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah	Tingkat pendidikan dan relevansi bidang pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan	Variabel independen: <i>personal background, political background,</i>  Variabel dependen:	Variabel independen: pemahaman regulasi

<sup>33</sup> Dewi Kartikasari, “Pengaruh *Personal Background, Political Background, Pemahaman Regulasi terhadap Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada DPRD Kabupaten Boyolali)*”, dalam *Accounting Analysis Journal* 1, 2012.

	Pemahaman Regulasi terhadap Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada DPRD Kabupaten Boyolali)	<p>Variabel independen: <i>personal background, political background</i>, dan pemahaman regulasi</p> <p>Metode penelitian: analisis regresi linier berganda</p>	<p>terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Latar belakang pekerjaan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Sementara pengalaman di DPRD, asal parpol koalisi, asal komisi anggaran, dan pemahaman regulasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.</p>	<p>peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah</p> <p>Metode penelitian: analisis regresi linier berganda</p>	
3.	Ni Made Asih Ristanti, Ni Kadek Sinarwati, dan Edy	<p>Variabel dependen: penerapan <i>good governance</i></p>	<p>Sistem pengendalian intern, pengelolaan keuangan</p>	<p>Variabel independen: komitmen organisasi</p>	<p>Variabel dependen: penerapan <i>good governance</i></p>



	Sujana. (2014) <sup>34</sup>  Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Komitmen Organisasi terhadap Penerapan <i>Good Governance</i> (Studi Kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan).	Variabel independen: sistem pengendalian internal, pengelolaan keuangan daerah dan komitmen organisasi  Metode penelitian: analisis regresi linier berganda	daerah, dan komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan <i>good governance</i> .	Metode penelitian: analisis regresi linier berganda	Variabel independen: sistem pengendalian internal, dan pengelolaan keuangan daerah.
4.	Nurhasmah, Nadirsyah, dan Syukriy Abdullah. (2015) <sup>35</sup>  Pengaruh Peran Dewan Perwakilan	Variabel dependen: Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara	Peran DPRD, kompetensi eksekutif, dan komitmen organisasi secara simultan berpengaruh	Variabel independen: Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan komitmen organisasi	Variabel dependen: Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara

<sup>34</sup> Ni Made Asih Ristanti, Ni Kadek Sinarwati, dan Edy Sujana, “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Komitmen Organisasi terhadap Penerapan *Good Governance* (Studi Kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan).”, dalam *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol.2, No.1, 2014.

<sup>35</sup> Nurhasmah, Nadirsyah, dan Syukriy Abdullah, “Pengaruh Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kompetensi eksekutif, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara.”, dalam *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol.4, No.1, Februari 2015.

	Rakyat Daerah (DPRD), Kompetensi eksekutif, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara	Variabel independen: Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kompetensi eksekutif, dan komitmen organisasi  Metode penelitian: analisis regresi linear berganda.	terhadap kualitas dan ketepatan waktu penyusunan APBD pada Kabupaten Aceh Utara. Secara parsial hasil menunjukkan bahwa masing-masing variabel yaitu, peran DPRD, kompetensi eksekutif dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas dan ketepatan waktu penyusunan APBD pada Kabupaten Aceh Utara.	Metode penelitian: analisis regresi linear berganda.	Variabel independen: kompetensi eksekutif.
5.	H. Andi Basru Wawo dan Fitriah Sarufa. (2016) <sup>36</sup>  Pengaruh Komitmen	Variabel dependen: Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah.	Komitmen organisasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap peran DPRD dalam	Variabel Independen: Komitmen Organisasi Dan Pengetahuan Dewan Tentang	Metode penelitian: analisis deskriptif dan analisis inferensial.

<sup>36</sup> H. Andi Basru Wawo dan Fitriah Sarufa, “Pengaruh Komitmen Organisasi Dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Pada Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara)”, dalam Jurnal Akuntansi dan Keuangan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, UHO, Vol.1, No.1, 2016.

	Organisasi Dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Pada Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara)	Variabel Independen: Komitmen Organisasi Dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran.  Metode penelitian: analisis deskriptif dan analisis inferensial.	pengawasan keuangan daerah. Pengetahuan dewan tentang anggaran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Komitmen organisasi dan pengetahuan dewan tentang anggaran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.	Anggaran.  Variabel dependen: Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah.	
6.	Fenny Silfia Putri, Hasan Basri, dan Muhammad Arfan. (2016) <sup>37</sup>	Variabel dependen: Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Anggaran	<i>personal background, political background,</i> dan pemahaman	Variabel independen: <i>personal background, political background,</i>	Variabel dependen: Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Anggaran

<sup>37</sup> Fenny Silfia Putri, Hasan Basri, dan Muhammad Arfan, “*Pengaruh Personal Background, Political Background, dan Pemahaman Anggota DPRA tentang Pengelolaan Keuangan Aceh terhadap Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Legislatif di Pemerintah*

	Pengaruh <i>personal background</i> , <i>political background</i> , dan Pemahaman Anggota DPRA tentang Pengelolaan Keuangan Aceh terhadap Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Legislatif di Pemerintah Aceh.	Legislatif di Pemerintah Aceh  Variabel independen: <i>personal background</i> , <i>political background</i> , dan Pemahaman Anggota DPRA tentang Pengelolaan Keuangan Aceh  Metode penelitian: analisis regresi linier berganda	anggota DPRA tentang pengelolaan keuangan Aceh baik secara bersama-sama maupun parsial berpengaruh terhadap fungsi pengawasan pelaksanaan anggaran legislatif di Pemerintah Aceh.	Metode penelitian: analisis regresi linier berganda	Legislatif di Pemerintah Aceh  Variabel independen: Pemahaman Anggota DPRA tentang Pengelolaan Keuangan Aceh
7.	Firda Kharimah. (2017) <sup>38</sup>  Pengaruh pengetahuan Anggota DPRD tentang Anggaran, Pemahaman	Variabel dependen: Peran Anggota Dewan dalam Pengawasan Keuangan Daerah  Variabel independen:	Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran, pemahaman regulasi, dan pengalaman berpengaruh terhadap peran	Variabel independen: pengetahuan Anggota DPRD tentang Anggaran  Variabel dependen: Peran	Variabel independen: Pemahaman Regulasi dan Pengalaman

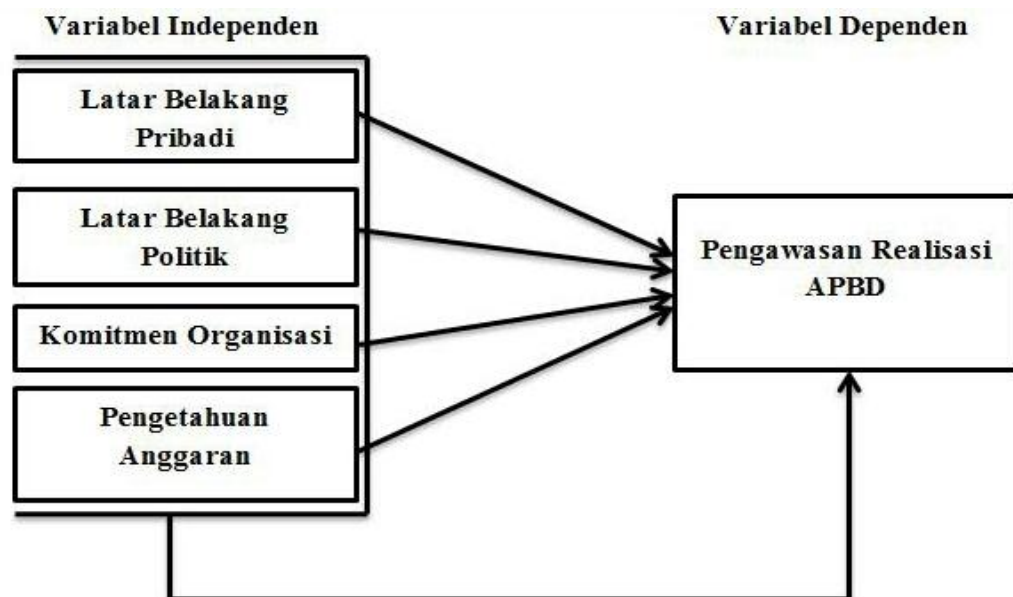
*Aceh.*”, dalam Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Vol.5, No.2, Mei 2016, h.24-35.

<sup>38</sup> Firda Kharimah, “*Pengaruh pengetahuan Anggota DPRD tentang Anggaran, Pemahaman Regulasi dan Pengalaman terhadap Peran Anggota Dewan dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Pada DPRD Pemerintahan Provinsi Riau)*”, dalam JOM Fekon, Vol.4, No.1, Februari 2017, h.804-816.

	Regulasi dan Pengalaman terhadap Peran Anggota Dewan dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Pada DPRD Pemerintahan Provinsi Riau)	pengetahuan Anggota DPRD tentang Anggaran, Pemahaman Regulasi dan Pengalaman Metode penelitian: analisis regresi linier berganda	anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah.	Anggota Dewan dalam Pengawasan Keuangan Daerah Metode penelitian: analisis regresi linier berganda	
--	--	--	---	--	--

### C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini meneliti pengaruh latar belakang pribadi, latar belakang politik, komitmen organisasi dan pengetahuan anggaran terhadap pengawasan realisasi APBD studi kasus pada kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Maka kerangka konseptual dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

### D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan pernyataan singkat yang disimpulkan dari landasan teori dan merupakan jawaban sementara terhadap pemecahan masalah yang

dihadapi serta harus dibuktikan kebenaran hasilnya.<sup>39</sup> Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka teoritis tersebut, maka hipotesis di bawah ini pada dasarnya merupakan jawaban sementara terhadap suatu masalah yang harus dibuktikan kebenarannya, adapun hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.  $H_{o1}$  : Latar belakang pribadi tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pengawasan realisasi APBD.
2.  $H_{a1}$  : Latar belakang pribadi berpengaruh dan signifikan terhadap pengawasan realisasi APBD.
3.  $H_{o2}$  : Latar belakang politik tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pengawasan realisasi APBD.
4.  $H_{a2}$  : Latar belakang politik berpengaruh dan signifikan terhadap pengawasan realisasi APBD.
5.  $H_{o3}$  : : Komitmen organisasi tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pengawasan realisasi APBD.
6.  $H_{a3}$  : Komitmen organisasi berpengaruh dan signifikan terhadap pengawasan realisasi APBD.
7.  $H_{o4}$  : Pengetahuan anggaran tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pengawasan realisasi APBD.
8.  $H_{a4}$  : Pengetahuan anggaran berpengaruh dan signifikan terhadap pengawasan realisasi APBD.
9.  $H_{o5}$  : Latar belakang pribadi, latar belakang politik, komitmen organisasi dan pengetahuan anggaran secara simultan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pengawasan realisasi APBD.
10.  $H_{a5}$  : Latar belakang pribadi, latar belakang politik, komitmen organisasi dan pengetahuan anggaran secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap pengawasan realisasi APBD.

---

<sup>39</sup> Arfan ikhsan, dkk, *Metodologi Penelitian Bisnis : Untuk Akuntansi dan Manajemen*, (Bandung: Cita Pustaka Media, 2014), h. 241.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Metodologi penelitian terdiri dari usaha mengumpulkan, mengklasifikasi, mengolah dan menganalisa data dari suatu masalah untuk mendapatkan hakikat suatu masalah, serta cara-cara penyelesaiannya yang tepat.<sup>40</sup>

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang menekankan pada penilaian numerik (angka) atas fenomena yang dipelajari atau diteliti. Pendekatan kuantitatif umumnya menerapkan proses deduksi dalam hubungan antara data dan teori.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang diambil dalam penelitian ini dilakukan di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 5 Kota Medan.

##### **2. Waktu Penelitian**

Adapun waktu penelitian dilakukan pada bulan Januari-Februari 2020 kemudian dilanjutkan lagi pada bulan Agustus-September 2020.

#### **C. Populasi dan Sampel**

##### **1. Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi juga merupakan keseluruhan kumpulan elemen-elemen berkaitan dengan apa yang

---

<sup>40</sup> Azhari Akmal Tarigan, et.al., *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Medan: La Tansa Press, 2011), h.14.

peneliti harapkan dalam mengambil beberapa keputusan.<sup>41</sup> Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi.<sup>42</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2019-2024 yang berjumlah 100 orang.

## **2. Sampel**

Sampling adalah cara yang digunakan untuk mengambil sampel, sedangkan penarikan sampel adalah cara pengumpulan data hanya sebagian elemen populasi yang diselidiki. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *Purposive Sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu atau disebut juga dengan penarikan sampel bertujuan. Metode ini menggunakan kriteria yang telah dipilih oleh peneliti dalam memilih sampel. Sampel penelitian ini adalah para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara periode 2019-2024 yang membidangi masalah keuangan dan anggaran yaitu Badan Anggaran dan Komisi B, C, dan D yang berjumlah 77 orang.

## **D. Jenis dan Sumber Data Penelitian**

### **1. Jenis Data Penelitian**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subyek (*Self-Report Data*). Data subyek merupakan jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subyek penelitian.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Arfan ikhsan, dkk, *Metodologi Penelitian Bisnis : Untuk Akuntansi dan Manajemen*, (Bandung: Cita Pustaka Media, 2014), h. 105.

<sup>42</sup> Nur Ahmadi, *Metodologi Penelitian Ekonomi* (Medan: FEBI UIN SU Press, 2016), h.32.

<sup>43</sup> Arfan ikhsan, dkk, *Metodologi Penelitian Bisnis : Untuk Akuntansi dan Manajemen*, (Bandung: Cita Pustaka Media, 2014), h. 121.



## 2. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama.

## E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

### 1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode survei. Metode survei adalah penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang institusi sosial, ekonomi, atau politik, dari suatu kelompok atau suatu daerah.<sup>44</sup> Metode survei merupakan pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Dengan metode survei, pengumpulan data primer menggunakan pertanyaan lisan atau tertulis. Metode survei juga merupakan metode pengumpulan data primer berdasarkan komunikasi antara peneliti dengan responden. Ada dua teknik yang dapat dilakukan ketika peneliti mengumpulkan data dengan metode ini: (1) wawancara, dan (2) penggunaan instrumen kuesioner.<sup>45</sup>

### 2. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penggunaan instrumen kuesioner. Kuesioner dikirimkan secara langsung kepada masing-masing anggota dewan yang ada di DPRD Provinsi Sumut dengan harapan agar penelitian ini dapat memperoleh hasil yang seoptimal mungkin. Masing-masing kuesioner disertai dengan surat permohonan untuk mengisi kuesioner yang ditujukan kepada responden. Permohonan tersebut berisikan identitas peneliti serta jaminan kerahasiaan data penelitian.

---

<sup>44</sup> Laylan Syafina, *Metode Penelitian Akuntansi: Pendekatan Kuantitatif*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2019), h. 7.

<sup>45</sup> Arfan ikhsan, dkk, *Metodologi Penelitian Bisnis : Untuk Akuntansi dan Manajemen*, (Bandung: Cita Pustaka Media, 2014), h. 123.

Adapun untuk variabel latar belakang pribadi dan latar belakang politik, kuesioner penelitiannya dimodifikasi dari penelitian terdahulu oleh peneliti Jaka Winarna dan Sri Murni dengan judul penelitian Pengaruh *Personal Background*, *Political Background* dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Di Karesidenan Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006).

Sementara untuk variabel komitmen organisasi, kuesioner penelitiannya dimodifikasi dari penelitian terdahulu oleh peneliti H. Andi Basru Wawo dan Fitriah Sarufa dengan judul penelitian Pengaruh Komitmen Organisasi Dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Pada Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara) pada tahun 2016.

Adapun variabel pengetahuan anggaran dan pengawasan realisasi APBD, kuesioner penelitiannya dimodifikasi dari penelitian terdahulu oleh peneliti Dewi Kartikasari dengan judul penelitian Pengaruh *Personal Background*, *Political Background*, Pemahaman Regulasi Terhadap Peran Anggota DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada DPRD Kabupaten Boyolali) pada tahun 2012.

Pengukuran instrumen menggunakan skala likert, dimana berisi pernyataan yang sistematis untuk menunjukan sikap seseorang terhadap pernyataan itu. Adapun yang dipakai sebagai kuesioner data angket dengan menggunakan 5 (lima) pilihan jawaban yaitu: Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral/Ragu (N), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). Setiap pilihan akan diberikan skor atau bobot nilai yang berbeda seperti pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Skor/Bobot Penilaian Menggunakan Skala Likert**

No.	Keterangan	Skor/Bobot
1.	Sangat Setuju (SS)	<b>5</b>
2.	Setuju (S)	<b>4</b>
3.	Netral/Ragu (N)	<b>3</b>
4.	Tidak Setuju (TS)	<b>2</b>
5.	Sangat Tidak Setuju (STS)	<b>1</b>

## F. Definisi Operasional

Dari penelitian ini yang menjadi variabel penelitian adalah:

**Tabel 3.2**

### Definisi Operasional

No.	Nama Variabel	Definisi Variabel	Pengukuran	Skala
1.	Latar belakang pribadi (Pr)	Latar belakang pribadi merupakan latar belakang diri yang melekat pada tiap individu anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara	Variabel ini diukur dengan beberapa indikator yaitu : a. usia, b. jenis kelamin, c. tingkat pendidikan, d. bidang pendidikan, dan e. latar belakang pekerjaan.	Likert
2.	Latar belakang politik (Po)	Latar belakang politik merupakan latar belakang dari pengalaman individu anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam berkecimpung di dunia politik.	Variabel ini diukur dengan beberapa indikator yaitu : a. pengalaman politik, b. pengalaman di DPRD SU, c. asal fraksi, d. asal komisi, e. jabatan di DPRD SU.	Likert
3.	Komitmen Organisasi (KO)	Komitmen organisasi merupakan sikap yang mencerminkan sejauh mana seseorang individu anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara mengenal dan terikat pada organisasinya.	Variabel ini diukur dengan beberapa indikator yaitu: a. keinginan yang kuat untuk menjadi anggota DPRD SU, b. kemauan usaha yang tinggi untuk mewujudkan tujuan organisasi, c. suatu keyakinan tertentu dan	Likert

			penerimaan terhadap nilai-nilai dan tujuan-tujuan organisasi.	
4.	Pengetahuan Anggaran (PA)	Pengetahuan anggaran merupakan pengetahuan anggota dewan DPRD Provinsi Sumatera Utara terkait anggaran yang direncanakan, disahkan, dan dikelola oleh pemerintah daerah.	Variabel ini diukur dengan beberapa indikator yaitu: a. mengetahui besaran APBD SU, b. mengetahui perda mengenai APBD SU, c. ikut menyusun APBD SU, d. mengetahui LPJ APBD SU pemerintah daerah.	Likert
5.	Pengawasan Realisasi APBD (PRA)	Pengawasan realisasi APBD adalah pengawasan terhadap anggaran keuangan daerah (APBD) oleh DPRD yang berarti digunakannya hak-hak DPRD dalam proses mekanisme APBD baik dalam penyusunan, pengesahan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBD.	Variabel ini diukur dengan beberapa indikator yaitu: a. anggota DPRD SU terlibat dalam memberikan masukan saat penyusunan APBD SU, b. anggota DPRD SU terlibat dalam pengesahan APBD SU, c. anggota dewan dapat menjelaskan APBD SU yang telah disusun, d. anggota DPRD SU terlibat dalam memantau pelaksanaan APBD SU,	Likert

			e. anggota dewan aktif melakukan evaluasi terhadap LPJ APBD SU yang disusun oleh pemerintah, f. anggota dewan meminta keterangan terkait LPJ APBD SU yang disampaikan pemerintah daerah, dan g. anggota dewan mengusut serta menindaklanjuti apabila terjadi kegagalan LPJ APBD SU.	
--	--	--	---	--

## G. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah analisis kuantitatif yang dinyatakan dalam angka-angka dan perhitungannya menggunakan metode statistik yang dibantu dengan program *Statistical Package for The Social Sciences* (SPSS 26.0).

### 1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian pada dasarnya merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Tabulasi menyajikan ringkasan, pengaturan atau penyusunan data dalam bentuk tabel numerik dan grafik. Statistik deskriptif umumnya digunakan oleh peneliti untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan data demografi responden. Ukuran yang digunakan dalam deskripsi antara lain berupa: frekuensi, tendensi sentral (rata-rata, median, modus), dispersi (deviasi standar dan varian) dan koefisien korelasi antar variabel penelitian. Ukuran yang digunakan dalam statistik deskriptif

tergantung pada tipe skala pengukuran *construct* yang digunakan dalam penelitian.<sup>46</sup>

## 2. Uji Kualitas Data

Instrumen adalah salah satu alat pengumpul data. Untuk itu, instrumen perlu diuji validitas dan reliabilitasnya. Penting untuk diketahui bahwa instrumen yang reliabel belum tentu valid. Instrumen yang tidak teruji validitas dan reliabilitasnya, akan menghasilkan data yang kurang dapat dipercaya. Untuk itu peneliti perlu mengacu pada uji validitas dan reliabilitas data. Validitas mengacu pada alat ukur yang diuji apakah benar-benar telah teruji/terukur sedangkan reliabilitas dengan ketepatan alat ukur.

### a. Uji Validitas

Validitas adalah akurasi temuan penelitian yang mencerminkan kebenaran sekalipun responden yang dijadikan objek pengujian berbeda. Validitas dalam penelitian ditentukan oleh proses pengukuran yang akurat. Suatu instrumen pengukur dikatakan valid jika instrumen tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur. Ada tiga pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur validitas: (1) *content validity*, adalah salah satu konsep pengukuran validitas dimana suatu instrumen dinilai memiliki *content validity* jika mengandung butir-butir pertanyaan yang memadai dan representatif untuk mengukur *construct* sesuai dengan yang diinginkan peneliti. (2) *criterion related validity*, adalah konsep pengukuran validitas yang menguji tingkat akurasi dari instrumen yang baru dikembangkan. dan (3) *construct validity*, adalah konsep pengukuran validitas dengan cara menguji apakah suatu instrumen mengukur *construct* sesuai dengan yang diharapkan.<sup>47</sup>

Dasar pengambilan keputusan uji validitas:

- 1) Membandingkan nilai  $r$  hitung dengan  $r$  tabel.
  - a) Jika nilai  $r$  hitung  $> r$  tabel = Valid

---

<sup>46</sup> *Ibid*, h.150.

<sup>47</sup> *Ibid*, h. 158-159.

- b) Jika nilai  $r \text{ hitung} < r \text{ tabel}$  = Tidak valid
- 2) Melihat nilai signifikansi (sig.)
  - a) Jika nilai  $\text{sig.} < 0,05$  = Valid
  - b) Jika nilai  $\text{sig.} > 0,05$  = Tidak valid

### **b. Uji Reliabilitas**

Suatu alat ukur disebut mempunyai reliabilitas tinggi atau dapat dipercaya, jika alat ukur itu mantap, dalam pengertian bahwa alat ukur tersebut stabil dapat diandalkan dan dapat diramalkan. Suatu alat ukur yang baik tidak berubah-ubah pengukurannya dan dapat diandalkan karena penggunaan alat ukur tersebut berkali-kali akan memberikan hasil yang serupa. Selanjutnya memberikan aspek ketepatan atau akurasi. Ukuran yang akurat adalah ukuran yang sesuai dengan yang ingin diukur. Jika kedua aspek diatas yaitu aspek stabilitas dan aspek akurasi digabungkan, maka dapat disimpulkan bahwa alat ukur tersebut mantap dan dapat mengukur secara cermat dan tepat. Suatu alat ukur juga harus sedemikian rupa sifatnya, sehingga kesalahan yang terjadi, yaitu kesalahan pengukuran yang random sifatnya dapat ditolerir.<sup>48</sup>

Konsep reliabilitas dapat diukur melalui tiga pendekatan yaitu: (1) koefisien stabilitas, (2) koefisien ekuivalensi dan (3) reliabilitas konsistensi internal. Mengacu pada pendapat Wiratno Juherweni (2014) yang menyatakan bahwa sebuah variabel dikatakan reliabel apabila mencapai cronbach's alpha  $\geq 0.60$ .

### **3. Uji Asumsi Klasik**

Regresi linier dapat disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi kriteria BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*). BLUE dapat dicapai bila memenuhi asumsi klasik. Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah model estimasi telah memenuhi kriteria ekonometrika, dalam arti tidak terjadi penyimpangan yang cukup serius dari asumsi-asumsi yang harus dipenuhi dalam metode *Ordinary Least Square* (OLS). Sedikitnya terdapat empat uji asumsi yang harus dilakukan terhadap suatu model regresi linier sederhana, yaitu:

---

<sup>48</sup> *Ibid*, h.160.

### a. Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independennya memiliki distribusi normal atau tidak. Cara yang sering digunakan dalam menentukan apakah suatu model berdistribusi normal atau tidak hanya dengan melihat pada histogram residual apakah memiliki bentuk seperti “lonceng” atau tidak. Cara ini menjadi fatal karena pengambilan keputusan data berdistribusi normal atau tidak hanya dari pengamatan gambar saja. Ada cara lain untuk menentukan data berdistribusi normal atau tidak dengan menggunakan pendekatan *Kolmogorov-Smirnov*.

Dasar pengambilan keputusan dengan menggunakan *Kolmogorov Smirnov* adalah:<sup>49</sup>

- 1) Jika nilai *p-value* pada kolom *Asymp. Sig (2-tailed)*  $> 0,05$  maka data penelitian disimpulkan berdistribusi normal.
- 2) Jika nilai *p-value* pada kolom *Asymp. Sig (2-tailed)*  $< 0,05$  maka data penelitian disimpulkan tidak berdistribusi normal.

### b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi yang kuat di antara variabel-variabel independen yang diikutsertakan dalam pembentukan model. Untuk mendeteksi apakah model regresi linier mengalami multikolinearitas dapat diperiksa menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk masing-masing variabel independen, yaitu jika variabel independen mempunyai nilai VIF kurang dari 10 dan *tolerance* yang lebih dari 0,1 maka dapat dinyatakan bahwa model bebas dari masalah multikolinearitas.

### c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linier kesalahan pengganggu (*e*) mempunyai varians yang sama atau tidak dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji ini digunakan untuk

---

<sup>49</sup> Isnaini Harahap, et.al., *Pedoman Praktikum SPSS & Bank Mini*. (Medan: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Medan, 2013), h. 51.



mengetahui apakah dalam model regresi terjadi heteroskedastisitas varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Heteroskedastisitas dideteksi dengan uji *Gletsjer* yaitu dengan melakukan regresi antara nilai residual sebagai variabel dependen dengan variabel independen model regresi yang diajukan, dan untuk menentukan persamaan regresi bebas hetero maka hasil regresi tersebut harus tidak signifikan. Hasil uji *Gletsjer* menunjukkan bahwa variabel penelitian ini bebas heteroskedastisitas dibuktikan dengan tidak terdapatnya variabel bebas yang signifikan pada tingkat 5%.<sup>50</sup>

#### 4. Uji Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda adalah regresi dimana variabel terikatnya (Y) dihubungkan/dijelaskan dengan lebih dari satu variabel, mungkin dua, tiga, dan seterusnya variabel bebas ( $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$ ) namun masih menunjukkan diagram hubungan yang linier. Penambahan variabel bebas ini diharapkan dapat lebih menjelaskan karakteristik hubungan yang ada walaupun masih saja ada variabel yang terabaikan.<sup>51</sup>

Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Bentuk umum persamaan regresi linier berganda dapat ditulis sebagai berikut:

$$PRA = a + b_{Pr}Pr + b_{Po}Po + b_{KO}KO + b_{PA}PA + e$$

Keterangan:

PRA = Pengawasan Realisasi APBD

Pr = Latar belakang pribadi

Po = Latar belakang politik

---

<sup>50</sup> Arfan ikhsan, dkk, *Metodologi Penelitian Bisnis : Untuk Akuntansi dan Manajemen*, (Bandung: Cita Pustaka Media, 2014), h.188.

<sup>51</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Statistik 1 (Statistik Deskriptif)*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), h.269.

KO	= Komitmen Organisasi
PA	= Pengetahuan Anggaran
$a, b_{Pr}, b_{Po}, b_{KO}, b_{PA}$	= koefisien regresi linier berganda
$e$	= <i>error</i> (kesalahan pengganggu)

## 5. Uji Hipotesis

Uji hipotesis adalah cabang ilmu statistika inferensial yang digunakan untuk menguji kebenaran suatu pernyataan secara statistik dan menarik kesimpulan apakah menerima atau menolak pernyataan tersebut. Pernyataan ataupun asumsi sementara yang dibuat untuk diuji kebenarannya tersebut dinamakan dengan hipotesis atau hipotesa. Tujuan dari uji hipotesis adalah untuk menetapkan suatu dasar sehingga dapat mengumpulkan bukti yang berupa data-data dalam menentukan keputusan apakah menolak atau menerima kebenaran dari pernyataan atau asumsi yang telah dibuat. Uji hipotesis juga dapat memberikan kepercayaan diri dalam pengambilan keputusan yang bersifat objektif.

### a. Uji t

Uji statistik t adalah uji yang menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hipotesis nol ( $H_0$ ) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter ( $\beta_i$ ) sama dengan nol, atau  $H_0 : \beta_i = 0$ . Artinya, apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya ( $H_a$ ) parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, atau  $H_a : \beta_i \neq 0$ . Artinya, variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

Kriteria dalam penilaian hasil uji t sebagai berikut:

#### a. Berdasarkan t hitung dan t tabel

- 1)  $H_a$ : Jika nilai t hitung  $>$  t tabel maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat.
- 2)  $H_0$ : jika nilai t hitung  $<$  t tabel maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel.

b. Berdasarkan nilai signifikansi

- 1)  $H_a$ : jika nilai Sig.  $< 0,05$  maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat
- 2)  $H_o$ : jika nilai Sig.  $> 0,05$  maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

**b. Uji F**

Uji statistik F adalah uji yang menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat/dependen. Hipotesis nol ( $H_o$ ) yang hendak diuji adalah apakah semua parameter dalam model sama dengan nol, atau:  $H_o : b_1 = b_2 = \dots = b_k = 0$ . Artinya, apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya ( $H_a$ ) tidak semua parameter secara simultan sama dengan nol, atau;  $H_a : b_1 = b_2 = \dots = b_k \neq 0$ . Artinya, semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

Kriteria pengambilan keputusan uji F sebagai berikut:

a. Berdasarkan nilai F hitung dan F tabel

- 1)  $H_a$ : jika nilai F hitung  $> F$  tabel maka variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat.
- 2)  $H_o$ : jika nilai F hitung  $< F$  tabel maka variabel bebas secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

b. Berdasarkan nilai signifikansi

- 1)  $H_a$ : jika nilai signifikansi  $< 0,05$ , maka variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.
- 2)  $H_o$ : jika nilai signifikansi  $> 0,05$ , maka variabel bebas secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

**c. Uji Model  $R^2$**

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data primer atau data silang (*cross section*) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, nilai  $R^2$  yang bernilai 0,2 atau 0,3 dapat dikatakan sudah cukup baik. Sedangkan untuk data sekunder atau data runtutan waktu (*time series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi.

Nilai  $R$  gunanya untuk mengetahui keeratan hubungan antara variabel independen (X) secara simultan terhadap variabel dependen (Y). Nilai korelasi bisa bernotasi negatif maupun positif, notasi ini mengindikasikan bentuk atau arah hubungan yang terjadi. Sedangkan nilai  $R$  square ( $R^2$ ) gunanya untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel independen (X) secara serempak di dalam menjelaskan variabel dependen (Y).<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Arfan Ikhsan, dkk, *Op. cit*, h. 200.

## **BAB IV**

### **TEMUAN PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum DPRD Provinsi Sumatera Utara**

##### **1. Sejarah Singkat Berdirinya DPRD Provinsi Sumatera Utara**

Provinsi Sumatera Utara pertama kalinya dibentuk pada tanggal 15 April 1948 berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1948, daerah ini meliputi Keresidenan Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli Utara. Pembentukan Provinsi Sumatera Utara di atas berdasarkan surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 19 Tahun 1973 tertanggal 13 Agustus yang ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Sumatera Utara.<sup>53</sup>

Sebelumnya berdasarkan surat penetapan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 19 Agustus 1945, Sumatera Utara menjadi sebuah provinsi dan daerah administrasi. Seperti halnya di Pulau Jawa, berangsur-angsur dibentuk komite nasional daerah yang kedudukannya diatur melalui maklumat Gubernur Sumatera Utara tertanggal 12 April 1946 No.2/MGS yang isinya sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1945. Dalam maklumat tersebut ditetapkan bahwa komite nasional daerah dibentuk di Provinsi dan Keresidenan, sehingga Provinsi dan Keresidenan itu menjadi kota otonom. Daerah-daerah tersebut memiliki Dewan Perwakilan Rakyat yang mengatur rumah tangganya sendiri.

DPRD membentuk suatu Badan Eksekutif, yang terdiri dari 5 orang anggota Dewan yang bertugas menjalankan pemerintahan sehari-hari dan kepala daerah menjadi ketua serta merangkap anggota. Berdasarkan maklumat tersebut di atas, anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Sumatera Utara berjumlah 100 orang yang mewakili 100.000 penduduk.

Dalam sidangnya pada tanggal 17 s/d 19 April 1946 di Bukit Tinggi, Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara secara sub administratif dibagi dalam sub provinsi, yaitu :

---

<sup>53</sup> Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara <https://www.dprd-sumutprov.go.id>

- a. Sub Provinsi Sumatera Utara yang meliputi Keresidenan Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli.
- b. Sub Provinsi Sumatera Tengah meliputi Keresidenan Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
- c. Sub Provinsi Sumatera Selatan meliputi Keresidenan Bangka, Belitung, Lampung dan Palembang.

Tiap sub provinsi dikepalai oleh Gubernur Muda yang bertindak sebagai koordinator dari Keresidenan dan jawatan pemerintah yang ada di wilayahnya. Pemerintahan Sumatera Utara dijalankan sesuai dengan maklumat Gubernur Sumatera Utara tanggal 30 Agustus 1946, yang menyatakan bahwa pemerintah provinsi disesuaikan dengan pemerintahan pusat.

Pembentukan DPR Sumatera menjadi daerah otonom yang dilegalisasi oleh pemerintah pusat. Ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1974 yang menyatakan dengan tegas bahwa Provinsi Sumatera Utara dijalankan oleh Gubernur dan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Eksekutif. Pemerintah Daerah Sumatera Utara berhubungan langsung dengan Pemerintah Pusat dan berada di bawah menteri-menteri dan selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1974 dinyatakan yang merupakan daerah otonom di Sumatera adalah Keresidenan dan daerah-daerah yang ditunjuk sebagai daerah otonom.

## **2. Visi dan Misi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara**

### **a. Visi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 1 ayat 12, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Penetapan visi sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan Pemerintah Daerah. Visi adalah mental model masa depan, dengan demikian visi harus digali bersama, disusun bersama sekaligus diupayakan perwujudannya secara bersama, sehingga visi menjadi milik bersama yang diyakini oleh seluruh elemen masyarakat.

Dengan memperhatikan pengertian visi dan melalui pendekatan membangun visi bersama serta didasarkan pada karakteristik spesifik yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD, maka ditetapkan visi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara yaitu : *“Terwujudnya pelayanan prima terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Sumatera Utara”*.<sup>54</sup>

#### **b. Misi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara**

Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki instansi Pemerintah dari Peraturan Perundang-undangan atau kemampuan penguasaan teknologi sesuai dengan strategi yang telah dipilih. Untuk merealisasikan visi tersebut dirumuskan pula misi yang merupakan upaya-upaya yang harus dilaksanakan sesuai dengan arah dan tujuan visi. Adapun yang menjadi misi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

- 1) Menata sistem kerja sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara.
- 2) Meningkatkan kinerja aparatur melalui pelayanan yang efektif dan efisien.
- 3) Meningkatkan kinerja DPRD Provinsi Sumatera Utara
- 4) Menumbuh kembangkan hubungan eksekutif, legislatif dan masyarakat.

### **3. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas di DPRD Provinsi Sumatera Utara**

#### **a. Struktur Organisasi DPRD Provinsi Sumatera Utara**

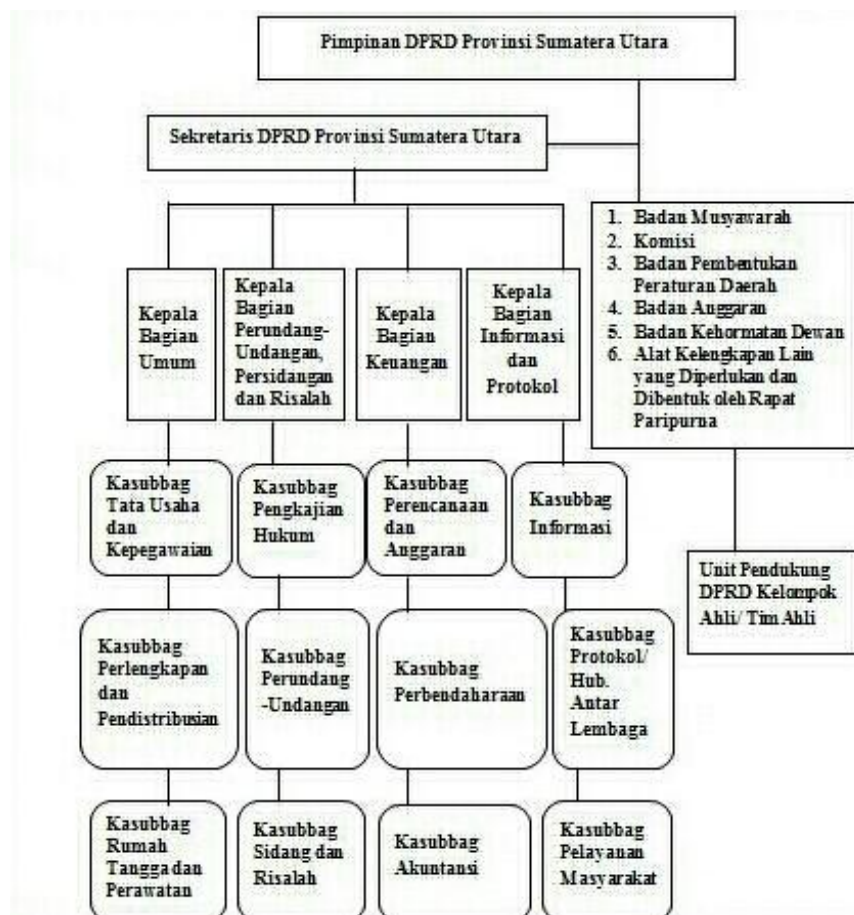
Struktur organisasi dibuat untuk menjalankan perusahaan atau instansi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing jabatan. Struktur organisasi secara jelas mampu memisahkan tanggung jawab dan wewenang anggotanya.

---

<sup>54</sup> Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun

Jika dalam satu instansi atau perusahaan tidak memiliki komponen penting dalam struktur organisasi tersebut bisa jadi akan mengalami gangguan kedepannya, salah satunya dalam hal alur manajemen dan pengelolaan.

Berikut adalah struktur organisasi di DPRD Provinsi Sumatera Utara:



**Gambar 4.1 Struktur Organisasi DPRD Provinsi Sumatera Utara**

#### **b. Pembagian Tugas di DPRD Provinsi Sumatera Utara**

Peraturan DPRD SU No.4/K/2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa pembagian tugas di DPRD Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

##### **1) Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara**

Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara yang terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 4 (empat) orang Wakil Ketua. Pimpinan DPRD mempunyai tugas yaitu: memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan,



menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua, melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD, dan lain sebagainya.

## 2) Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara

Melaksanakan urusan umum, administrasi/kesekretariatan, administrasi keuangan perundang-undangan, persidangan dan risalah, informasi, protokol dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan menyediakan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas-tugasnya Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara dibantu oleh :

### a) Bagian Umum

Bagian umum mempunyai tugas Sekretaris DPRD dalam penyelenggaraan urusan penatausahaan, kepegawaian, administrasi persuratan, kearsipan , perlengkapan dan pendistribusian dan perawatan.

Bagian Umum terdiri dari :

1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Perlengkapan dan Pendistribusian
3. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perawatan

### b) Bagian Keuangan

Bagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyipian pelaksanaan dan pelayanan serta administrasi di bidang perencanaan dan anggaran akuntansi, dan perbendaharaan menyelenggarakan urusan program, pengelolaan keuangan dan menyusun laporan keuangan dan menyusun laporan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Bagian Keuangan terdiri-dari :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran
2. Sub Bagian Perbendaharaan
3. Sub Bagian Akuntansi

### c) Bagian Perundang-Undangan, Persidangan dan Risalah

Bagian perundang-undangan, persidangan dan risalah mempunyai tugas membantu sekretaris dewan dalam menyelenggarakan urusan perundang-undangan, persidangan dan risalah di bidang perundang-undangan, pengkajian hukum, dan sidang dan risalah.

Bagian Perundang-Undangan Persidangan dan Risalah terdiri-dari :

1. Sub Bagian Pengkajian Hukum
2. Sub Bagian Perundang-undangan
3. Sub Bagian Sidang dan Risalah

d) Bagian Informasi dan Protokol

Bagian informasi dan protokol mempunyai tugas membantu sekretaris dewan dalam menyelenggarakan urusan informasi dan protokol di bidang informasi, protokol dan hubungan antar lembaga, pelayanan masyarakat dan aspirasi.

Bagian Informasi dan Protokol terdiri dari :

1. Sub Bagian Informasi
2. Sub Bagian Protokol/Hubungan Antar Lembaga
3. Sub Bagian Pelayanan Masyarakat/Aspirasi

3) Alat Kelengkapan Dewan

a) Badan Musyawarah

Badan Musyawarah mempunyai tugas :

1. Menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna DPRD untuk mengubahnya.
2. Memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.
3. Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/ penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing, dan lain-lain.

#### b) Komisi

Komisi mempunyai tugas:

1. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan keputusan DPRD.
3. Memberikan saran dan pendapat terhadap rancangan kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara serta usul rencana program kerja dan anggaran para SKPD mitra kerja terkait kepada Badan Anggaran.
4. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi.
5. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang komisi masing- masing, dan lain-lain.

Adapun DPRD Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 5 komisi yaitu:

1. Komisi A, Bidang Pemerintahan.
2. Komisi B, Bidang Perekonomian.
3. Komisi C, Bidang Keuangan.
4. Komisi D, Bidang Pembangunan.
5. Komisi E, Bidang Kesejahteraan Rakyat.

#### c) Badan Pembentukan Peraturan Daerah

Badan Pembentukan Peraturan Daerah bertugas:

1. Menyusun rancangan program pembentukan peraturan daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD dengan mempertimbangkan masukan dari Pemerintah Daerah dan masyarakat.
2. Koordinasi untuk penyusunan program pembentukan peraturan daerah antara DPRD dan Pemerintah Daerah.

3. Menyiapkan rancangan peraturan daerah usul prakarsa DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan, dan lain-lain.

d) Badan Anggaran

Badan Anggaran mempunyai tugas:

1. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Gubernur dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD.
2. Melakukan koordinasi kepada komisi-komisi dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara serta usul rencana program kerja dan anggaran para SKPD mitra kerja komisi-komisi.
3. Memberikan saran dan pendapat kepada Gubernur dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
4. Melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
5. Melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh gubernur untuk dijadikan acuan dalam menyusun rancangan APBD, dan lain-lain.

e) Badan Kehormatan Dewan

Badan Kehormatan DPRD mempunyai tugas :

1. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan/ atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/ atau tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

2. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap tata tertib dan/ atau kode etik DPRD dan lain-lain.

f) Alat Kelengkapan Lain yang Diperlukan dan Dibentuk oleh Rapat Paripurna

Dalam hal diperlukan, DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa panitia khusus, yang berkaitan dengan akuntabilitas keuangan daerah, urusan aspirasi masyarakat serta urusan lainnya.

4) Unit Pendukung DPRD Kelompok Ahli/ Tim Ahli

Unit pendukung DPRD kelompok ahli/ tim ahli bertugas membantu alat kelengkapan dewan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai anggota DPRD.

## B. Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini mengambil sampel para anggota dewan yang ada di Badan Anggaran, Komisi B, Komisi C, dan Komisi D DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2019-2024 sebanyak 77 orang. Adapun kuesioner yang dibagikan sebanyak 77 lembar eksemplar atau 100%. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner yang telah dilakukan, berhasil dikumpulkan kembali jawaban kuesioner yang diisi lengkap sebanyak 70 kuesioner atau 90,9%. Adapun ikhtisar distribusi dan pengembalian kuesioner dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.1**

**Ikhtisar Distribusi dan Pengembalian Kuesioner**

No.	Keterangan	Jumlah Kuesioner	Persentase
1.	Kuesioner yang disebar	77	100%
2.	Kuesioner yang kembali	70	90,9%
3.	Kuesioner yang tidak kembali	7	9,1%
4.	Kuesioner yang dapat diolah	70	90,9%
N sampel = 70			
<i>Responden Rate</i> = $70/77 \times 100\% = 90,9\%$			

Sumber: Data primer yang diolah

## 1. Deskripsi Karakteristik Responden

Berdasarkan data yang sudah berhasil penulis himpun dari 70 responden tersebut, maka dapat disajikan informasi umum tentang responden yaitu, jenis kelamin, usia, jenjang pendidikan, bidang pendidikan, latar belakang pekerjaan, asal fraksi, asal komisi, jabatan di DPRD SU, pengalaman lama kerja di DPRD SU, dan pengalaman di partai politik.

Berdasarkan tabel 4.2 diketahui responden dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 64 orang atau 91,4% dan jenis kelamin perempuan sebanyak 6 orang atau 8,6% dari total responden 70 orang. Sehingga dapat disimpulkan sebagian besar responden dalam penelitian ini berjenis kelamin laki-laki.

Responden yang berusia antara 21-30 tahun sebanyak 7 orang atau 10,0%, berusia antara 31-40 tahun sebanyak 12 orang atau 17,1%, berusia antara 41-50 tahun sebanyak 25 orang atau 35,7%, berusia antara 51-60 tahun sebanyak 22 orang atau 31,4%, berusia antara 61-70 tahun sebanyak 2 orang atau 2,9% dan berusia > 71 tahun sebanyak 2 orang atau 2,9%. Hal ini menunjukkan responden dengan rentang umur antara 41-50 tahun lebih mendominasi dari total jumlah responden, yaitu sebesar 35,7%.

Responden terbesar berasal dari anggota DPRD berpendidikan S1 (Sarjana) dengan jumlah 44 orang atau 62,9%, kemudian berpendidikan S2 (Master) berjumlah 13 orang atau 18,6%, berpendidikan SMA/Sederajat berjumlah 12 orang atau 17,1% dan berpendidikan S3 (Doktor) berjumlah 1 orang atau 1,4%.

Responden dengan bidang pendidikan Ekonomi dan Bisnis adalah responden terbesar yaitu sebanyak 23 orang atau 32,9%, kemudian disusul responden di bidang pendidikan hukum sebanyak 13 orang atau 18,6%, lalu di bidang pendidikan lain-lain sebanyak 12 orang atau 17,1%, responden di bidang teknik sebanyak 9 orang atau 12,9%, responden di bidang pendidikan sebanyak 5 orang atau 7,1%, responden di bidang sosial dan politik sebanyak 4 orang atau 5,7%, responden di bidang kesehatan sebanyak 2 orang atau 2,9%, responden di bidang agama sebanyak 2 orang atau 2,9%.

Responden terbesar berlatar belakang pekerjaan sebagai wiraswasta berjumlah 34 orang atau 48,6%, kemudian disusul responden berlatar belakang

pekerjaan sebagai mantan DPRD Provinsi/Kab/Kota berjumlah 24 orang atau 34,3%, responden berlatar belakang pekerjaan sebagai pegawai swasta berjumlah 9 orang atau 12,9%, dan berlatar belakang pekerjaan lain-lain berjumlah 3 orang atau 4,3%.

Responden terbesar berasal dari fraksi PDIP dan Gerindra masing-masing berjumlah 12 orang atau 17,1%, kemudian disusul responden dari fraksi Golkar berjumlah 10 orang atau 14,3%, kemudian disusul responden dari fraksi Nasdem, PKS dan Demokrat masing-masing berjumlah 7 orang atau 10,0%, selanjutnya disusul responden dari fraksi PAN dan Hanura masing-masing berjumlah 6 orang atau 8,6%, dan responden dari fraksi Nusantara berjumlah 3 orang atau 4,3%.

Responden dari komisi B merupakan responden terbesar yaitu berjumlah 20 orang atau 28,6%, disusul responden dari komisi D berjumlah 19 orang atau 27,1%, kemudian responden dari komisi C berjumlah 16 orang atau 22,9%, responden dari komisi E berjumlah 9 orang atau 12,9%, responden dari komisi A berjumlah 5 orang atau 7,1% dan responden lain-lain berjumlah 1 orang atau 1,4%.

Responden dengan jabatan sebagai anggota DPRD SU merupakan responden terbesar yaitu berjumlah 69 orang atau 98,6%, dan responden dengan jabatan wakil ketua DPRD SU berjumlah 1 orang atau 1,4%.

Responden pengalaman kerja sebanyak 1 Periode di DPRD SU adalah responden terbesar yaitu berjumlah 58 orang atau 82,9%, lalu responden dengan pengalaman kerja > 1 Periode di DPRD SU berjumlah 12 orang atau 17,1%.

Responden dengan pengalaman di partai politik < 10 Tahun adalah responden terbesar yaitu berjumlah 38 orang atau 54,3%, disusul responden dengan pengalaman di partai politik > 10 Tahun berjumlah 32 orang atau 45,7%.

Adapun untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut yang menunjukkan data demografi responden:

**Tabel 4.2**  
**Data Demografi Responden**

Keterangan		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Jenis Kelamin (Valid)	Laki-laki	64	91,4	91,4	91,4
	Perempuan	6	8,6	8,6	100,0
	<b>Total</b>	<b>70</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	
Usia (Valid)	21-30 Tahun	7	10,0	10,0	10,0
	31-40 Tahun	12	17,1	17,1	27,1
	41-50 Tahun	25	35,7	35,7	62,9
	51-60 Tahun	22	31,4	31,4	94,3
	61-70 Tahun	2	2,9	2,9	97,1
	> 71 Tahun	2	2,9	2,9	100,0
	<b>Total</b>	<b>70</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	
Jenjang Pendidikan (Valid)	SMA	12	17,1	17,1	17,1
	S1 (Sarjana)	44	62,9	62,9	80,0
	S2 (Master)	13	18,6	18,6	98,6
	S3 (Doktor)	1	1,4	1,4	100,0
	<b>Total</b>	<b>70</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	
Bidang Pendidikan (Valid)	Ekonomi dan Bisnis	23	32,9	32,9	32,9
	Hukum	13	18,6	18,6	51,4
	Kesehatan	2	2,9	2,9	54,3
	Sosial dan Politik	4	5,7	5,7	60,0
	Pendidikan	5	7,1	7,1	67,1
	Agama	2	2,9	2,9	70,0
	Teknik	9	12,9	12,9	82,9
	Lain-lain	12	17,1	17,1	100,0
	<b>Total</b>	<b>70</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	
Latar Belakang Pekerjaan Valid	DPRD Provinsi /Kab/Kota	24	34,3	34,3	34,3
	Pegawai Swasta	9	12,9	12,9	47,1
	Wiraswasta	34	48,6	48,6	95,7
	Lain-lain	3	4,3	4,3	100,0
	<b>Total</b>	<b>70</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	
Asal Fraksi	PDIP	12	17,1	17,1	17,1



(Valid)	Gerindra	12	17,1	17,1	34,3
	Golkar	10	14,3	14,3	48,6
	Nasdem	7	10,0	10,0	58,6
	PKS	7	10,0	10,0	68,6
	Demokrat	7	10,0	10,0	78,6
	PAN	6	8,6	8,6	87,1
	Hanura	6	8,6	8,6	95,7
	Nusantara	3	4,3	4,3	100,0
	<b>Total</b>	<b>70</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	
Asal Komisi (Valid)	A	5	7,1	7,1	7,1
	B	20	28,6	28,6	35,7
	C	16	22,9	22,9	58,6
	D	19	27,1	27,1	85,7
	E	9	12,9	12,9	98,6
	Lain-lain	1	1,4	1,4	100,0
	<b>Total</b>	<b>70</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	
Jabatan di DPRD SU (Valid)	Wakil Ketua	1	1,4	1,4	1,4
	Anggota	69	98,6	98,6	100,0
	<b>Total</b>	<b>70</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	
Pengalaman di DPRD SU (Valid)	1 Periode	58	82,9	82,9	82,9
	>1 Periode	12	17,1	17,1	100,0
	<b>Total</b>	<b>70</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	
Pengalaman di Partai Politik (Valid)	<10 Tahun	38	54,3	54,3	54,3
	>10 Tahun	32	45,7	45,7	100,0
	<b>Total</b>	<b>70</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	

Sumber: Hasil olah data primer dengan SPSS 26.0

## 2. Distribusi Persentase Jawaban Responden

### a. Distribusi Persentase Jawaban Responden Berdasarkan Latar Belakang Pribadi DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah Anggota Dewan yang berada di Badan Anggaran, Komisi B, C, dan D DPRD Provinsi Sumatera Utara. Kuesioner yang dapat diolah dalam penelitian ini sebanyak 70. Distribusi persentase jawaban responden berdasarkan latar belakang pribadi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.3**  
**Persentase Jawaban Responden Berdasarkan Latar Belakang Pribadi**

Item Pernyataan	Skor Jawaban										Total	
	STS		TS		N		S		SS			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Pr.1	-	-	4	5,7	5	7,1	24	34,3	37	52,9	70	100,0
Pr.2	-	-	-	-	2	2,9	26	37,1	42	60,0	70	100,0
Pr.3	-	-	-	-	-	-	30	42,9	40	57,1	70	100,0
Pr.4	-	-	-	-	-	-	32	45,7	38	54,3	70	100,0
Pr.5	-	-	-	-	-	-	27	38,6	43	61,4	70	100,0
Pr.6	-	-	-	-	1	1,4	33	47,6	36	51,4	70	100,0
Pr.7	-	-	4	5,7	5	7,1	27	38,6	34	48,6	70	100,0
Pr.8	-	-	1	1,4	-	-	37	52,9	32	45,7	70	100,0
Pr.9	-	-	8	11,4	2	2,9	20	28,6	40	57,1	70	100,0
Pr.10	-	-	-	-	-	-	35	50,0	35	50,0	70	100,0

Sumber: Hasil olah data primer dengan *SPSS 26.0*

Dari tabel di atas dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Pernyataan 1, yaitu pendidikan akan mempengaruhi pola pikir seseorang dalam mengambil sikap dan tindakannya selama bekerja. Mayoritas responden sebanyak 37 orang atau 52,9% menyatakan sangat setuju, sisanya sebanyak 24 orang atau 34,3% menyatakan setuju, sebanyak 5 orang atau 7,1% menyatakan netral/ragu, dan sebanyak 4 orang atau 5,7% menyatakan tidak setuju bahwa pendidikan akan mempengaruhi pola pikir seseorang dalam mengambil sikap dan tindakannya selama bekerja
- 2) Pernyataan 2, yaitu jenjang pendidikan yang dimiliki mendukung dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota dewan. Mayoritas responden sebanyak 42 orang atau 60,0% menyatakan sangat setuju, sisanya sebanyak 26 orang atau 37,1% menyatakan setuju dan sebanyak 2 orang atau 2,9% menyatakan netral/ragu bahwa jenjang pendidikan yang dimiliki mendukung dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota dewan.
- 3) Pernyataan 3, yaitu latar belakang pendidikan yang dimiliki relevan dengan pelaksanaan tugas sebagai anggota dewan. Mayoritas responden sebanyak 40 orang atau 57,1% menyatakan sangat setuju, sisanya sebanyak 30 orang atau 42,9% menyatakan setuju bahwa latar belakang

pendidikan yang dimiliki relevan dengan pelaksanaan tugas sebagai anggota dewan.

- 4) Pernyataan 4, yaitu latar belakang pendidikan yang dimiliki dapat membantu pelaksanaan tugas sebagai anggota dewan. Mayoritas responden sebanyak 38 orang atau 54,3% menyatakan sangat setuju, sisanya sebanyak 32 orang atau 44,7% menyatakan setuju bahwa latar belakang pendidikan yang dimiliki dapat membantu pelaksanaan tugas sebagai anggota dewan.
- 5) Pernyataan 5, yaitu pengalaman dan latar belakang pekerjaan yang dimiliki berguna dalam membantu pelaksanaan tugas sebagai anggota dewan. Mayoritas responden sebanyak 43 orang atau 61,4% menyatakan sangat setuju, sisanya sebanyak 27 orang atau 38,6% menyatakan setuju bahwa pengalaman dan latar belakang pekerjaan yang dimiliki berguna dalam membantu pelaksanaan tugas sebagai anggota dewan.
- 6) Pernyataan 6, yaitu siapapun bisa menjadi anggota dewan baik laki-laki ataupun perempuan. Mayoritas responden sebanyak 36 orang atau 51,4% menyatakan sangat setuju, sisanya sebanyak 33 orang atau 47,6% menyatakan setuju, dan sebanyak 1 orang atau 1,4% menyatakan netral/ragu bahwa siapapun bisa menjadi anggota dewan baik laki-laki ataupun perempuan.
- 7) Pernyataan 7, yaitu usia akan mempengaruhi pola pikir seseorang dalam bertindak dan mengambil keputusan. Mayoritas responden sebanyak 34 orang atau 48,6% menyatakan sangat setuju, sisanya sebanyak 27 orang atau 38,6% menyatakan setuju, sebanyak 5 orang atau 7,1% menyatakan netral/ragu, dan sebanyak 4 orang atau 5,7% menyatakan tidak setuju bahwa usia akan mempengaruhi pola pikir seseorang dalam bertindak dan mengambil keputusan.
- 8) Pernyataan 8, yaitu pentingnya partai politik memperhatikan latar belakang pribadi bakal calon DPRD SU yang diusulkan. Mayoritas responden sebanyak 37 orang atau 52,9% menyatakan setuju, sisanya

sebanyak 32 orang atau 45,7% menyatakan sangat setuju dan sebanyak 1 orang atau 1,4% menyatakan tidak setuju bahwa pentingnya partai politik memperhatikan latar belakang pribadi bakal calon DPRD SU yang diusulkan.

- 9) Pernyataan 9, yaitu pentingnya pendidikan tinggi sebagai anggota dewan. Mayoritas responden sebanyak 40 orang atau 57,1% menyatakan sangat setuju, sisanya sebanyak 20 orang atau 28,6% menyatakan setuju, sebanyak 8 orang atau 11,4% menyatakan tidak setuju, dan sebanyak 2 orang atau 2,9% menyatakan netral/ragu bahwa pentingnya pendidikan tinggi sebagai anggota dewan.
- 10) Pernyataan 10, yaitu pendidikan dan pengalaman yang dimiliki dapat membantu dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota dewan. Mayoritas responden sebanyak 35 orang atau 50,0% menyatakan setuju dan sangat setuju bahwa pendidikan dan pengalaman yang dimiliki dapat membantu dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota dewan.

#### **b. Distribusi Persentase Jawaban Responden Berdasarkan Latar Belakang Politik DPRD Provinsi Sumatera Utara.**

**Tabel 4.4**

##### **Persentase Jawaban Responden Berdasarkan Latar Belakang Politik**

Item Pernyataan	Skor Jawaban										Total	
	STS		TS		N		S		SS			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Po.1	-	-	-	-	1	1,4	43	61,4	26	37,1	70	100,0
Po.2	-	-	-	-	-	-	36	51,4	34	48,6	70	100,0
Po.3	-	-	-	-	-	-	33	47,1	37	52,9	70	100,0
Po.4	-	-	-	-	-	-	33	47,1	37	52,9	70	100,0
Po.5	-	-	-	-	-	-	37	52,9	33	47,1	70	100,0
Po.6	-	-	-	-	-	-	39	55,7	31	44,3	70	100,0
Po.7	5	7,1	20	28,6	15	21,4	25	35,7	5	7,1	70	100,0
Po.8	-	-	-	-	-	-	49	70,0	21	30,0	70	100,0

Sumber: Hasil olah data primer dengan SPSS 26.0

Dari tabel di atas dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Pernyataan 1, yaitu cara berfikir yang dimiliki saat ini merupakan buah dari pengalaman organisasi partai politik yang digeluti selama ini. Mayoritas responden sebanyak 43 orang atau 61,4% menyatakan setuju, sisanya sebanyak 26 orang atau 37,1% menyatakan sangat setuju dan sebanyak 1 orang atau 1,4% menyatakan netral/ragu bahwa cara berfikir yang dimiliki saat ini merupakan buah dari pengalaman organisasi partai politik yang digeluti selama ini.
- 2) Pernyataan 2, yaitu semakin lama mengikuti suatu organisasi politik, maka semakin banyak pengalaman yang didapatkan. Mayoritas responden sebanyak 36 orang atau 51,4% menyatakan setuju, sisanya sebanyak 34 orang atau 48,6% menyatakan sangat setuju bahwa semakin lama mengikuti suatu organisasi politik, maka semakin banyak pengalaman yang didapatkan.
- 3) Pernyataan 3, yaitu pengalaman organisasi politik mempengaruhi keahlian dalam suatu organisasi. Mayoritas responden sebanyak 37 orang atau 52,9% menyatakan sangat setuju, sisanya sebanyak 33 orang atau 47,1% menyatakan setuju bahwa pengalaman organisasi politik mempengaruhi keahlian dalam suatu organisasi.
- 4) Pernyataan 4, yaitu masa kerja di DPRD memberikan pengalaman dalam melaksanakan tugas sebagai anggota dewan. Mayoritas responden sebanyak 37 orang atau 52,9% menyatakan sangat setuju, sisanya sebanyak 33 orang atau 47,1% menyatakan setuju bahwa masa kerja di DPRD memberikan pengalaman dalam melaksanakan tugas sebagai anggota dewan.
- 5) Pernyataan 5, yaitu pengalaman di DPRD menjadi media pembelajaran untuk menjadi lebih baik dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota dewan. Mayoritas responden sebanyak 37 orang atau 52,9% menyatakan setuju, sisanya sebanyak 33 orang atau 47,1% menyatakan sangat setuju bahwa pengalaman di DPRD menjadi media pembelajaran untuk menjadi lebih baik dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota dewan.

- 6) Pernyataan 6, yaitu jabatan di DPRD SU memotivasi dalam melaksanakan tugas sebagai anggota dewan. Mayoritas responden sebanyak 39 orang atau 55,7% menyatakan setuju, sisanya sebanyak 31 orang atau 44,3% menyatakan sangat setuju bahwa jabatan di DPRD SU memotivasi dalam melaksanakan tugas sebagai anggota dewan.
- 7) Pernyataan 7, yaitu untuk dapat melaksanakan fungsi sebagai anggota DPRD dengan baik, harus sudah pernah memegang jabatan dalam partai politik. Mayoritas responden sebanyak 25 orang atau 35,7% menyatakan setuju, sisanya sebanyak 20 orang atau 28,6% menyatakan tidak setuju, sebanyak 15 orang atau 21,4% menyatakan netral/ragu, dan sebanyak 5 orang atau 7,1% menyatakan sangat setuju dan sangat tidak setuju bahwa untuk dapat melaksanakan fungsi sebagai anggota DPRD dengan baik, harus sudah pernah memegang jabatan dalam partai politik.
- 8) Pernyataan 8, yaitu pengalaman menjabat di partai politik menjadikan diri lebih bijaksana. Mayoritas responden sebanyak 49 orang atau 70,0% menyatakan setuju, sisanya sebanyak 21 orang atau 30,0% menyatakan sangat setuju bahwa pengalaman menjabat di partai politik menjadikan diri lebih bijaksana.

**c. Distribusi Persentase Jawaban Responden Berdasarkan Komitmen Organisasi DPRD Provinsi Sumatera Utara.**

**Tabel 4.5**  
**Persentase Jawaban Responden Berdasarkan Komitmen Organisasi**

Item Pernyataan	Skor Jawaban										Total	
	STS		TS		N		S		SS			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
KO.1	-	-	2	2,9	-	-	60	85,7	8	11,4	70	100,0
KO.2	-	-	-	-	-	-	59	84,3	11	15,7	70	100,0
KO.3	1	1,4	1	1,4	-	-	46	65,7	22	31,4	70	100,0
KO.4	-	-	5	7,1	5	7,1	40	57,1	20	28,6	70	100,0
KO.5	1	1,4	2	2,9	1	1,4	42	60,0	24	34,3	70	100,0
KO.6	6	8,6	10	14,3	14	20,0	15	21,4	25	35,7	70	100,0
KO.7	3	4,3	4	5,7	4	5,7	30	42,9	29	41,4	70	100,0
KO.8	2	2,9	7	10,0	8	11,4	29	41,4	24	34,3	70	100,0

Sumber: Hasil olah data primer dengan SPSS 26.0

Dari tabel di atas dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Pernyataan 1, yaitu memiliki keinginan kuat untuk menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Mayoritas responden sebanyak 60 orang atau 85,7% menyatakan setuju, sisanya sebanyak 8 orang atau 11,4% menyatakan sangat setuju dan sebanyak 2 orang atau 2,9% menyatakan tidak setuju bahwa mereka memiliki keinginan kuat untuk menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara.
- 2) Pernyataan 2, yaitu memiliki keterlibatan dalam mencapai tujuan organisasi di DPRD SU. Mayoritas responden sebanyak 59 orang atau 84,3% menyatakan setuju, sisanya sebanyak 11 orang atau 15,7% menyatakan sangat setuju bahwa mereka merasa memiliki keterlibatan dalam mencapai tujuan organisasi di DPRD SU.
- 3) Pernyataan 3, yaitu terikat secara emosional dengan DPRD SU. Mayoritas responden sebanyak 46 orang atau 65,7% menyatakan setuju, sisanya sebanyak 22 orang atau 31,4% menyatakan sangat setuju, dan sebanyak 1 orang atau 1,4% menyatakan tidak setuju dan dan sangat tidak setuju bahwa mereka merasa terikat secara emosional dengan DPRD SU.
- 4) Pernyataan 4, yaitu senang membanggakan organisasi tempat mereka bekerja (DPRD SU) kepada orang lain. Mayoritas responden sebanyak 40 orang atau 57,1% menyatakan setuju, sisanya sebanyak 20 orang atau 28,6% menyatakan sangat setuju, dan sebanyak 5 orang atau 7,1% menyatakan netral/ragu dan tidak setuju bahwa mereka senang membanggakan organisasi tempat mereka bekerja (DPRD SU) kepada orang lain.
- 5) Pernyataan 5, yaitu masalah organisasi di DPRD SU juga menjadi masalah pribadi. Mayoritas responden sebanyak 42 orang atau 60,0% menyatakan setuju, sisanya sebanyak 24 orang atau 34,3% menyatakan sangat setuju, sebanyak 1 orang atau 1,4% menyatakan sangat tidak setuju dan netral/ragu, dan sebanyak 2 orang atau 2,9% menyatakan tidak setuju bahwa mereka merasa masalah organisasi di DPRD SU juga menjadi masalah mereka.

- 6) Pernyataan 6, yaitu ada perasaan bersalah meninggalkan DPRD SU, jika seandainya nanti meninggalkan DPRD SU karena ada amanah/jabatan lain dari pemerintah/swasta yang mengharuskan mereka melepas jabatan sebagai anggota DPRD SU. Mayoritas responden sebanyak 25 orang atau 35,7% menyatakan sangat setuju, sisanya sebanyak 15 orang atau 21,4% menyatakan setuju, sebanyak 14 orang atau 20,0% menyatakan netral/ragu, sebanyak 10 orang atau 14,3% menyatakan tidak setuju dan sebanyak 6 orang atau 8,6% menyatakan sangat tidak setuju bahwa ada perasaan bersalah meninggalkan DPRD SU, jika seandainya nanti meninggalkan DPRD SU karena ada amanah/jabatan lain dari pemerintah/swasta yang mengharuskan mereka melepas jabatan sebagai anggota DPRD SU.
- 7) Pernyataan 7, yaitu mau berusaha di atas batas normal untuk mensukseskan visi misi dan tujuan organisasi DPRD SU. Mayoritas responden sebanyak 30 orang atau 42,9% menyatakan setuju, sisanya sebanyak 29 orang atau 41,4% menyatakan sangat setuju, sebanyak 4 orang atau 5,7% menyatakan tidak setuju dan netral/ragu, dan sebanyak 3 orang atau 4,3% menyatakan sangat tidak setuju bahwa mereka mau berusaha di atas batas normal untuk mensukseskan visi misi dan tujuan organisasi DPRD SU.
- 8) Pernyataan 8, yaitu bertahan menjadi anggota DPRD SU merupakan keharusan. Mayoritas responden sebanyak 29 orang atau 41,4% menyatakan setuju, sisanya sebanyak 24 orang 34,3% menyatakan sangat setuju, sebanyak 8 orang atau 11,4% menyatakan netral/ragu, sebanyak 7 orang atau 10,0% menyatakan tidak setuju dan sebanyak 2 orang atau 2,9% menyatakan sangat tidak setuju bahwa mereka merasa bertahan menjadi anggota DPRD SU merupakan keharusan.



**d. Distribusi Persentase Jawaban Responden Berdasarkan Pengetahuan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Utara**

**Tabel 4.6**

**Persentase Jawaban Responden Berdasarkan Pengetahuan Anggaran**

Item Pernyataan	Skor Jawaban										Total	
	STS		TS		N		S		SS			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
PA.1	-	-	3	4,3	4	5,7	47	67,1	16	22,9	70	100,0
PA.2	-	-	5	7,1	16	22,9	35	50,0	14	20,0	70	100,0
PA.3	-	-	-	-	7	10,0	48	68,6	15	21,4	70	100,0
PA.4	-	-	-	-	-	-	41	58,6	29	41,4	70	100,0
PA.5	-	-	-	-	-	-	39	55,7	31	44,3	70	100,0
PA.6	-	-	-	-	3	4,3	38	54,3	29	41,4	70	100,0
PA.7	-	-	-	-	-	-	41	58,6	29	41,4	70	100,0
PA.8	-	-	-	-	-	-	27	38,6	43	61,4	70	100,0
PA.9	-	-	-	-	-	-	40	57,1	30	42,9	70	100,0
PA.10	-	-	7	10,0	28	40,0	15	21,4	20	28,6	70	100,0

Sumber: Hasil olah data primer dengan SPSS 26.0

Dari tabel di atas dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Pernyataan 1, yaitu perlu mempelajari dan memahami RAPBD/APBD sebelum pembahasan secara seksama. Mayoritas responden sebanyak 47 orang atau 67,1% menyatakan setuju, sisanya sebanyak 16 orang atau 22,9% menyatakan sangat setuju, sebanyak 4 orang atau 5,7% menyatakan netral/ragu, dan sebanyak 3 orang atau 4,3% menyatakan tidak setuju bahwa mereka perlu mempelajari dan memahami RAPBD/APBD sebelum pembahasan secara seksama.
- 2) Pernyataan 2, yaitu perlu mempelajari dan memahami laporan perhitungan dan nota perhitungan APBD secara seksama. Mayoritas responden sebanyak 35 orang atau 50,0% menyatakan setuju, sisanya sebanyak 16 orang atau 22,9% menyatakan netral/ragu, sebanyak 14

orang atau 20,0% menyatakan sangat setuju, dan sebanyak 5 orang atau 7,1% menyatakan tidak setuju bahwa mereka perlu mempelajari dan memahami laporan perhitungan dan nota perhitungan APBD secara seksama.

- 3) Pernyataan 3, yaitu perlu mempelajari dan memahami laporan pertanggung jawaban (LPJ) kepala daerah secara seksama. Mayoritas responden sebanyak 48 orang atau 68,6% menyatakan setuju, sisanya sebanyak 15 orang atau 21,4% menyatakan sangat setuju, dan sebanyak 7 orang atau 10,0% menyatakan netral/ragu bahwa mereka perlu mempelajari dan memahami laporan pertanggung jawaban (LPJ) kepala daerah secara seksama.
- 4) Pernyataan 4, yaitu APBD disusun oleh DPRD bersama-sama dengan Kepala Daerah. Mayoritas responden sebanyak 41 orang atau 58,6% menyatakan setuju, sisanya sebanyak 29 orang atau 41,4% menyatakan sangat setuju bahwa APBD disusun oleh DPRD bersama-sama dengan Kepala Daerah.
- 5) Pernyataan 5, yaitu penyusunan dan penetapan perhitungan APBD merupakan pertanggungjawaban DPRD. Mayoritas responden sebanyak 39 orang atau 55,7% menyatakan setuju, sisanya sebanyak 31 orang atau 44,3% menyatakan sangat setuju bahwa penyusunan dan penetapan perhitungan APBD merupakan pertanggungjawaban DPRD.
- 6) Pernyataan 6, yaitu memahami dan mengetahui peraturan daerah mengenai RAPBD/APBD. Mayoritas responden sebanyak 38 orang atau 54,3% menyatakan setuju, sisanya sebanyak 29 orang atau 41,4% menyatakan sangat setuju, dan sebanyak 3 orang atau 4,3% menyatakan netral/ragu bahwa mereka memahami dan mengetahui peraturan daerah mengenai RAPBD/APBD.
- 7) Pernyataan 7, yaitu dalam menyusun APBD, Pemda dan DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sementara. Mayoritas responden sebanyak 41 orang atau 58,6% menyatakan setuju, sisanya sebanyak 29 orang atau 41,4% menyatakan sangat setuju bahwa dalam

menyusun APBD, Pemda dan DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sementara.

- 8) Pernyataan 8, yaitu jumlah anggaran yang disetujui Dewan Legislatif harus dimanfaatkan oleh Eksekutif secara ekonomis, efektif dan efisien. Mayoritas responden sebanyak 43 orang atau 61,4% menyatakan sangat setuju, sisanya sebanyak 27 orang atau 38,6% menyatakan setuju bahwa jumlah anggaran yang disetujui Dewan Legislatif harus dimanfaatkan oleh Eksekutif secara ekonomis, efektif dan efisien.
- 9) Pernyataan 9, yaitu DPRD membahas Kebijakan Umum APBD dalam pembahasan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Mayoritas responden sebanyak 40 orang atau 57,1% menyatakan setuju, sisanya sebanyak 30 orang atau 42,9% menyatakan sangat setuju bahwa DPRD membahas Kebijakan Umum APBD dalam pembahasan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
- 10) Pernyataan 10, yaitu segera mengetahui dan dapat mengidentifikasi apabila terjadi pemborosan atau kegagalan kegiatan/proyek pembangunan pada anggaran tahun berjalan secara rinci. Mayoritas responden sebanyak 28 orang atau 40,0% menyatakan netral/ragu, sisanya sebanyak 20 orang atau 28,6% menyatakan sangat setuju, sebanyak 15 orang atau 21,4% menyatakan setuju, dan sebanyak 7 orang atau 10,0% menyatakan tidak setuju bahwa mereka segera mengetahui dan dapat mengidentifikasi apabila terjadi pemborosan atau kegagalan kegiatan/proyek pembangunan pada anggaran tahun berjalan secara rinci.

**e. Distribusi Persentase Jawaban Responden Berdasarkan Pengawasan Realisasi APBD SU DPRD Provinsi Sumatera Utara**

**Tabel 4.7**

**Persentase Jawaban Responden Berdasarkan Pengawasan Realisasi APBD**

Item Pernyataan	Skor Jawaban										Total	
	STS		TS		N		S		SS			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
PRA.1	-	-	-	-	-	-	42	60,0	28	40,0	70	100,0
PRA.2	-	-	-	-	2	2,9	42	60,0	26	37,1	70	100,0
PRA.3	-	-	-	-	-	-	40	57,1	30	42,9	70	100,0
PRA.4	-	-	1	1,4	2	2,9	41	58,6	26	37,1	70	100,0
PRA.5	-	-	-	-	1	1,4	40	57,1	29	41,4	70	100,0
PRA.6	-	-	-	-	-	-	35	50,0	35	50,0	70	100,0
PRA.7	-	-	-	-	-	-	39	55,7	31	44,3	70	100,0
PRA.8	-	-	-	-	-	-	32	45,7	38	54,3	70	100,0
PRA.9	1	1,4	1	1,4	9	12,9	30	42,9	29	41,4	70	100,0
PRA.10	-	-	1	1,4	2	2,9	41	58,6	26	37,1	70	100,0

Sumber: Hasil olah data primer dengan *SPSS 26.0*

Dari tabel di atas dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Pernyataan 1, yaitu anggota dewan terlibat dalam memberikan masukan saat penyusunan arah dan kebijakan umum APBD. Mayoritas responden sebanyak 42 orang atau 60,0% menyatakan setuju, sisanya sebanyak 28 orang atau 40,0% menyatakan sangat setuju bahwa anggota dewan terlibat dalam memberikan masukan saat penyusunan arah dan kebijakan umum APBD.
- 2) Pernyataan 2, yaitu analisis politik dan ekonomi selalu dilakukan dalam proses penyusunan APBD. Mayoritas responden sebanyak 42 orang atau 60,0% menyatakan setuju, sisanya sebanyak 26 orang atau 37,1% menyatakan sangat setuju, dan sebanyak 2 orang atau 2,9% menyatakan netral/ragu bahwa analisis politik dan ekonomi selalu dilakukan dalam proses penyusunan APBD.
- 3) Pernyataan 3, yaitu anggota dewan terlibat dalam pengesahan APBD. Mayoritas responden sebanyak 40 orang atau 57,1% menyatakan setuju,

sisanya sebanyak 30 orang atau 42,9% menyatakan sangat setuju bahwa anggota dewan terlibat dalam pengesahan APBD.

- 4) Pernyataan 4, yaitu anggota dewan dapat menjelaskan APBD yang telah disusun oleh pemerintah. Mayoritas responden sebanyak 41 orang atau 58,6% menyatakan setuju, sisanya sebanyak 26 orang atau 37,1% menyatakan sangat setuju, sebanyak 2 orang atau 2,9% menyatakan netral/ragu, dan sebanyak 1 orang atau 1,4% menyatakan tidak setuju bahwa anggota dewan dapat menjelaskan APBD yang telah disusun oleh pemerintah.
- 5) Pernyataan 5, yaitu anggota dewan terlibat dalam memantau pelaksanaan APBD. Mayoritas responden sebanyak 40 orang atau 57,1% menyatakan setuju, sisanya sebanyak 29 orang atau 41,4% menyatakan sangat setuju, dan sebanyak 1 orang atau 1,4% menyatakan netral/ragu bahwa anggota dewan terlibat dalam memantau pelaksanaan APBD.
- 6) Pernyataan 6, yaitu anggota dewan aktif melakukan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh pemerintah. Mayoritas responden sebanyak 35 orang atau 50,0% menyatakan setuju dan sangat setuju bahwa anggota dewan aktif melakukan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh pemerintah.
- 7) Pernyataan 7, yaitu anggota dewan melakukan evaluasi APBD yang mencakup faktor-faktor atau alasan-alasan yang mendorong timbulnya revisi APBD. Mayoritas responden sebanyak 39 orang atau 55,7% menyatakan setuju, sisanya sebanyak 31 orang atau 44,3% menyatakan sangat setuju bahwa anggota dewan melakukan evaluasi APBD yang mencakup faktor-faktor atau alasan-alasan yang mendorong timbulnya revisi APBD.
- 8) Pernyataan 8, yaitu anggota dewan meminta keterangan berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban (LPJ) APBD yang disampaikan Gubernur dan harus meyakinkan bahwa APBD telah memiliki transparansi. Mayoritas responden sebanyak 38 orang atau 54,3% menyatakan sangat setuju, sisanya sebanyak 32 orang atau 45,7% menyatakan setuju bahwa

anggota dewan meminta keterangan berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban (LPJ) APBD yang disampaikan Gubernur dan harus meyakinkan bahwa APBD telah memiliki transparansi.

- 9) Pernyataan 9, yaitu anggota dewan selalu mengusut dan menindaklanjuti apabila terjadi kejanggalan dalam LPJ APBD. Mayoritas responden sebanyak 30 orang atau 42,9% menyatakan setuju, sisanya sebanyak 29 orang atau 41,4% menyatakan sangat setuju, sebanyak 9 orang atau 12,9% menyatakan netral/ragu, dan sebanyak 1 orang atau 1,4% menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju.
- 10) Pernyataan 10, yaitu anggota dewan aktif menggunakan hak untuk menolak LPJ Gubernur jika tidak sesuai dengan standar kinerja dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Mayoritas responden sebanyak 41 orang atau 58,6% menyatakan setuju, sisanya sebanyak 26 orang atau 37,1% menyatakan sangat setuju, sebanyak 2 orang atau 2,9% menyatakan netral/ragu, dan sebanyak 1 orang atau 1,4% menyatakan tidak setuju.

### C. Uji Persyaratan Analisis

#### 1. Statistik Deskriptif

Berikut adalah hasil olah data statistik deskriptif dari 70 responden yang bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.8**

*Descriptive Statistics*

Keterangan	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Latar Belakang Pribadi	70	31	50	44,69	4,802
Latar Belakang Politik	70	29	40	34,19	2,688
Komitmen Organisasi	70	24	40	32,43	4,203
Pengetahuan Anggaran	70	35	50	42,40	3,766
Pengawasan Realisasi APBD	70	38	50	43,90	3,481
Valid N (listwise)	70				

Sumber: Hasil olah data primer dengan SPSS 26.0

Berdasarkan tabel 4.8 di atas untuk masing – masing variabel yaitu: untuk variabel latar belakang pribadi diketahui total skor jawaban maksimum adalah 50, dan jawaban terendah adalah 31, sedangkan rata-rata jawaban adalah 44,69. Variabel latar belakang politik diketahui total skor jawaban maksimum adalah 40 dan jawaban terendah adalah 29, sedangkan rata-rata jawaban adalah 34,19. Variabel komitmen organisasi diketahui total skor jawaban maksimum adalah 40 dan jawaban terendah adalah 24, sedangkan rata-rata jawaban adalah 32,43. Variabel pengetahuan anggaran diketahui total skor jawaban maksimum adalah 50, dan jawaban terendah adalah 35, sedangkan rata-rata jawaban adalah 42,40. Selanjutnya untuk variabel pengawasan realisasi APBD diketahui total skor jawaban maksimum adalah 50 dan jawaban terendah adalah 38, sedangkan rata-rata jawaban adalah 43,90.

## **2. Uji Kualitas Data**

### **a. Uji Validitas**

Validitas adalah akurasi temuan penelitian yang mencerminkan kebenaran sekalipun responden yang dijadikan objek pengujian berbeda. Validitas dalam penelitian ditentukan oleh proses pengukuran yang akurat. Suatu instrumen pengukur dikatakan valid jika instrumen tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur.

Selanjutnya r tabel dicari pada signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi dan jumlah data  $N = 70$ , maka didapat r tabel sebesar 0,235. Dan r tabel yang didapat tersebut dibandingkan dengan besarnya nilai r hasil perhitungan statistik atau r hitung yang dapat dilihat pada masing-masing variabel dengan mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji Validitas Latar Belakang Pribadi**

Indikator	r Hitung	r Tabel N = 70, $\alpha = 5\%$	Sig.	Kondisi	Keterangan
Pr.1	0,841	0,235	0,000	r Hitung > r Tabel	Valid
Pr.2	0,761	0,235	0,000	r Hitung > r Tabel	Valid
Pr.3	0,772	0,235	0,000	r Hitung > r Tabel	Valid
Pr.4	0,800	0,235	0,000	r Hitung > r Tabel	Valid
Pr.5	0,785	0,235	0,000	r Hitung > r Tabel	Valid
Pr.6	0,727	0,235	0,000	r Hitung > r Tabel	Valid
Pr.7	0,670	0,235	0,000	r Hitung > r Tabel	Valid
Pr.8	0,716	0,235	0,000	r Hitung > r Tabel	Valid
Pr.9	0,789	0,235	0,000	r Hitung > r Tabel	Valid
Pr.10	0,701	0,235	0,000	r Hitung > r Tabel	Valid

Sumber: Hasil olah data primer dengan SPSS 26.0

Bedasarkan tabel 4.9 hasil uji validitas latar belakang pribadi. Dari ouput yang diperoleh, 10 item pernyataan dinyatakan valid, karena r hitung > r tabel dan nilai sig. < 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa masing-masing item pernyataan tentang latar belakang pribadi adalah valid.

**Tabel 4.10**  
**Hasil Uji Validitas Latar Belakang Politik**

Indikator	r Hitung	r Tabel N = 70, $\alpha = 5\%$	Sig.	Kondisi	Keterangan
Po.1	0,657	0,235	0,000	r Hitung > r Tabel	Valid
Po.2	0,586	0,235	0,000	r Hitung > r Tabel	Valid
Po.3	0,484	0,235	0,000	r Hitung > r Tabel	Valid
Po.4	0,666	0,235	0,000	r Hitung > r Tabel	Valid
Po.5	0,621	0,235	0,000	r Hitung > r Tabel	Valid
Po.6	0,671	0,235	0,000	r Hitung > r Tabel	Valid
Po.7	0,448	0,235	0,000	r Hitung > r Tabel	Valid
Po.8	0,725	0,235	0,000	r Hitung > r Tabel	Valid

Sumber: Hasil olah data primer dengan SPSS 26.0

Bedasarkan tabel 4.10 hasil uji validitas latar belakang politik. Dari ouput yang diperoleh, 8 item pernyataan dinyatakan valid, karena r hitung > r tabel dan



nilai sig. < 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa masing-masing item pernyataan tentang latar belakang politik adalah valid.

**Tabel 4.11**  
**Hasil Uji Validitas Komitmen Organisasi**

Indikator	r Hitung	r Tabel N = 70, $\alpha = 5\%$	Sig.	Kondisi	Keterangan
KO.1	0,536	0,235	0,000	r Hitung > r Tabel	Valid
KO.2	0,435	0,235	0,000	r Hitung > r Tabel	Valid
KO.3	0,643	0,235	0,000	r Hitung > r Tabel	Valid
KO.4	0,479	0,235	0,000	r Hitung > r Tabel	Valid
KO.5	0,662	0,235	0,000	r Hitung > r Tabel	Valid
KO.6	0,762	0,235	0,000	r Hitung > r Tabel	Valid
KO.7	0,726	0,235	0,000	r Hitung > r Tabel	Valid
KO.8	0,665	0,235	0,000	r Hitung > r Tabel	Valid

Sumber: Hasil olah data primer dengan SPSS 26.0

Berdasarkan tabel 4.11 hasil uji validitas komitmen organisasi. Dari output yang diperoleh, 8 item pernyataan dinyatakan valid, karena r hitung > r tabel dan nilai sig. < 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa masing-masing item pernyataan tentang komitmen organisasi adalah valid.

**Tabel 4.12**  
**Hasil Uji Validitas Pengetahuan Anggaran**

Indikator	r Hitung	r Tabel N = 70, $\alpha = 5\%$	Sig.	Kondisi	Keterangan
PA.1	0,681	0,235	0,000	r Hitung > r Tabel	Valid
PA.2	0,687	0,235	0,000	r Hitung > r Tabel	Valid
PA.3	0,688	0,235	0,000	r Hitung > r Tabel	Valid
PA.4	0,616	0,235	0,000	r Hitung > r Tabel	Valid
PA.5	0,451	0,235	0,000	r Hitung > r Tabel	Valid
PA.6	0,626	0,235	0,000	r Hitung > r Tabel	Valid
PA.7	0,437	0,235	0,000	r Hitung > r Tabel	Valid
PA.8	0,469	0,235	0,000	r Hitung > r Tabel	Valid
PA.9	0,579	0,235	0,000	r Hitung > r Tabel	Valid
PA.10	0,730	0,235	0,000	r Hitung > r Tabel	Valid

Sumber: Hasil olah data primer dengan SPSS 26.0

Berdasarkan tabel 4.12 hasil uji validitas pengetahuan anggaran. Dari output yang diperoleh, 10 item pernyataan dinyatakan valid, karena r hitung > r tabel dan

nilai sig.  $< 0,05$ . Jadi dapat disimpulkan bahwa masing-masing item pernyataan tentang pengetahuan anggaran adalah valid.

**Tabel 4.13**  
**Hasil Uji Validitas Pengawasan Realisasi APBD**

Indikator	r Hitung	r Tabel N = 70, $\alpha = 5\%$	Sig.	Kondisi	Keterangan
PRA.1	0,673	0,235	0,000	r Hitung > r Tabel	Valid
PRA.2	0,641	0,235	0,000	r Hitung > r Tabel	Valid
PRA.3	0,618	0,235	0,000	r Hitung > r Tabel	Valid
PRA.4	0,595	0,235	0,000	r Hitung > r Tabel	Valid
PRA.5	0,668	0,235	0,000	r Hitung > r Tabel	Valid
PRA.6	0,624	0,235	0,000	r Hitung > r Tabel	Valid
PRA.7	0,525	0,235	0,000	r Hitung > r Tabel	Valid
PRA.8	0,563	0,235	0,000	r Hitung > r Tabel	Valid
PRA.9	0,623	0,235	0,000	r Hitung > r Tabel	Valid
PRA.10	0,685	0,235	0,000	r Hitung > r Tabel	Valid

Sumber: Hasil olah data primer dengan SPSS 26.0

Bedasarkan tabel 4.13 hasil uji validitas pengawasan realisasi APBD. Dari output yang diperoleh, 10 item pernyataan dinyatakan valid, karena r hitung > r tabel dan nilai sig.  $< 0,05$ . Jadi dapat disimpulkan bahwa masing-masing item pernyataan tentang pengawasan realisasi APBD adalah valid.

#### **b. Uji Reliabilitas**

Suatu alat ukur disebut mempunyai reliabilitas tinggi atau dapat dipercaya, jika alat ukur itu mantap, dalam pengertian bahwa alat ukur tersebut stabil dapat diandalkan dan dapat diramalkan. Suatu alat ukur yang baik tidak berubah-ubah pengukurannya dan dapat diandalkan karena penggunaan alat ukur tersebut berkali-kali akan memberikan hasil yang serupa.

Hasil pengujian reliabilitas dapat dilihat pada output *Reliability Statistics* dari nilai Cronbach's Alpha pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.14**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

No.	Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items	Kondisi	Keterangan
1.	Latar Belakang Pribadi (Pr)	0,903	10	Cronbach's Alpha $\geq 0,60$	Reliabel
2.	Latar Belakang Politik (Po)	0,674	8	Cronbach's Alpha $\geq 0,60$	Reliabel
3.	Komitmen Organisasi (KO)	0,754	8	Cronbach's Alpha $\geq 0,60$	Reliabel
4.	Pengetahuan Anggaran (PA)	0,797	10	Cronbach's Alpha $\geq 0,60$	Reliabel
5.	Pengawasan Realisasi APBD (PRA)	0,815	10	Cronbach's Alpha $\geq 0,60$	Reliabel

Sumber: Hasil olah data primer dengan *SPSS 26.0*

Berdasarkan tabel 4.14 data hasil pengujian reliabilitas diketahui nilai Cronbach's Alpha rata-rata diatas 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa alat ukur dalam penelitian ini dapat dikatakan reliabel.

### 3. Uji Asumsi Klasik

#### a. Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independennya memiliki distribusi normal atau tidak. Uji normalitas dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan *kolmogorov-smirnov*, histogram, dan melihat grafik *p-plot*:

### 1) Uji Normalitas dengan Pendekatan *Kolmogorov-Smirnov*

**Tabel 4.15**

#### **Hasil Uji Normalitas**

#### **One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

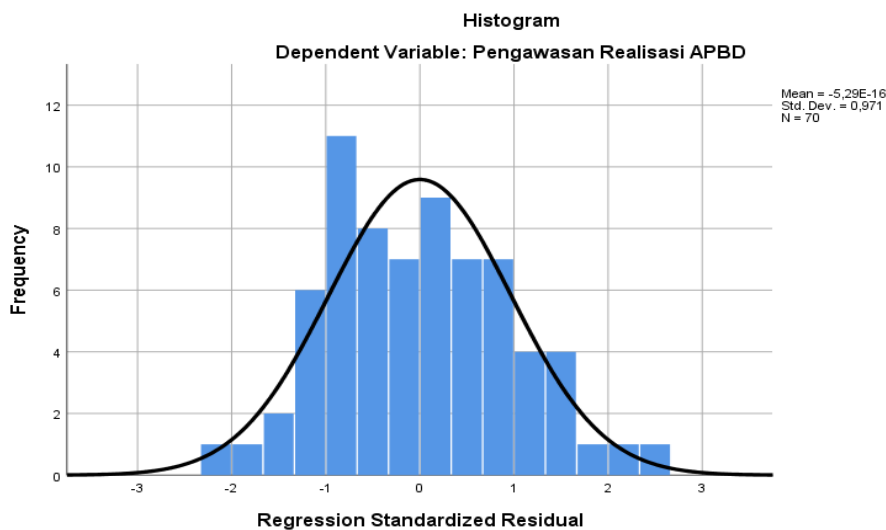
		Unstandardized Residual
N		70
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,72271210
Most Extreme Differences	Absolute	,062
	Positive	,062
	Negative	-,039
Test Statistic		,062
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction. d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Hasil olah data primer dengan *SPSS 26.0*

Berdasarkan tabel 4.15 diatas menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)*  $0,200 > 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian berdistribusi normal.

### 2) Uji Normalitas dengan Pendekatan Histogram

Pendekatan histogram merupakan salah satu uji normalitas yang dapat dilakukan dengan melihat kurva normal. Kurva normal adalah kurva yang memiliki ciri-ciri khusus, salah satunya yaitu bahwa mean, mode, dan mediannya terletak pada tempat yang sama. Jika gambar menunjukkan bahwa distribusi data membentuk lonceng dan tidak melenceng ke kiri ataupun ke kanan berarti data berdistribusi normal.

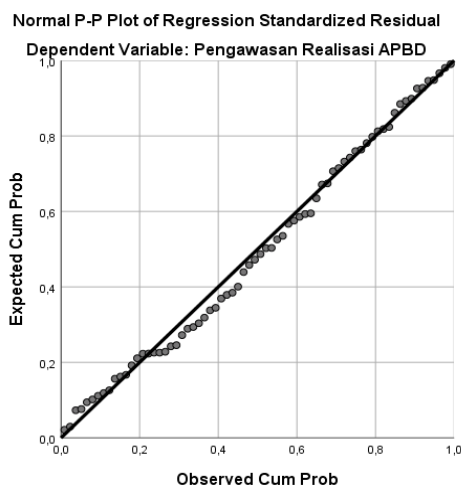


**Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas Pendekatan Histogram**

Pada grafik histogram dari gambar 4.2 di atas menunjukkan bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi yang normal karena membentuk lonceng serta tidak melenceng ke kiri maupun ke kanan.

### 3) Uji Normalitas dengan Pendekatan Grafik *p*-plot

Data dikatakan berdistribusi normal apabila gambar memperlihatkan titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau garis linier.



**Gambar 4.3 Hasil Uji Normalitas Pendekatan Grafik *p*-plot**

Gambar 4.3 menampilkan data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal grafik P-Plot, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

#### b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi yang kuat di antara variabel-variabel independen yang diikutsertakan dalam pembentukan model. Untuk mendeteksi apakah model regresi linier mengalami multikolinearitas dapat diperiksa menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk masing-masing variabel independen, yaitu jika variabel independen mempunyai nilai VIF kurang dari 10 dan *tolerance* yang lebih dari 0,1 maka dapat dinyatakan bahwa model bebas dari masalah multikolinearitas

**Tabel 4.16**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Coefficients <sup>a</sup>								
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
1	(Constant)	18,197	6,432		2,829	,006		
	Latar Belakang Pribadi	-,104	,073	-,143	-1,415	,162	,919	1,088
	Latar Belakang Politik	,220	,130	,170	1,687	,096	,930	1,075
	Komitmen Organisasi	,241	,106	,291	2,282	,026	,578	1,732
	Pengetahuan Anggaran	,354	,116	,383	3,040	,003	,593	1,686
a. Dependent Variable: Pengawasan Realisasi APBD								

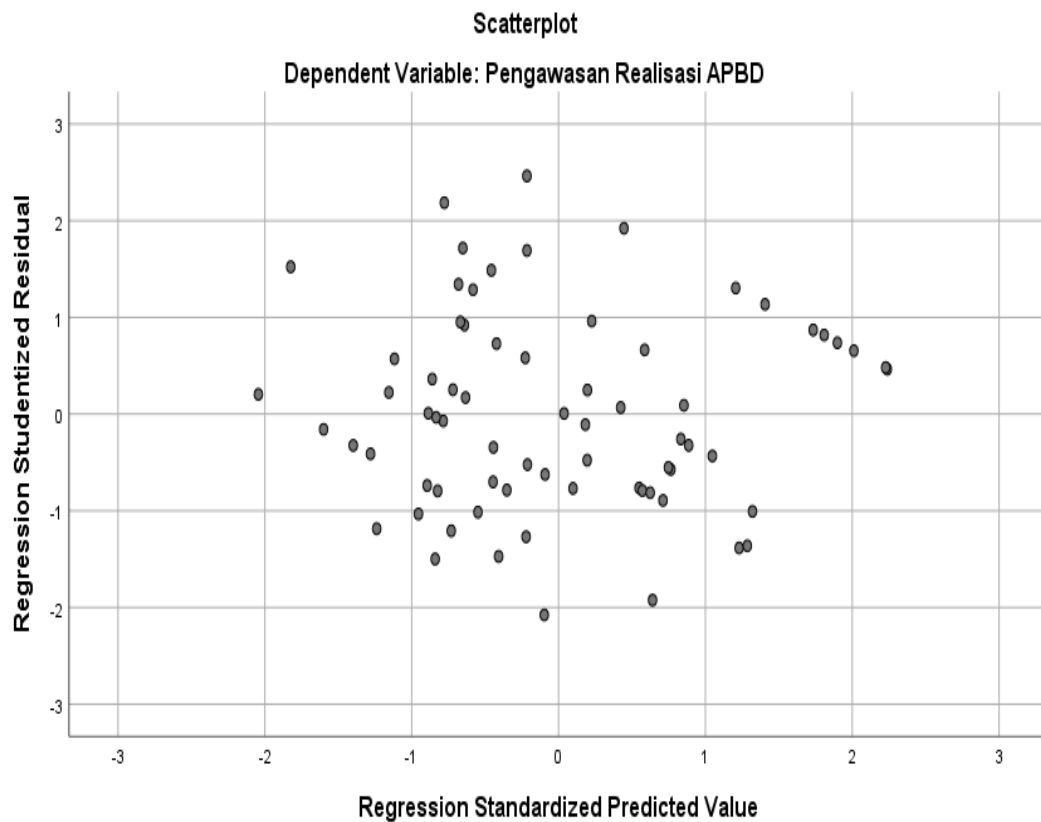
Sumber: Hasil olah data primer dengan SPSS 26.0

Berdasarkan tabel 4.16 diatas, menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *Tolerance* kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan hal yang sama tidak ada satu variabel independen yang memiliki VIF lebih dari 10. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

### c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linier kesalahan pengganggu (e) mempunyai varians yang sama atau tidak dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi heteroskedastisitas varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan *Scatterplot* dan *Glejser*.

#### 1) Uji Heteroskedastisitas dengan Pendekatan *Scatterplot*



**Gambar 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan *Scatterplot***

Berdasarkan gambar 4.4 grafik *Scatterplot* diatas terlihat bahwa titik-titik menyebar dan tidak membentuk pola tertentu yang jelas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

## 2) Uji Heteroskedastisitas dengan Pendekatan *Glejser*

**Tabel 4.17**

### **Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan *Glejser***

Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-,420	1,264		-,332	,741		
	Latar Belakang Pribadi	,004	,014	,038	,299	,766	,919	1,088
	Latar Belakang Politik	,039	,026	,189	1,514	,135	,930	1,075
	Komitmen Organisasi	,024	,021	,180	1,136	,260	,578	1,732
	Pengetahuan Anggaran	-,025	,023	-,172	-1,102	,275	,593	1,686
a. Dependent Variable: Abs_Res								

Sumber: Hasil olah data primer dengan *SPSS 26.0*

Berdasarkan tabel 4.17 di atas, menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai Abs\_Res. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

#### **4. Uji Regresi Linier Berganda**

Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel



dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.

Bentuk umum persamaan regresi linier berganda dapat ditulis sebagai berikut:

$$PRA = 18,197 - 0,104Pr + 0,220Po + 0,241KO + 0,354PA + e$$

Keterangan:

PRA = Pengawasan Realisasi APBD

Pr = Latar belakang pribadi

Po = Latar belakang politik

KO = Komitmen Organisasi

PA = Pengetahuan Anggaran

a, b<sub>Pr</sub>, b<sub>Po</sub>, b<sub>KO</sub>, b<sub>PA</sub> = koefisien regresi linier berganda

e = *error* (kesalahan pengganggu)

**Tabel 4.18**

**Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	18,197	6,432		2,829	,006
	Latar Belakang Pribadi	-,104	,073	-,143	-1,415	,162
	Latar Belakang Politik	,220	,130	,170	1,687	,096
	Komitmen Organisasi	,241	,106	,291	2,282	,026
	Pengetahuan Anggaran	,354	,116	,383	3,040	,003
a. Dependent Variable: Pengawasan Realisasi APBD						

Sumber: Hasil olah data primer dengan SPSS 26.0

Dari persamaan dan tabel 4.18 di atas dapat di jelaskan sebagai berikut:

- a. Konstanta (a) = 18,197 ini menunjukkan bahwa jika variabel Latar Belakang Pribadi, Latar Belakang Politik, Komitmen Organisasi dan

Pengetahuan Anggaran nilainya dianggap atau sama dengan nol maka tingkat variabel Pengawasan Realisasi APBD bernilai sebesar 18,197.

- b. Koefisien regresi variabel Latar Belakang Pribadi memiliki nilai sebesar -0,104 menunjukkan bahwa jika variabel Latar Belakang Pribadi meningkat satu satuan maka nilai Pengawasan Realisasi APBD akan menurun sebesar -0,104.
- c. Koefisien regresi variabel Latar Belakang Politik memiliki nilai sebesar 0,220 menunjukkan bahwa jika Latar Belakang Politik meningkat satu satuan maka nilai Pengawasan Realisasi APBD akan mengalami kenaikan sebesar 0,220.
- d. Koefisien regresi variabel Komitmen Organisasi memiliki nilai sebesar 0,241 menunjukkan bahwa jika Komitmen Organisasi meningkat satu satuan maka nilai Pengawasan Realisasi APBD akan mengalami kenaikan sebesar 0,241.
- e. Koefisien regresi variabel Pengetahuan Anggaran memiliki nilai sebesar 0,354 menunjukkan bahwa jika Pengetahuan Anggaran meningkat satu satuan maka nilai Pengawasan Realisasi APBD akan mengalami kenaikan sebesar 0,354.

## **D. Uji Hipotesis**

### **1. Uji t**

Uji statistik t adalah uji yang menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual (parsial) dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 karena uji dua sisi maka 2,5% dan  $N = 70$  diperoleh t tabel sebesar  $= 1,997$ .

Berikut hasil uji t pada penelitian ini:

**Tabel 4.19**  
**Hasil Uji t (Parsial)**

<b>Coefficients<sup>a</sup></b>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	18,197	6,432		2,829	,006
	Latar Belakang Pribadi	-,104	,073	-,143	-1,415	,162
	Latar Belakang Politik	,220	,130	,170	1,687	,096
	Komitmen Organisasi	,241	,106	,291	2,282	,026
	Pengetahuan Anggaran	,354	,116	,383	3,040	,003
a. Dependent Variable: Pengawasan Realisasi APBD						

Sumber: Hasil olah data primer dengan SPSS 26.0

Berdasarkan tabel 4.19 di atas dapat diketahui bahwa:

1) Hipotesis 1 ( $H_{a1}$ )

Berdasarkan tabel 4.19 dapat dilihat bahwa nilai t hitung  $<$  t tabel yaitu  $-1,415 < 1,997$  dan dengan nilai signifikan sebesar  $0,162 > 0,05$  yang berarti variabel Latar Belakang Pribadi tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap variabel terikat yaitu Pengawasan Realisasi APBD sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_{a1}$  ditolak dan  $H_{o1}$  diterima.

2) Hipotesis 2 ( $H_{a2}$ )

Berdasarkan tabel 4.19 dapat dilihat bahwa nilai t hitung  $<$  t tabel yaitu  $1,687 < 1,997$  dan dengan nilai signifikan sebesar  $0,096 > 0,05$  yang berarti variabel Latar Belakang Politik tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap variabel terikat yaitu Pengawasan Realisasi APBD sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_{a2}$  ditolak dan  $H_{o2}$  diterima.

### 3) Hipotesis 3 ( $H_{a3}$ )

Berdasarkan tabel 4.19 dapat dilihat bahwa nilai  $t$  hitung  $> t$  tabel yaitu  $2,282 > 1,997$  dan dengan nilai signifikan sebesar  $0,026 < 0,05$  yang berarti variabel Komitmen Organisasi berpengaruh dan signifikan terhadap variabel terikat yaitu Pengawasan Realisasi APBD sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_{a3}$  diterima dan  $H_{o3}$  ditolak.

### 4) Hipotesis 4 ( $H_{a4}$ )

Berdasarkan tabel 4.19 dapat dilihat bahwa nilai  $t$  hitung  $> t$  tabel yaitu  $3,040 > 1,997$  dan dengan nilai signifikan sebesar  $0,003 < 0,05$  yang berarti variabel Pengetahuan Anggaran berpengaruh dan signifikan terhadap variabel terikat yaitu Pengawasan Realisasi APBD sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_{a4}$  diterima dan  $H_{o4}$  ditolak.

## 2. Uji F

Uji statistik F adalah uji yang menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat/dependen.

Dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dan  $N = 70$  diperoleh F tabel sebesar = 2,51.

Berikut hasil uji F dalam penelitian ini:

**Tabel 4.20**  
**Hasil Uji F (Simultan)**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	324,792	4	81,198	10,318	,000 <sup>b</sup>
	Residual	511,508	65	7,869		
	Total	836,300	69			
a. Dependent Variable: Pengawasan Realisasi APBD						
b. Predictors: (Constant), Pengetahuan Anggaran, Latar Belakang Pribadi, Latar belakang Politik, Komitmen Organisasi						

Sumber: Hasil olah data primer dengan SPSS 26.0

Berdasarkan tabel 4.20 di atas dapat diketahui bahwa nilai  $F$  hitung  $> F$  tabel yaitu  $10,318 > 2,51$  dan dengan nilai signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$  yang berarti variabel Latar Belakang Pribadi, Latar Belakang Politik, Komitmen Organisasi dan Pengetahuan Anggaran secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap variabel terikat yaitu Pengawasan Realisasi APBD sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_{a5}$  diterima dan  $H_{o5}$  ditolak.

### 3. Uji Model $R^2$

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

**Tabel 4.21**

**Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,623 <sup>a</sup>	,388	,351	2,805
a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Anggaran, Latar Belakang Pribadi, Latar Belakang Politik, Komitmen Organisasi				
b. Dependent Variable: Pengawasan Realisasi APBD				

Sumber: Hasil olah data primer dengan *SPSS 26.0*

Berdasarkan tabel 4.21 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Nilai koefisien determinasi ( $R$  square) sebesar 0,388. Besarnya angka koefisien determinasi ( $R$  square) 0,388 sama dengan 38,8%. Hal ini dapat diartikan bahwa variabel Latar Belakang Pribadi, Latar Belakang Politik, Komitmen Organisasi dan Pengetahuan Anggaran dapat dijelaskan oleh Pengawasan Realisasi APBD sebesar 38,8%. Sedangkan sisanya yaitu, 61,2% dipengaruhi atau dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model ini.

### E. Interpretasi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil dari beberapa uji yang telah dilakukan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa instrumen-instrumen penelitian yang digunakan untuk

dijawab oleh responden dalam mengukur variabel Latar Belakang Pribadi, Latar Belakang Politik, Komitmen Organisasi dan Pengetahuan Anggaran terhadap variabel Pengawasan Realisasi APBD adalah valid dan reliabel, sehingga item pernyataan dapat digunakan di kemudian untuk penelitian selanjutnya. Hasil tersebut selanjutnya diperoleh bahwa variabel Latar Belakang Pribadi, Latar Belakang Politik, Komitmen Organisasi dan Pengetahuan Anggaran secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap variabel terikat yaitu Pengawasan Realisasi APBD. Adapun hasil pengujian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Pengaruh Latar Belakang Pribadi terhadap Pengawasan Realisasi APBD**

Berdasarkan hasil uji t parsial dapat dilihat bahwa nilai t hitung  $< t$  tabel yaitu  $-1,415 < 1,997$  dan dengan nilai signifikan sebesar  $0,162 > 0,05$  yang berarti variabel Latar Belakang Pribadi tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap variabel terikat yaitu Pengawasan Realisasi APBD sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_{a1}$  ditolak dan  $H_{o1}$  diterima.

Hasil penelitian menyimpulkan latar belakang pribadi tidak berpengaruh dan tidak signifikan karena sebagian besar responden berasal dari tingkat pendidikan S1 (sarjana) yaitu sebanyak 44 orang atau 62,9%, sehingga persebaran demografi responden tidak merata. Selain itu sebagian besar responden tidak berasal dari bidang pendidikan yang relevan dengan bidang pengawasan dan keuangan seperti ekonomi dan bisnis, hukum, serta sosial dan politik. Responden dengan relevansi bidang pendidikan yang sesuai dengan bidang pengawasan dan keuangan hanya sebanyak 40 orang atau 57,1%.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti Dewi Kartikasari dengan judul penelitian Pengaruh *Personal Background, Political Background*, Pemahaman Regulasi Terhadap Peran Anggota DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada DPRD Kabupaten Boyolali) pada tahun 2012. Hasil dari penelitian tersebut yaitu tingkat pendidikan dan relevansi bidang pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

Begitupun dengan penelitian dari Sigit Arie Wibowo dengan judul penelitian Pengaruh *Personal Background*, Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan *Political Culture* terhadap Peran DPRD dalam pengawasan Keuangan Daerah Tahun 2012. Penelitian ini menemukan bahwa latar belakang pribadi yang terdiri dari jenis kelamin, usia, strata pendidikan, dan pengalaman politik tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

Penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Syahrudin dan Taifur menyatakan bahwa kemampuan DPRD dalam menjalankan fungsinya tidak saja ditentukan oleh kualitas anggota DPRD yang ada, tetapi dipengaruhi pula oleh perilaku (Moral) anggota DPRD. Sedangkan Yudhoyono Menyatakan bahwa DPRD akan dapat memainkan perannya dengan baik apabila pemimpin dan anggota-anggotanya berada dalam kualifikasi yang ideal, dalam arti memahami benar hak, tugas, dan wewenangnya dan mampu mengaplikasikannya secara baik, dan didukung dengan tingkat pendidikan dan pengalaman dibidang politik dan pemerintahan yang memadai.

## **2. Pengaruh Latar Belakang Politik terhadap Pengawasan Realisasi APBD**

Berdasarkan hasil uji t parsial dapat dilihat bahwa nilai t hitung  $< t$  tabel yaitu  $1,687 < 1,997$  dan dengan nilai signifikan sebesar  $0,096 > 0,05$  yang berarti variabel Latar Belakang Politik tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap variabel terikat yaitu Pengawasan Realisasi APBD sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_{a2}$  ditolak dan  $H_{o2}$  diterima.

Hasil penelitian menyimpulkan latar belakang politik tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pengawasan realisasi APBD karena dalam praktiknya dewan lebih mengedepankan prinsip kolektivitas. Walaupun ideologi setiap fraksi berbeda-beda sehingga menimbulkan multikultural budaya organisasi, tetapi dewan lebih mengutamakan kemufakatan dalam menghadapi suatu permasalahan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti Jaka Winarna dan Sri Murni dengan judul penelitian Pengaruh *Personal Background*, *Political Background* dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran

Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Di Karesidenan Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006). Hasil dari penelitian tersebut yaitu *political background* secara umum tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

Begitupun dengan penelitian dari Sigit Arie Wibowo dengan judul penelitian Pengaruh *Personal Background*, Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan *Political Culture* terhadap Peran DPRD dalam pengawasan Keuangan Daerah Tahun 2012. Penelitian ini menemukan bahwa *Political culture* tidak mempengaruhi peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

Sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Syahrudin dan Taifur menyatakan bahwa kemampuan DPRD dalam menjalankan fungsinya tidak saja ditentukan oleh kualitas anggota DPRD yang ada, tetapi dipengaruhi pula oleh perilaku (Moral) anggota DPRD. Sedangkan Yudhoyono Menyatakan bahwa DPRD akan dapat memainkan perannya dengan baik apabila pemimpin dan anggota-anggotanya berada dalam kualifikasi yang ideal, dalam arti memahami benar hak, tugas, dan wewenangnya dan mampu mengaplikasikannya secara baik, dan didukung dengan tingkat pendidikan dan pengalaman dibidang politik dan pemerintahan yang memadai.

### **3. Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Pengawasan Realisasi APBD**

Berdasarkan hasil uji t parsial dapat dilihat bahwa nilai t hitung  $> t$  tabel yaitu  $2,282 > 1,997$  dan dengan nilai signifikan sebesar  $0,026 < 0,05$  yang berarti variabel Komitmen Organisasi berpengaruh dan signifikan terhadap variabel terikat yaitu Pengawasan Realisasi APBD sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_{a3}$  diterima dan  $H_{o3}$  ditolak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti H. Andi Basru Wawo dan Fitriah Sarufa dengan judul penelitian Pengaruh Komitmen Organisasi Dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Pada Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara) pada tahun 2016. Penelitian ini



menemukan bahwa komitmen organisasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

Sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Mia Lasmi Wardiah yang menyatakan bahwa suatu komitmen organisasi menunjukkan daya dari seseorang dalam mengidentifikasi keterlibatan dalam organisasi. Oleh karena itu, komitmen organisasi menimbulkan rasa memiliki (*sense of belonging*) bagi pekerja terhadap organisasi tempatnya bekerja. Dengan kata lain, para anggota dewan diharapkan menjadi lebih kreatif mencari cara baru untuk memperbaiki efektivitas dan efisiensi kerjanya. Dengan demikian, dewan yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi pada badan legislatif diharapkan akan lebih meningkatkan peran dan fungsinya sebagai lembaga representatif masyarakat.

#### **4. Pengaruh Pengetahuan Anggaran terhadap Pengawasan Realisasi APBD**

Berdasarkan hasil uji t parsial dapat dilihat bahwa nilai t hitung  $>$  t tabel yaitu  $3,040 > 1,997$  dan dengan nilai signifikan sebesar  $0,003 < 0,05$  yang berarti variabel Pengetahuan Anggaran berpengaruh dan signifikan terhadap variabel terikat yaitu Pengawasan Realisasi APBD sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_{a4}$  diterima dan  $H_{o4}$  ditolak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti H. Andi Basru Wawo dan Fitriah Sarufa dengan judul penelitian Pengaruh Komitmen Organisasi Dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Pada Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara) pada tahun 2016. Penelitian ini menemukan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

Sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Yudoyono yang mengatakan bahwa agar mampu menjalankan tugasnya dengan baik, DPRD seharusnya tidak hanya mempunyai kemampuan di bidang politik, tetapi juga pengetahuan yang cukup mengenai mekanisme kerja DPRD, kebijakan publik, konsep dan teknik pemerintahan, teknik pengawasan, dan sebagainya.

## **5. Pengaruh Latar Belakang Pribadi, Latar Belakang Politik, Komitmen Organisasi dan Pengetahuan Anggaran terhadap Pengawasan Realisasi APBD**

Berdasarkan hasil uji F simultan dapat dilihat bahwa nilai F hitung  $>$  F tabel yaitu  $10,318 > 2,51$  dan dengan nilai signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$  yang berarti variabel Latar Belakang Pribadi, Latar Belakang Politik, Komitmen Organisasi dan Pengetahuan Anggaran secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap variabel terikat yaitu Pengawasan Realisasi APBD sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_{a5}$  diterima dan  $H_{o5}$  ditolak.

Sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Syahrudin dan Taifur menyatakan bahwa kemampuan DPRD dalam menjalankan fungsinya tidak saja ditentukan oleh kualitas anggota DPRD yang ada, tetapi dipengaruhi pula oleh perilaku (Moral) anggota DPRD. Sedangkan Yudhoyono Menyatakan bahwa DPRD akan dapat memainkan perannya dengan baik apabila pemimpin dan anggota-anggotanya berada dalam kualifikasi yang ideal, dalam arti memahami benar hak, tugas, dan wewenangnya dan mampu mengaplikasikannya secara baik, dan didukung dengan tingkat pendidikan dan pengalaman dibidang politik dan pemerintahan yang memadai.

Hal ini dapat diartikan bahwa anggota dewan yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi, akan menggunakan pengetahuan yang dimilikinya untuk melaksanakan peran pengawasan terhadap anggaran menjadi relatif tepat dan lebih baik. Komitmen organisasi merupakan cerminan psikologis yang bertujuan memotivasi dewan untuk menjalankan tugas dan fungsinya mengawasi keuangan daerah (APBD) sehingga dengan komitmen organisasi dan pengetahuan dewan mengenai konsep penganggaran, dewan lebih memahami mengenai tugas dan kewajibannya bahwa anggaran daerah merupakan perwujudan amanat rakyat kepada pihak eksekutif maupun legislatif sendiri dalam rangka mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat agar program-program yang telah ditetapkan dalam APBD dapat tercapai.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar Belakang Pribadi tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Pengawasan Realisasi APBD. Hal ini dibuktikan dari hasil uji t parsial yang menjelaskan bahwa nilai t hitung  $< t$  tabel yaitu  $-1,415 < 1,997$  dan dengan nilai signifikan sebesar  $0,162 > 0,05$  yang berarti variabel Latar Belakang Pribadi tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap variabel terikat yaitu Pengawasan Realisasi APBD.
2. Latar Belakang Politik tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Pengawasan Realisasi APBD. Hal ini dibuktikan dari hasil uji t parsial yang menjelaskan bahwa nilai t hitung  $< t$  tabel yaitu  $1,687 < 1,997$  dan dengan nilai signifikan sebesar  $0,096 > 0,05$  yang berarti variabel Latar Belakang Politik tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap variabel terikat yaitu Pengawasan Realisasi APBD.
3. Komitmen Organisasi berpengaruh dan signifikan terhadap Pengawasan Realisasi APBD. Hal ini dibuktikan dari hasil uji t parsial yang menjelaskan bahwa nilai t hitung  $> t$  tabel yaitu  $2,282 > 1,997$  dan dengan nilai signifikan sebesar  $0,026 < 0,05$  yang berarti variabel Komitmen Organisasi berpengaruh dan signifikan terhadap variabel terikat yaitu Pengawasan Realisasi APBD.
4. Pengetahuan Anggaran berpengaruh dan signifikan terhadap Pengawasan Realisasi APBD. Hal ini dibuktikan dari hasil uji t parsial yang menjelaskan bahwa nilai t hitung  $> t$  tabel yaitu  $3,040 > 1,997$  dan dengan nilai signifikan sebesar  $0,003 < 0,05$  yang berarti variabel Pengetahuan Anggaran berpengaruh dan signifikan terhadap variabel terikat yaitu Pengawasan Realisasi APBD.
5. Latar Belakang Pribadi, Latar Belakang Politik, Komitmen Organisasi dan Pengetahuan Anggaran secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap Pengawasan Realisasi APBD. Hal ini dibuktikan dari hasil uji F simultan

yang menjelaskan bahwa nilai  $F$  hitung  $> F$  tabel yaitu  $10,318 > 2,51$  dan dengan nilai signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$  yang berarti variabel Latar Belakang Pribadi, Latar Belakang Politik, Komitmen Organisasi dan Pengetahuan Anggaran secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap variabel terikat yaitu Pengawasan Realisasi APBD.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat diberikan adalah:

1. Untuk Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara disarankan agar memberikan laporan tahunan sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban anggaran kepada DPRD tepat waktu agar para anggota dewan bisa melaksanakan fungsi pengawasan dan pengkajian terhadap realisasi APBD dengan lebih efektif dan efisien.
2. Untuk Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara agar lebih meningkatkan kinerjanya dan memiliki pengetahuan yang memadai mengenai anggaran sehingga pengambilan keputusan tidak salah dan diharapkan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja anggota dewan dalam pelaksanaan pengawasan APBD bisa segera ditindak lanjuti agar kedepannya hal tersebut tidak menjadi penghalang Anggota DPRD dalam melaksanakan pengawasan. Selain itu, lebih aktif melakukan peninjauan di lapangan agar pelaksanaan APBD terealisasi dan berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan.
3. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat memperluas lokasi penelitian di beberapa tempat dengan memilih anggota DPRD yang khususnya membidangi anggaran saja dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode wawancara pada anggota dewan sehingga dewan dapat merespon pertanyaan peneliti sesuai kemampuan yang dimiliki serta dapat menambahkan variabel lainnya seperti partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik, budaya organisasi, dan lain sebagainya yang diduga dapat mempengaruhi pengawasan realisasi APBD.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Zainie. *Dilema Pelaksanaan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*. AIPI: Lipi Press, 2005.
- Ahmadi, Nur. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Medan: FEBI UIN SU Press, 2016.
- Amalia, Nurul Fitri. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada DPRD Kabupaten Purworejo)*. (Skripsi, FE UNNES, 2013).
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan  
<https://www.djpk.kemenkeu.go.id>
- Handoko, T. Hani. *Manajemen*. Ed.2. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2015.
- Harahap, Isnaini., Saparuddin Siregar., dan Mailiswarti. *Pedoman Praktikum SPSS & Bank Mini*. Medan: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Medan, 2013.
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Statistik I (Statistik Deskriptif)*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011.
- Ikhsan, Arfan., Muhyarsyah., Hasrudy Tanjung., dan Ayu Oktaviani. *Metodologi Penelitian Bisnis : Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Bandung: Cita Pustaka Media, 2014.
- Kariangan, Hendra. *Carut-Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah: Perspektif Hukum dan Politik*, Depok: Kencana, 2017.
- Kartikasari, Dewi. *Pengaruh Latar Belakang Pribadi, Political Background, Pemahaman Regulasi terhadap Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada DPRD Kabupaten Boyolali)*. dalam *Accounting Analysis Journal* 1, 2012.
- Kharimah, Firda. *Pengaruh pengetahuan Anggota DPRD tentang Anggaran, Pemahaman Regulasi dan Pengalaman terhadap Peran Anggota Dewan dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Pada DPRD Pemerintahan Provinsi Riau)*. dalam *JOM Fekon*, Vol.4, No.1, Februari 2017, h.804-816.
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Dprd Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019. <https://www.dprd-sumutprov.go.id>

- Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019. <https://www.sumutprov.go.id>
- Lincoln, Arsyad. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, 1999.
- Lubis, Arfan Ikhsan. *Akuntansi Keperilakuan: Akuntansi Multiparadigma*, Ed. 3. Jakarta: Salemba Empat, 2019.
- Mardiasmo. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Cet. 1. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2002.
- Mockler, Robert J. *The Management Control Process*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1972, h.2 dalam T. Hani Handoko, *Manajemen*. Ed. 2. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2015.
- Mulyadi. *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen: Sistem Pelipatganda Kinerja Perusahaan*. Ed.3. Yogyakarta: Salemba Empat, 2007.
- Murwanto, Rahmadi., Adi Budiarto., dan Fajar Hasri Ramadhana. *Audit Sektor Publik : Suatu Pengantar Bagi Pembangunan Akuntabilitas Intansi Pemerintah* Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintah Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan RI.
- Nurhasmah, Nadirsyah, dan Syukriy Abdullah, *Pengaruh Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kompetensi eksekutif, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara*. dalam Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Vol.4, No.1, Februari 2015.
- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara <https://www.sumutprov.go.id>
- Peraturan DPRD SU No.4/K/2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Putri, Fenny Silfia. Hasan Basri. dan Muhammad Arfan, *Pengaruh Latar Belakang Pribadi, Political Background, dan Pemahaman Anggota DPRA tentang Pengelolaan Keuangan Aceh terhadap Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Legislatif di Pemerintah Aceh.* dalam Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Vol.5, No.2, Mei 2016, h.24-35.

Q.S. al- Mujadilah (58):7

Ristanti, Ni Made Asih. Ni Kadek Sinarwati. dan Edy Sujana, *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Komitmen Organisasi terhadap Penerapan Good Governance (Studi Kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan).* dalam *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol.2, No.1, 2014.

Rosita, Ni Made Ana. Nyoman Trisna Herawati. dan Ni Kadek Sinarwati. *Pengaruh Latar Belakang Anggota Dewan dan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) dengan Variabel Moderating Transparansi Kebijakan Publik (Studi Kasus Pada Kantor DPRD Kabupaten Tabanan)* dalam *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol.2, No.1, 2014.

Roslina, *Pengaruh Latar Belakang Pribadi, Political Background, dan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah.*, dalam Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol.1, No.2, Juli-Desember 2012.

Sastroatmodjo, Sudijono. *Perilaku Politik.* Semarang : IKIP Semarang Press, 1995.

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara <https://www.dprd-sumutprov.go.id>

Sutrisno, Edy. *Budaya Organisasi*, Jakarta: Kencana, 2010.

Suwanda, Dadang. dan Akmal Malik Piliang. *Penguatan Pengawasan DPRD: Untuk Pemerintahan Daerah yang Efektif.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.

Syafina, Laylan. *Metode Penelitian Akuntansi: Pendekatan Kuantitatif*, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2019.

Syahrudin dan Taifur, Werry Dart. *Peran DPRD Untuk Mencapai Tujuan Desentralisasi dan Perspektif Daerah Tentang Pelaksanaan Desentralisasi (The Role Of The Regional Assembly In Achieving The Objective Of Decentralization and Regional Perspectives In The Implementation Of Decentralization)*. Faculty of Economics Pusat Studi Kependudukan, Universitas Andalas, Regional University Research , On Decentralization in Indonesia, Project 497-0357/204-000, ECG, USAID/Indonesia, Center for Institutional Reform and the Informal Sector (IRIS) University of Maryland at College Park. 2002.

Tafsir Al-Wajiz / Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili

Tarigan, Azhari Akmal., Isnaini Harahap., Andri Soemitra., Zuhri M. Nawawi., Ahmad Syakir., dan Yusrizal. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Medan: La-Tansa Press, 2011.

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah

Wardiah, Mia Lasmi. *Teori Perilaku dan Budaya Organisasi*. Bandung: Pustaka Setia, 2016.

Wawo, H. Andi Basru dan Fitriah Sarufa. *Pengaruh Komitmen Organisasi Dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Pada Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara)*. dalam Jurnal Akuntansi dan Keuangan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, UHO, Vol.1, No.1, 2016.


Winarna, Jaka. dan Sri Murni. *Pengaruh Latar Belakang Pribadi, Political Background dan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus di Karesidenan Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006)*. dalam Jurnal Bisnis dan Akuntansi, Vol.9, No.2, Agustus 2007, h.136-152.

Yudoyono, Bambang. *Optimalisasi Peran DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. 2000.



## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Surat Izin Riset

	<b>PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA</b> <b>SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</b> Jl. Imam Bonjol No. 5 Telp. (061) 4575001 - 4523043 Fax. (061) 4522270 <b>M E D A N</b>
Email : Humas.dprdsulut@gmail.com	Kode Pos 20112

Nomor : 1244 /18/Sekr	Medan, 15 Juli 2020
Lampiran : -	Kepada Yth :
Perihal : Izin Riset	Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UINSU Medan di-
	Medan.

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor : B-1932/EB.I/KS.02/06/2020 tanggal 24 Juni 2020 Perihal Izin Riset, dengan ini memberikan Izin Kepada :

Nama	: Citra Hidayah
N I M	: 0502161039
Program Studi	: Akuntansi Syariah
Semester	: VIII ( Delapan )


  

Untuk Melaksanakan Riset di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara, dalam rangka memperoleh informasi/keterangan dan data-data untuk penyusunan Skripsi yang berjudul "*Pengaruh Latar Belakang Pribadi dan Politik, Komitmen Organisasi dan Pengetahuan Anggaran Anggota Dewan terhadap Pengawasan Realisasi APBD SU Tahun 2019*" dengan ketentuan mematuhi segala peraturan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih

a.n SEKRETARIS DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA  
KASUBBAG KANTOR USAHA DAN KEPEGAWAIAN



SETWAN  
H. T. N.  
PENAT  
NIP. 3640312 198509 2 001

## **Lampiran 2. Kuesioner Penelitian**

**Yth. Bapak/Ibu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara  
Di Sumatera Utara**

Dengan hormat,

Dalam rangka penyusunan skripsi untuk memenuhi tugas akhir sebagai mahasiswa program Strata satu (S1) dan untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi di Jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, yang berjudul **“Pengaruh Latar Belakang Pribadi dan Politik, Komitmen Organisasi dan Pengetahuan Anggaran Anggota Dewan terhadap Pengawasan Realisasi APBD SU Tahun 2019”** dimohon Bapak/Ibu bersedia mengisi kuesioner terlampir.

Kuesioner ini semata-mata hanya untuk kepentingan ilmiah dan tidak untuk dipublikasikan. Karenanya, Penulis mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu Dewan untuk menjawab dengan jujur dan sungguh-sungguh. Seperti layaknya penelitian ilmiah, Penulis menjamin kerahasiaan identitas dan semua pendapat/opini/jawaban dari Bapak/Ibu. Kesediaan Bapak/Ibu dalam mengisi kuesioner ini adalah bantuan yang tidak ternilai bagi Penulis.

Demikian surat ini Penulis sampaikan. Atas kesediaan Bapak/Ibu luangkan dalam mengisi kuesioner ini, Penulis mengucapkan terima kasih.

Hormat Penulis,

**Citra Hidayah**  
NIM. 0502161039

### IDENTITAS RESPONDEN

Daftar pertanyaan ini berisi dua jenis pertanyaan yaitu jenis isian dan jenis pilihan. Pada jenis isian mohon diisi pada tempat jawaban yang telah disediakan dengan singkat dan jelas. Sedangkan pada jenis pilihan mohon diisi dengan tanda silang (X) yang sesuai menurut Bapak/Ibu anggota Dewan DPRD SU.

1. Nama : .....
2. Jabatan di DPRD Provinsi Sumatera Utara :
  - ( ) Ketua DPRD
  - ( ) Wakil Ketua DPRD
  - ( ) Anggota Komisi: ..... Jabatan di Komisi: .....
  - ( ) Anggota Fraksi: ..... Jabatan di Fraksi: .....
3. Jenis Kelamin : ( ) Laki-laki ( ) Perempuan
4. Umur : ..... Tahun
5. Agama : ( ) Islam ( ) Hindu
  - ( ) Kristen ( ) Buddha
  - ( ) Katolik ( ) Konghucu
6. Strata Pendidikan : ( ) SMA/Sederajat ( ) S2 (Master)
  - ( ) D3 (Diploma) ( ) S3 (Doktor)
  - ( ) S1 (Sarjana) ( ) Lainnya.....
7. Bidang Pendidikan : ( ) Ekonomi dan Bisnis ( ) Pendidikan
  - ( ) Hukum ( ) Agama
  - ( ) Kesehatan ( ) Teknik
  - ( ) Sosial dan Politik ( ) Lainnya: .....
8. Pekerjaan utama terakhir sebelum menjadi anggota DPRD SU
  - ( ) Anggota DPRD di..... ( ) Wiraswasta
  - ( ) Pegawai Swasta ( ) Lain-Lain
9. Sudah berapa lama Bapak/Ibu terlibat dengan partai politik? .....tahun.
10. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara?
  - ( ) 1 (satu) periode.
  - ( ) lebih dari 1 periode.

### Petunjuk Pengisian

Mohon diisi kotak jawaban yang tersedia dengan tanda (X) sesuai dengan pemahaman Bapak/Ibu anggota Dewan DPRD SU dengan alternatif jawaban dibawah ini:

Keterangan:

- |                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. STS : Sangat Tidak Setuju | 4. S : Setuju         |
| 2. TS : Tidak Setuju         | 5. SS : Sangat Setuju |
| 3. N : Netral (Tidak Tahu)   |                       |

### A. Pernyataan I (Latar Belakang Pribadi)

No.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Bapak/Ibu percaya bahwa pendidikan akan mempengaruhi pola pikir seseorang dalam mengambil sikap dan tindakannya selama bekerja.					
2.	Bapak/Ibu merasa jenjang pendidikan yang Bapak/Ibu miliki mendukung dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota dewan.					
3.	Latar belakang pendidikan Bapak/Ibu relevan dengan pelaksanaan tugas sebagai anggota dewan.					
4.	Bapak/Ibu merasa latar belakang pendidikan yang Bapak/Ibu miliki dapat membantu pelaksanaan tugas sebagai anggota dewan.					
5.	Bapak/Ibu percaya bahwa pengalaman dan latar belakang pekerjaan yang Bapak/Ibu miliki berguna dalam membantu pelaksanaan tugas sebagai anggota dewan.					
6.	Bapak/Ibu setuju bahwa siapapun bisa menjadi anggota dewan baik laki-laki					

	ataupun perempuan.					
7.	Bapak/Ibu percaya bahwa usia akan mempengaruhi pola pikir seseorang dalam bertindak dan mengambil keputusan.					
8.	Bapak/Ibu setuju bahwa pentingnya partai politik memperhatikan latar belakang pribadi bakal calon DPRD SU yang diusulkan.					
9.	Bapak/Ibu setuju pentingnya pendidikan tinggi sebagai anggota dewan.					
10.	Bapak/Ibu percaya bahwa pendidikan dan pengalaman yang Bapak/Ibu miliki dapat membantu dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota dewan.					

Sumber: Jaka Winarna dan Sri Murni (2007)

**B. Pernyataan II (Latar Belakang Politik)**

No.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Cara berfikir Bapak/Ibu saat ini merupakan buah dari pengalaman organisasi partai politik yangigeluti selama ini.					
2.	Semakin lama Bapak/Ibu mengikuti suatu organisasi politik, maka semakin banyak pengalaman yang didapatkan.					
3.	Pengalaman organisasi politik Bapak/Ibu mempengaruhi keahlian dalam suatu organisasi.					
4.	Masa kerja Bapak/Ibu di DPRD memberikan pengalaman dalam melaksanakan tugas sebagai anggota dewan.					
5.	Pengalaman di DPRD menjadi media pembelajaran untuk menjadi lebih baik dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota dewan.					
6.	Jabatan Bapak/Ibu di DPRD SU memotivasi dalam melasanakan tugas sebagai anggota dewan.					
7.	Untuk dapat melaksanakan fungsi sebagai anggota DPRD dengan baik, Bapak/Ibu harus sudah pernah memegang jabatan dalam partai politik.					
8.	Pengalaman menjabat di partai politik menjadikan Bapak/Ibu lebih bijaksana.					

Sumber: Jaka Winarna dan Sri Murni (2007)

**C. Pernyataan III (Komitmen Organisasi)**

No.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Bapak/Ibu memiliki keinginan kuat untuk menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara.					
2.	Bapak/Ibu merasa memiliki keterlibatan dalam mencapai tujuan organisasi di tempat Bapak/Ibu bekerja (DPRD SU).					
3.	Bapak/Ibu merasa terikat secara emosional dengan organisasi di tempat Bapak/Ibu bekerja (DPRD SU).					
4.	Bapak/Ibu senang membanggakan organisasi tempat Bapak/Ibu bekerja (DPRD SU) kepada orang lain.					
5.	Bapak/Ibu merasa masalah organisasi di tempat Bapak/Ibu bekerja (DPRD SU) juga menjadi masalah Bapak/Ibu.					
6.	Ada perasaan bersalah meninggalkan DPRD SU, jika seandainya nanti meninggalkan DPRD SU karena ada amanah/jabatan lain dari pemerintah/swasta yang mengharuskan Bapak/Ibu melepas jabatan sebagai anggota DPRD SU.					
7.	Bapak/Ibu mau berusaha di atas batas normal untuk mensukseskan visi misi dan tujuan organisasi DPRD SU.					
8.	Bapak/Ibu merasa bertahan menjadi anggota DPRD SU merupakan keharusan.					

Sumber: H. Andi Basru Wawo dan Fitriah Sarufa (2016)

**D. Pernyataan IV (Pengetahuan Dewan tentang Anggaran)**

No.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Bapak/Ibu perlu mempelajari dan memahami RAPBD/APBD sebelum pembahasan secara seksama.					
2.	Bapak/Ibu mempelajari dan memahami laporan perhitungan dan nota perhitungan APBD secara seksama.					
3.	Bapak/Ibu mempelajari dan memahami laporan pertanggung jawaban (LPJ) kepala daerah secara seksama.					
4.	APBD disusun oleh DPRD bersama-sama dengan Kepala Daerah.					
5.	Penyusunan dan penetapan perhitungan APBD merupakan pertanggungjawaban DPRD.					
6.	Bapak/Ibu memahami dan mengetahui peraturan daerah mengenai RAPBD/APBD					
7.	Dalam menyusun APBD, Pemda dan DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sementara.					
8.	Jumlah anggaran yang disetujui Dewan legislatif harus dimanfaatkan oleh eksekutif secara ekonomis, efektif dan efisien.					
9.	DPRD membahas Kebijakan Umum APBD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.					
10.	Bapak/Ibu segera mengetahui dan dapat mengidentifikasi apabila terjadi pemborosan atau kegagalan kegiatan/proyek pembangunan pada anggaran tahun berjalan secara rinci.					

Sumber: Dewi Kartikasari (2012)



**E. Pernyataan V (Pengawasan Realisasi APBD)**

No.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Anggota dewan terlibat dalam memberikan masukan saat penyusunan arah dan kebijakan umum APBD.					
2.	Analisis politik dan ekonomi selalu dilakukan dalam proses penyusunan APBD.					
3.	Anggota dewan terlibat dalam pengesahan APBD.					
4.	Anggota dewan dapat menjelaskan APBD yang telah disusun oleh pemerintah					
5.	Anggota dewan terlibat dalam memantau pelaksanaan APBD.					
6.	Anggota dewan aktif melakukan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh pemerintah.					
7.	Anggota dewan melakukan evaluasi APBD yang mencakup faktor-faktor atau alasan-alasan yang mendorong timbulnya revisi APBD.					
8.	Anggota dewan meminta keterangan berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban (LPJ) APBD yang disampaikan Gubernur dan harus meyakinkan bahwa APBD telah memiliki transparansi.					
9.	Anggota dewan selalu mengusut dan menindaklanjuti apabila terjadi kejanggaran dalam LPJ APBD.					
10.	Anggota dewan aktif menggunakan hak untuk menolak LPJ Gubernur jika tidak sesuai dengan standar kinerja dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.					

Sumber: Dewi Kartikasari (2012)

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **I. IDENTITAS PRIBADI**

1. Nama : Citra Hidayah
2. NIM : 0502161039
3. TTL : Medan, 14 Mei 1998
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Alamat : Jalan Pertiwi no. 88 Medan, Sumatera Utara

### **II. RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. Tamatan SDS Pesantren GUPPI Medan Berijazah Tahun 2010
2. Tamatan MTsN 2 Medan Berijazah Tahun 2013
3. Tamatan SMAN 11 Medan Berijazah Tahun 2016
4. Tamatan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Berijazah Tahun 2020

### **III. RIWAYAT ORGANISASI**

1. Relawan Nusantara Medan (2019-Sekarang)
2. KSEI UIE UINSU (2016-2020)
3. DEMA FEBI UINSU (2017-2018)
4. HMI Komisariat FEBI UIN SU (2016-2017)
5. E2AR FEBI UINSU (2016-2017)

### **IV. RIWAYAT MAGANG**

1. Divisi Verifikasi dan Akuntansi, KPPN Medan I, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Selama 02/2020-03/2020 (1 Bulan)
2. Divisi Administrasi dan Umum, Fraksi Gerindra, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara. Selama 01/2020-02/2020 (1 Bulan)